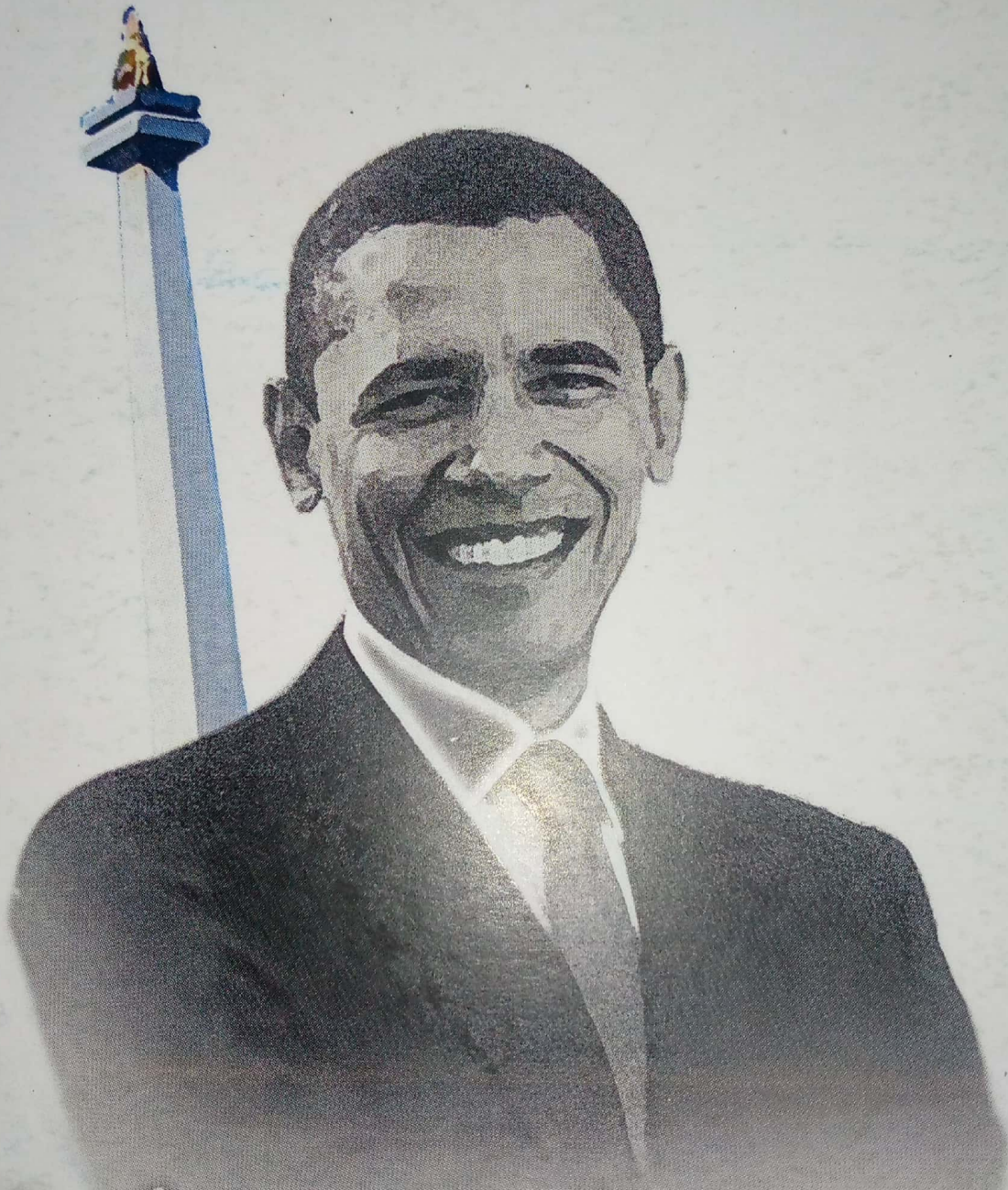


Tim Peneliti:

Dra. Nuraida, M.Ag, Sumaina Duku, M.Si, Reza Aprianti, MA, Manalullaili, M.Ed
Indrawati, M.Pd, Anita Trisiah, M.Sc, Suryati, M.Pd, Yenrizal, M.Si,
Henny Yusalia, M.Hum, Muzaiyanah, M.Pd



Critical Discourse Analysis

Pada Teks Pidato **Barack Obama**

Ketika Berkunjung di Indonesia

Critical Discourse Analysis Pada Teks
Pidato Barack Obama
Ketika Berkunjung di Indonesia

Tim Penelitian Selektif

Koordinator Peneliti	:	Dra. Nuraida, M.Ag
Peneliti Utama	:	Sumaina Duku, M.Si
Peneliti	:	Reza Aprianti, MA
Pembantu Lapangan	:	Manalullaili, M.Ed
Petugas Survey	:	1. Indrawati, M.Pd 2. Anita Trisiah, M.Sc
Pengolah Data	:	Suryati, M.Pd
Sekretariat Peneliti	:	1. Yenrizal, M.Si 2. Henny Yusalia, M.Hum 3. Muzaiyanah, M.Pd

JURUSAN JURNALISTIK
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
IAIN RADEN FATAH
PALEMBANG
2012

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit**

Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mekukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkar 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Critical Discourse Analysis

Pada Teks Pidato Barack Obama Ketika Berkunjung di Indonesia

Tim Penelitian Selektif

- Koordinator Peneliti : Dra. Nuraida, M.Ag
Peneliti Utama : Sumaina Duku, M.Si
Peneliti : Reza Aprianti, MA
Pembantu Lapangan : Manalullaili, M.Ed
Petugas Survey : 1. Indrawati, M.Pd
2. Anita Trisiah, M.Sc
Pengolah Data : Suryati, M.Pd
Sekretariat Peneliti : 1. Yenrizal, M.Si
2. Henny Yusalia, M.Hum
3. Muzaiyanah, M.Pd

Hak Penerbit pada Noer Fikri Offset , Palembang

Editor : Drs. Syaipul Annur, M.Pd

Desain Cover oleh igit d'java

Seting dan Tata Letak NoerFikri Offset

Dicetak oleh Noer Fikri Offset bekerjasama dengan Lembaga Penelitian IAIN
Raden Fatah Palembang

Noer Fikri Offset

Jl. KH. Zainal Abidin Fikri
Komp. IAIN

Palembang 30126

Telp/Fax: 314 272

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan ke 1, Februari 2012

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

ISBN: 978-602-7512-29-0

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Judul | : | <i>Critical Discourse Analysis</i> Pada Teks Pidato Barack Obama Ketika Berkunjung di Indonesia |
| 2. Jenis Penelitian | : | Penelitian Selektif |
| 3. Kategori Penelitian | : | - |
| 4. Identitas Peneliti | : | |
| a. Nama Lengkap | : | Sumaina Duku, M.Si |
| b. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| c. Pangkat / Gol / NIP | : | - |
| d. Jabatan Fungsional | : | - |
| e. Fakultas / Program Studi | : | Dakwah dan Komunikasi /
Jurusan Jurnalistik |
| f. Bidang Ilmu yang diteliti | : | Critical Discourse Analysis |
| 5. Jangka waktu penelitian | : | 6 (enam) bulan (Januari-Juni 2012) |

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian.

Palembang, Juni 2012
Peneliti,

Drs. Syaiful Annur, M.Pd
NIP. 197012081996031003

Sumaina Duku, M.Si
NIP.

Abstrak

Analisis Wacana Kritis melihat bahasa sebagai faktor penting. Dalam analisis wacana kritis, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat serta pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Tujuan penelitian ini adalah menginterpretasi teks pidato Barack Obama dengan menggunakan analisis wacana kritis. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan CDA (Critical Discourse Analysis)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hegemoni dan ideologi dalam teks pidato Barack Obama dan dalam komunikasi politiknya Barack Obama menguasai lima pola komunikasi massa yaitu kelengkapan (complete), keringkasan dan kepadatan (concise), memahami keinginan rakyat (consideration), memukau (clarity), dan persuasif dalam menumbuhkan respek (courtesy). Pola-pola komunikasi ini selalu masuk dalam rangkaian pidatonya. Pidato Obama di Indonesia dapat dipahami sebagai usaha Amerika Serikat untuk menghalangi hegemoni Rusia dan Cina terhadap Asia dan Eropa demi mempertahankan posisi sebagai negara super power atau negara global power. Sejarah mencatat, sampai saat ini Amerika Serikat masih mempertahankan posisi itu. Hegemoni melalui segala aspek kehidupan terus diupayakan oleh Amerika Serikat baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan keamanan. Amerika Serikat berupaya menjadi polisi dunia dengan menanggung beban kepemimpinan dunia.

Pidato Obama merupakan landasan ideal untuk mengupayakan perdamaian dan mengubah wacana antara Amerika Serikat dengan dunia Muslim serta merupakan langkah awal proses pembaruan hubungan AS dengan dunia Muslim. Ideologi yang diusung oleh Amerika Serikat adalah ideologi liberalisme. Liberalisme disebut sebagai ideologi dunia modern yang paling berhasil. Liberalisme menyiratkan hal-hal yang akan menyelamatkan dan mempertinggi kebebasan itu, seperti persamaan hak, pemerintahan konstitusional, aturan hukum, dan toleransi. Sementara Indonesia menganut ideologi Pancasila, pidato Obama memberi isyarat bahwa ideologi yang dianut Amerika dan Indonesia kurang lebih sama yaitu menyelamatkan dan mempertinggi kebebasan, seperti persamaan hak, pemerintahan konstitusional, aturan hukum, dan toleransi.

Secara akademis, Penelitian ini berupaya melakukan analisa kritis terhadap teks pidato Barack Obama Presiden Amerika Serikat yang ke-44 ketika berkunjung di Indonesia November 2010 dan mencoba menghubungkannya dengan pidato sebelumnya di Mesir pada Juni 2009 serta kaitannya dengan bergolaknya Timur Tengah pada tahun 2011. Secara praktis, dari interpretasi teks pidato Barack Obama direkomendasikan agar penelitian tentang analisis wacana kritis makin didalami terutama dalam teks-teks pidato di mana sebuah teks pidato presiden ketika berkunjung ke suatu negara selalu mengandung makna yang membawa misi negara apalagi seperti Amerika Serikat yang berperan sebagai negara yang mendominasi negara lain.

DAFTAR ISI

Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Signifikiansi Penelitian	14
BAB II KERANGKA TEORI	
2.1 Komunikasi Politik	15
2.2 Teori Hegemoni	23
2.3 Teori Ideologi	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Paradigma Penelitian	51
3.2 Metode Pengumpulan Data	55
3.3 Objek Kajian	55
3.4 Metode Analisis	55
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Analisis	61
4.2 Interpretasi	90
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan	173
5.2 Rekomendasi Penelitian	174

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Barack Obama, Presiden Amerika Serikat yang ke-44 memiliki kedekatan yang kuat dengan Indonesia. Kedekatan yang berawal saat Obama masih kanak-kanak mengikuti ibunya Stanley Ann Dunham Barry yang menikah dengan Lolo Soetoro, seorang mahasiswa dari Indonesia untuk hijrah ke Indonesia. Hampir empat tahun (1967-1971) Obama menghabiskan masa kanak-kanaknya di Indonesia. Budaya Indonesia cukup terpatritasi dalam diri seorang Obama. *Critical Age*-nya pun dilewati di Indonesia. Apalagi semasa kecil konsep Pancasila sudah menjadi hafalan wajib bagi Obama cilik.

Obama terlahir dari persimpangan budaya, memiliki Ayah seorang Kenya yang berkulit hitam dan Ibu Amerika berkulit seputih susu. Di simpang budaya yang sangat berbeda, belahan bumi Afrika dan Amerika. Namun demikian pandangan demokratisnya yang universal menjadikannya seseorang yang patut dijadikan contoh tokoh populer abad ini.

Meski terlahir dari persimpangan budaya dan juga mengalami masa diskriminasi warna kulit di Amerika Serikat, Obama membuktikan pada dunia bahwa seorang yang Afro Amerika pun bisa menjadi Presiden.

Obama adalah keturunan Afro Amerika pertama yang menjabat Presiden Amerika Serikat setelah sebelumnya merupakan keturunan Afrika-Amerika pertama yang dicalonkan oleh sebuah partai politik besar Amerika untuk menjadi presiden. Lulusan Universitas Columbia dan Sekolah Hukum Universitas Harvard; di sana ia menjabat sebagai presiden *Harvard Law Review*, Obama bekerja sebagai koordinator masyarakat dan menjabat sebagai pengacara hak sipil sebelum menjadi Senat Illinois selama tiga kali mulai 1997 hingga 2004. Ia mengajar hukum konstitusional di Sekolah Hukum Universitas Chicago sejak 1992 hingga 2004. Setelah kegagalan meraih kursi di Dewan Perwakilan AS tahun 2000, ia mengumumkan kampanyenya untuk Senat AS bulan Januari 2003. Setelah kemenangan Maret 2004, Obama menyampaikan *key notenya* pada Konvensi Nasional Demokrat Juli 2004. Ia terpilih sebagai Senat pada November 2004 dengan 70 persen suara.

Barack Obama menarik bagi orang Amerika dari berbagai lapisan karena keinginannya menjalin persatuan baru, persatuan diantara orang-orang dengan warna kulit, agama, dan pandangan politik yang berbeda. Obama ingin menyatukan berbagai kalangan, mengatasi perbedaan di Amerika Serikat bahkan di dunia internasional. Pengalaman hidupnya dalam berbagai perbedaan ikut memberikan ruang demokratis baginya.

Dalam memoarnya *Dreams from My Father – A Story of Race and Inheritance* yang ditulis tahun 1994, ia bercerita tentang masa kecilnya di Jakarta yang ia sebut “Djakarta”. Jakarta yang ia gambarkan kala itu barangkali masih mirip dengan Jakarta hari ini (setidaknya di beberapa tempat) : tengah kota yang sedikit modern, toko-toko kecil yang berderet di jalanan, lalu lintas yang sesak dan macet, pendorong gerobak barang, matahari yang terik dan pengemis di persimpangan jalan.

Pidato Obama memberi pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat Indonesia, jutaan pemirsa televisi Indonesia seakan terhipnotis pada satu titik ketika Obama berpidato di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Indonesia. Bahkan, secara global pidato Obama saat kedatangannya di Indonesia dianggap berpengaruh setelah pidatonya di Kairo Mesir pada Juni 2009 dengan tema “A New Beginning”.

Tema pidato Obama di Jakarta tentang demokrasi, pembangunan, pluralis, dan agama merupakan pidato yang strategis mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hegemoni dan ideologi berperan dalam pidato Obama, di mana pidato tersebut secara tidak langsung merupakan sarana untuk mendekatkan hubungan Amerika Serikat dengan dunia Islam. Apalagi dalam hal demokrasi, Indonesia dipandang sebagai negara yang patut diteladani.

Dunia Barat khususnya Amerika Serikat menganut paham kapitalisme modern dan menempatkan diri sebagai negara adikuasa melebihi negara lain. Sebagai negara *superpower* Amerika Serikat berusaha mengedepankan diri

dengan ideologinya sehingga negara lain manut dan mengikuti kehendak ataupun ideologinya. Secara tidak sadar Indonesia pun terhegemoni oleh Amerika Serikat, di mana Indonesia banyak berkiblat ke Amerika dalam berbagai aspek kehidupan seperti misalnya kebebasan, hak asasi manusia, juga demokrasi.

Hegemoni dalam bidang ekonomi misalnya, kekuasaan dolar Amerika Serikat terhadap ekonomi global di mana kebanyakan transaksi Internasional dilakukan dengan dolar Amerika. Dalam hal ini secara tidak sadar, secara global Amerika Serikat telah menanamkan paham hegemoni bahwa dolar adalah mata uang terbaik di dunia, dan tidak ada satu negara pun di dunia ini mampu mengingkari itu meskipun Eropa berusaha menyaingi dengan mata uang Euro-nya tetapi tetap saja dolar belum terkalahkan.

Hegemoni finansial terjadi akibat bertemunya tiga proses berikut ini: 1) globalisasi pasar finansial, 2) deregulasi pasar domestik, dan 3) inovasi produk-produk finansial (*financial derivative products*) pada level perusahaan. Ketika faktor ini saling bersinergi dan menghasilkan sebuah sistem di mana inovasi finansial terjadi dengan begitu cepat, dan akhirnya menjadi sebuah tatanan dominan.

Pasar dunia telah mengetahui kerapuhan dolar, tapi tiada mata uang yang mampu menggantikannya saat ini dan tak tahu terobosan baru yang tepat. Dengan bermunculan himbuan penggantian peran dolar, otorita moneter AS sebaliknya harus menerimanya sebagai peringatan dini agar tetap komit pada “a strong dollar policy”, menjaga pergerakan dolar secara tertib sambil cepat menurunkan defisit yang

menganga, mengurangi beban utang berat, membatasi likuiditas berlebihan termasuk mencetak uang baru, demi memenangkan kembali kepercayaan pasar dan investor.

Dollar, mata uang Amerika Serikat ini, adalah salah satu pilar yang menopang kekuatannya di muka bumi. Dollar telah menjadi mata uang cadangan (*reserve currency*) bagi sedikitnya 60 persen negara di dunia ini. Dollar juga menjadi mata uang standar yang digunakan dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional.

Sedemikian berpengaruhnya dollar dalam perekonomian bangsa-bangsa di dunia membuat pergerakannya akan selalu dicermati oleh setiap pengambil kebijakan. Sebaliknya, pemilihan dollar sebagai *reserve currency* dan mata uang untuk transaksi perdagangan internasional oleh suatu negara sangat mempengaruhi jalannya perekonomian AS. Oleh karena itu, ketika Iran memutuskan untuk mengubah mata uang untuk transaksi ekspor impor minyaknya dari dollar ke Euro atau Dinar, pemerintah AS geram, karena langkah Iran itu diikuti oleh negara-negara eksportir minyak lainnya, maka kemungkinan besar ekonomi Amerika akan mengalami kemunduran.

Penolakan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) terhadap keinginan Amerika Serikat untuk hadir pada pertemuan SCO yang dihadiri Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Presiden China Hu Jintao, dan para pemimpin negara-negara anggota SCO lainnya di Yekaterinburg, Rusia, bulan Juni 2009 lalu, bisa jadi menjadi pukulan baru bagi AS. Salah satu agenda utama pertemuan yang dilangsungkan di kota yang sebelumnya bernama

Sverdlvsk itu adalah membahas penggantian dollar AS sebagai mata uang cadangan devisa (reserve currency) dunia. Mengingat strategisnya dollar AS bagi eksistensi imperium AS, manuver ini ibaratnya "kudeta" dipercepat terhadap hegemoni AS oleh kekuatan-kekuatan ekonomi global yang baru. Dalam proposal yang disampaikan pada pertemuan G-20 April 2009 misalnya Rusia bersama China mengusulkan dibentuknya suatu mata uang global, untuk menggantikan dollar sebagai mata uang cadangan devisa. Mata uang cadangan devisa yang disebutnya supra-national reserve currency itu harus bebas dari kepentingan individu negara.

Ekonom Michael Hudson dalam tulisan di Global Research menyebut pertemuan G-20 sebagai "pertemuan terpenting abad ke-21". Sejumlah ekonom lain melihat pertemuan itu sebagai pertanda awal tamatnya hegemoni dollar AS sebagai reserve currency dan berakhirnya imperium Amerika. Gagasan mata uang cadangan devisa baru global bergulir sejalan dengan desakan dilakukannya reformasi sistem kapitalisme pasar bebas dan perombakan arsitektur finansial global yang terbukti rentan krisis.

Namun begitu, pernyataan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Menteri Keuangan Tim Geithner pada tanggal 19 Juni 2009 yang menegaskan dollar AS akan tetap menjadi mata uang cadangan devisa (reserve currency) dominan untuk jangka waktu yang lama, menyiratkan, AS tidak hanya akan pasrah menghadapi kemungkinan kehilangan status dollar AS sebagai reserve currency. Ron Paul dalam paparan berjudul "*The End of Dollar Hegemony*" yang disampaikan di depan Kongres AS, 15 Februari 2009,

pernah mengakui mengakui, selain kepentingan penguasaan pasokan minyak, motif sebenarnya serangan AS ke Irak adalah karena AS ingin melindungi hegemoni dollar AS. Target utama dari serangan ini sebenarnya Uni Eropa dengan euro-nya, yakni untuk menjegal jangan sampai euro mengancam posisi dollar AS sebagai mata uang wajib dalam transaksi perdagangan minyak dan sebagai cadangan devisa. serve currency.

Selama enam dekade lebih AS diuntungkan oleh posisi dollar AS sebagai reserve currency. Kuatnya nilai tukar dollar AS sejak 1945 terutama ditopang oleh posisi mata uang ini sebagai mata uang wajib untuk semua transaksi perdagangan minyak mentah dunia (dikenal dengan istilah petrodollar), sesuai dengan kesepakatan dengan OPEC. Kondisi ini menyebabkan permintaan akan dollar AS juga tetap tinggi, apa pun kondisi ekonomi AS. Posisi ini juga memungkinkan AS meraup keuntungan dari mencetak uang dan penerbitan surat utang pada suku bunga yang lebih rendah daripada yang negara lain bisa lakukan, untuk membiayai konsumsi eksekutif pemerintah dan masyarakatnya. Posisi dollar AS sebagai mata uang cadangan devisa juga membuat AS bisa menikmati harga minyak yang lebih stabil dibandingkan negara lain karena importir tidak perlu mencemaskan fluktuasi nilai tukar mata uang. Sebaliknya, pencampakan dollar AS akan membuat nilai dollar AS jatuh dan dana asing akan mengalir keluar dari pasar modal AS atau dari aset dalam denominasi dollar AS lainnya. Bank-bank juga akan menghadapi penarikan dana besar-besaran seperti pada Depresi Besar 1930-an. Defisit neraca transaksi berjalan dan defisit anggaran

juga bakal tak bisa ditutup. Sebagai perekonomian, AS akan mengalami default (gagal bayar) alias ‘kebangkrutan’.

Sistem moneter dunia dalam kenyataannya menggunakan dollar AS sebagai mata uang cadangan (reserve currency), mata uang intervensi dalam sistem yang memerlukannya, sarana transaksi sebagian terbesar perdagangan barang dan jasa, termasuk transaksi minyak serta untuk sarana investasi. Sebagai mata uang cadangan dan intervensi penggunaan dollar AS telah berlangsung sejak mulai dianutnya sistem Bretton Woods bersamaan dengan kelahiran Dana Moneter Internasional (IMF) setelah berakhirnya PD II hampir enam puluh tahun lalu. Pada waktu PD II berakhir, sistem dan kebiasaan yang mengandalkan dollar AS sangat logis mengingat kekuatan perekonomian AS memang sangat menonjol sebagai satu-satunya negara besar yang tidak rusak oleh perang. Sistem moneter dunia dengan dominasi dollar AS ini juga didukung cadangan emas AS yang memang tidak tertandingi oleh negara manapun waktu itu. Akan tetapi, setelah berlangsungnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia yang luar biasa selama beberapa dekade, imbang kekuatan ekonomi antar negara-negara besar telah berubah. Selain itu, pola hubungan ekonomi keuangan telah sangat berkembang mengarah pada ekonomi global yang tanpa batas (borderless).

Seperti yang telah ketahui Amerika Serikat menjelma menjadi negara adidaya setelah Perang Dunia II usai, walau Amerika terlibat dalam perang dunia tersebut baik di front barat (eropa) maupun front timur (asia fasifik), home land (tanah air) Amerika Serikat hampir sama sekali bersih dari

kerusakan akibat perang, sementara Eropa dan Asia hancur akibat perang, Amerika Serikat timbul menjadi negara kaya dengan industri raksasanya. Selain itu efek yang dirasakan setelah perang adalah melajunya US dollar sebagai mata uang perdagangan internasional, kebangkitan negara-negara Eropa dan Asia pasca perang pada tahun 50-an membuat para trader seluruh dunia mulai sadar bahwa sirkulasi dollar di seluruh dunia sudah berlebihan dan mulai menukarnya dengan emas. Dikarenakan adanya deplasi emas hebat pada cadangan emas Amerika Serikat, Presiden AS paling kontroversial Richard Nixon pada tahun 1971 melepaskan keterikatan emas dengan mata uang dollar, dollar pada waktu diprediksi akan terjun bebas.

Tapi kemudian Amerika Serikat pada tahun 1973 berhasil merayu kartel negara-negara penghasil minyak dunia (OPEC) yang notabene didominasi negara-negara Arab muslim, mematok harga minyaknya terhadap dollar Amerika Serikat. Padahal belum lama sebelumnya Amerika Serikatlah sekutu utama Israel dalam berperang dengan negara-negara Arab, singkat kata Minyak Bumi mem-back-ing dollar, permintaan dollar melonjak drastis dikarenakan negara-negara berkembang harus mengimpor sebagian besar minyak bumi dari OPEC untuk menghidupi industrinya yang baru berkembang dengan pembayaran US dollar. Amerika Serikat menyambut gembira permintaan dollar dari negara-negara berkembang dengan membanjiri negara-negara berkembang dengan “dana bantuan” (pinjaman) lewat lembaga-lembaga keuangan semacam IMF dan tentunya pinjaman dalam bentuk mata uang US dollar. Posisi dollar semakin kuat (dollar

hegemony) sebagai cadangan devisa luar negeri diseluruh dunia.

Sistem keuangan juga berkembang dan berubah didorong oleh liberalisasi dan kemajuan teknologi. Anehnya berbagai perubahan ini tidak merubah hegemoni dollar AS dalam perekonomian dunia. Peran dollar justru lebih meluas, tidak terbatas pada mata uang cadangan dan intervensi. Perkembangan tersebut telah menumbuhkan ketidakimbangannya kekuatan fundamental yang mendasari dollar AS dengan peran yang dimainkannya. Penggunaan dollar AS oleh kebanyakan bank sentral dalam memegang cadangan devisa jauh lebih besar dari rasio produksi AS terhadap produksi dunia. Demikian pula besarnya penggunaan dollar AS dalam transaksi perdagangan dunia tidak seimbang dengan rasio volume perdagangan AS terhadap perdagangan dunia. Dengan perkataan lain ada ketidakseimbangan antara fundamental ekonomi makro yang mendasari dollar AS dan peran yang dimainkannya dalam sistem yang berjalan. Dapat dikatakan dollar AS telah keberatan beban.

Hegemoni dollar mulai terancam pada tahun 1999 dimana negara-negara Eropa bergabung dalam membentuk mata uang gabungan Eropa yang disebut Euro, gabungan raksasa-raksasa ekonomi Eropa dengan Euro-nya mampu menggoyang dominasi dollar sebagai mata uang dalam perdagangan Minyak Bumi. Klien pertama Euro adalah Iran dimana Iran tidak menerima dollar sebagai alat pembayaran minyaknya dan hanya menerima Euro. Pada Oktober 2000 lewat PBB Irak meminta program “minyak untuk makanan” bagi rakyat Irak dibayar dengan Euro tidak dengan US dollar.

Walhasil \$10 milyar minyak Irak dikonversi dari dollar ke Euro, tindakan berani Saddam ini membuat marah para petinggi Washington dan mereka harus menetapkan balasan sebagai peringatan bagi mereka yang mangkir dari US dollar, memanfaatkan momen WTC 9/11 Presiden George W Bush menyerang Irak dan menggulingkan Saddam dengan alasan Irak mendukung terorisme dan mempunyai senjata pemusnah massal, kini Irak jatuh ke tangan AS. Fakta-fakta Irak diatas sama sekali tidak diberitakan walau sedikit pun di media massa Amerika.

Tahun 2000 Venezuela lewat Presidennya Chavez mengusulkan kepada OPEC untuk memperdagangkan minyak bumi secara barter dengan barang dan jasa pada konvensi OPEC bulan September 2000. Tidak tanggung-tanggung Venezuela menetapkan Kuba sebagai negara mitra dagang barter minyak bumi dengan jasa layanan kesehatan Kuba bagi masyarakat kecil Venezuela. Ancaman Venezuela dicoba dinetralisir AS secara halus, pada tahun 2002 Presiden terpilih dua kali Chavez mendapat percobaan kudeta, yang pertama menyambut gembira adalah administrasi Bush dan media massa AS akan kudeta dengan berita-berita menyudutkan Chavez, berita-berita tersebut langsung surut dalam 2 hari setelah diketahui kudeta terhadap Chavez gagal. Ini hanya membuktikan bahwa kudeta tersebut didalangi dan dibiayai oleh AS.

Sejak awal peluncuran Euro pada tahun 1999, nilainya kini telah jauh melebihi US dollar dan mencapai puncaknya pada bulan-bulan kemarin di level 1.6/dollar AS. Ancaman

bertubi-tubi kini datang bukan hanya dari Eropa malah dari Asia dan Rusia.

Cina pada 2007 pernah menghadapi ancaman embargo parsial Amerika terhadap produk-produk impor dari Cina, dengan alasan kualitas dan ancaman kesehatan yang ditimbulkan produk-produk Cina, sebenarnya ini hanya akal-akalan AS untuk menutupi defisit perdagangannya dengan Cina. Balasan Cina tidak kurang dasyat, sadar posisi US dollar sedang lemah dikarenakan pemotongan suku bunga yang agresif oleh Bank Sentral AS, Cina “merencanakan” untuk mengubah sebagian cadangan devisa luar negerinya dari US dollar ke mata uang yang memiliki nilai tinggi (suku bunga tinggi) seperti Euro dan Poundsterling (Inggris). Akibatnya US dollar seperti jatuh dari langit, sampai saat ini rencana embargo sebagian barang Cina tersebut tidak pernah lagi bergulir di kongres. Rusia kini juga mencoba merebut kembali dominasinya dan kini sedang dipraktikkan di Georgia, sebuah negara kecil yang bersekutu dengan barat (AS). Tidak bisa disangsikan pula bahwa Amerika Serikat akan terus berperang baik secara terbuka atau sembunyi-sembunyi untuk menyelamatkan ekonomi dan hegemoni mata uangnya yang sedang jatuh.

Bahwa ekonomi AS merupakan yang terbesar dan terkuat di dunia, dan bahwa perkembangan perekonomian negara-negara di dunia langsung atau tidak langsung tergantung dari perkembangan ekonomi AS memang tidak bisa dimungkiri. Akan tetapi, dalam ekonomi-keuangan global sekarang dan masa depan, dengan potensi RRC dan

India seperti sekarang, ekonomi AS meskipun tetap terbesar dan terkuat, jelas bukan satu-satunya kekuatan raksasa.

Ideologi dibangun oleh kelompok dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi ini diterima secara *taken for granted*. Wacana dalam pendekatan ini dipandang sebagai medium di mana kelompok yang dominan mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki sehingga tampak absah dan wajar. Seperti halnya dalam teks pidato Presiden Barack Obama, ideologi bahwa kaum Kristian boleh masuk masjid dan kaum Islam boleh masuk gereja secara perlahan akan diterima sebagai sesuatu yang wajar.

Demikian pula dominasi-dominasi yang lain seperti dominasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya secara perlahan akan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Masyarakat tidak pernah menganggap diri terbelakang ketika Amerika Serikat dengan gagah menguasai hampir seluruh sumber daya alam Indonesia.

Dari pemaparan dalam latar belakang maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola komunikasi politik yang dianut Presiden Barack Obama?
2. Apakah terdapat hegemoni dalam teks pidato Presiden Barack Obama?

3. Ideologi apa yang terdapat dalam teks pidato Presiden Barack Obama?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pola komunikasi politik yang dianut Presiden Barack Obama.
2. Berusaha mengungkap hegemoni dalam teks pidato Presiden Barack Obama
3. Mengetahui ideologi yang terdapat dalam teks pidato Presiden Barack Obama.

1.4. Signifikiansi penelitian

a. Signifikansi akademik

Secara akademis penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam penerapan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analisis) terutama dalam bidang kajian komunikasi politik.

b. Signifikansi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadikan bahan bacaan dan kajian serta memperkaya referensi bagi yang meminati Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analisis) terutama dalam mengungkap makna dibalik makna dalam teks.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik berkaitan dengan pembuatan, penyebarluasan, penerimaan, dan dampak-dampak informasi berkonteks politik baik melalui interaksi media massa, maupun interaksi antar manusia. Dalam komunikasi politik, komunikasi melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintah, dan kebijakan pemerintah. Pesan politik sangat efektif membentuk opini publik di mana opini publik ditegakkan atas pandangan umum rakyat tentang tujuan yang diinginkan dari pemerintah.

Komunikasi politik merupakan bidang dalam ilmu komunikasi yang berkenaan dengan politik di mana aktivitas komunikasi mempengaruhi kegiatan politik. Komunikasi politik diartikan sebagai setiap penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk mendapatkan pengaruh atas penyebaran atau penggunaan kekuasaan di dalam masyarakat yang di dalamnya mengandung empat bentuk komunikasi yaitu *Elite Communication*; *Hegemonic Communication*;

Petitionary Communication; dan Associational Communication.

Komunikasi itu sendiri pada dasarnya adalah suatu proses dinamis yang secara berkesinambungan mengubah pihak-pihak yang berkomunikasi. Suatu pemahaman populer mengenai komunikasi manusia adalah komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media. Komunikasi didefinisikan sebagai “*the process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify the behaviour of other individuals (communicatees)*”, Keith Brooks dalam Effedy (2005: 4).

Dengan kata lain komunikasi adalah proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai panduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauaan dan sebagainya, yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik secara langsung secara tatap muka maupun tak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan atau perilaku.

Devito (1997: 23), juga mendefinisikan komunikasi sebagai “*the act, by one or more persons, of sending and receiving messages distorted by noise, within a context, with some effect and opportunity for feedback. The communication act, then, would include the following components : context, source (s) receiver (s), messages, noise, sending or encoding processes receiving, decoding processes, feedback and effect.* They are elements seem the most essential in any considerations of the communication act.

They are what we might call the universal of communications:.....the elementss that are present in every communication act, regardless of wheter it *intrapersonal, interpersonal, small group, public speaking, mass communication or intercultural communication*". (kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih, yakni kegiatan menyampaikan dan menerima pesan, yang mendapat distorsi dari gangguan-gangguan, dalam suatu konteks, yang menimbulkan efek dan kesempatan untuk arus balik. Oleh karena itu, kegiatan komuniakasi meliputi komponen-komponen sebagai berikut: konteks, sumber, penerima, pesan, saluran, gangguan, proses penyampaian atau proses encoding, penerima atau proses dekoding, arus balik dna efek. Unsur-unsur itu agaknya paling esensial dala setip pertimbangan mengenai kegiatan komunikasi. Ini dapat kita namakan kesemestaan komunikasi,.....unsur-unsur yang terdapat pada setiap kegiatan komunikasi, apakan itu intra personal, kelompok kecil, pidato, komunikasi massa atau komunikasi antarbudaya.

Dalam proses komunikasi terdapat delapan unsur yang menjadi elemen penting yaitu, sumber (*source*) adalah orang yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau dengan kata lain orang mempunyai informasi bisa berupa pesan yang ingin dibagikan kepada orang lain. *Encoding* adalah suatu kegiatan internal seseorang untuk memilih dan merancang perilaku verbal dan nonverbalnya yang sesuai dengan aturan-aturan tata bahasa dan sintaksis guna menciptakan suatu pesan. Pesan (*message*) adalah suatu pesan yang terdiri dari lambang-lambang verbal dan nonverbal

yang mewakili perasaan dan pikiran sumber pada suatu saat dan tempat tertentu. Saluran (*channel*) adalah penghubung antar sumber dan penerima. Penerima (*receiver*) adalah orang yang menerima pesan. *Decoding* adalah proses internal penerima dan pemberi makna kepada perilaku sumber yang mewakili perasaan dan pikiran sumber. Respon penerima (*receive respons*) Umpan balik (*feedback*) atau dengan kata lain respon atas terpaan pesan yang diterima, Mulyana (2006: 14-15).

Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik dan pada waktu yang sama juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output sistem politik itu. Komunikasi Politik adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan demi mewujudkan tujuan pemikiran politik dan ideologi sebagaimana yang diharapkan.

Unsur-unsur komunikasi politik, sama halnya dengan unsur komunikasi pada umumnya juga terdiri dari komunikator, komunikan, message (pesan), media, tujuan, efek, dan sumber komunikasi. Unsur-unsur komunikasi politik ini berada dalam situasi politik atau struktur politik, dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Komunikasi politik diartikan sebagai penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan dalam arti yang luas. Menurut Gabriel Almond, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. "*All of the functions performed in the political*

system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication are performed by means of communication”.

Selanjutnya Almond mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu fungsi sistem yang mendasar (basic function of the system) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik. Seseorang tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan dalam pola-pola komunikasi, dan biasanya baik sebagai penyebab maupun akibat.

Terdapat empat distorsi bahasa dalam proses komunikasi politik (1) Distorsi bahasa sebagai topeng. Distorsi bahasa sebagai topeng merupakan praktek bahasa yang menempatkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau lain dari keadaan sebenarnya (2) Distorsi bahasa sebagai lupa. Dalam komunikasi politik, lupa dapat diciptakan dan direncanakan. Bukan hanya satu orang melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang. Dengan mengalihkan perhatian seseorang atau ratusan juta orang, kita dapat membuat mereka lupa dan lebih parah lagi lupa ini dapat diperpanjang selama dikehendaki oleh para manipulator lupa.(3) Distorsi bahasa sebagai representasi, terjadi jika kita menggambarkan sesuatu tidak sebagaimana mestinya ini menjadi sangat berbahaya jika yang digambarkan itu kebetulan berada pada posisi yang lemah dan (4). Distorsi bahasa sebagai ideologi, ideologi pada dasarnya sudah bersifat distorsif. Perspektif distorsi ideologi

menekankan bahwa hanya penguasalah yang berhak menentukan mana yang politik dan mana yang bukan.

Dalam komunikasi politik terdapat teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi politik, secara garis besar teori ini terbagi pada dua :

2.1.1 Teori Psikoanalitik

Teori Psikoanalitik mencakup dua variasi yakni personal dan interpersonal, bagaimana kepribadian mempengaruhi belajar dan perilaku politik. Aliran personal dari teori psikoanalitik adalah tradisi Sigmund Freud. Freud berpendapat bahwa orang bertindak atas dasar motif yang tak disadarinya maupun atas dasar pikiran, perasaan dan kecenderungan yang disadari dan sebagaimana disadari. Freud berpendapat tentang proses yang menjadi pokok berfungsinya kepribadian:

Pertama, id yaitu proses orang yang berusaha memaksakan keinginannya akan hal yang menyenangkan. Kedua, ego, alat yang digunakan untuk menilai sekitar orang itu, atau realitas. Ketiga, superego, yaitu gagasan orang diturunkan (biasanya melalui pengalaman dengan orang tuanya) tentang apa baik dan buruk itu. Proses id mencari kesenangan dan perasaan benar atau salah, direfleksikan didalam superego, sering berselisih. Ego menyelesaikan konflik ini melalui berbagai mekanisme pertahanan.

Mekanisme ini mencakup represi (memaksakan kepercayaan nilai, dan pengharapan yang mengancam keluar dari kesadaran), pengalihan (mengalihkan reaksi emosional dari satu objek ke objek yang lain), sublimasi (mencari cara

yang dapat diterima untuk mengungkapkan dorongan yang dengan cara lain tidak diterima), rasionalisasi (memberikan alasan yang meragukan untuk membenarkan perilaku atau untuk menghilangkan kekecewaan), regresi (kembali kepada perilaku yang tidak dewasa, pembentukan reaksi (beralih dari satu ekstrem kepada ekstrem yang berlawanan), introjeksi (memungut pendirian orang lain sebagai pendirian sendiri), atau identifikasi (meningkatkan rasa kuat, aman dan atau terjamin dengan mengambil sifat orang lain)

Teori psikoanalitik yang dibawa ke dalam dunia politik ini mengemukakan bahwa mekanisme pertahanan yang tidak disadari menghalangi belajar politik yang adaptif. Varian interpersonal dari teori psikoanalitik sebagian besar berasal dari karya Harry Stack Sullivan: "Kepribadian adalah pola yang relatif kekal dari situasi interpersonal yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia." Sullivan menerima pandangan bahwa manusia memiliki kebutuhan biologis sebagai pembawaan seperti kebutuhan akan makanan, air, kehangatan, selain itu manusia juga membutuhkan rasa aman.

2.1.2 Teori Tipe

Teori Tipe adalah mengklasifikasikan manusia ke dalam kategori-kategori didasarkan pada karakteristik yang dominan. Teori komunikasi politik ini dalam pandangannya bukan menunjukkan kecenderungan yang menentukan perilaku melainkan masa kanak-kanak berpengaruh besar terhadap permainan peran utama dalam memberi bentuk pada refleksi politik.

Teori tipe terbagi dalam beberapa golongan :

- 1) Golongan Inaktif adalah seseorang yang berpartisipasi dalam organisasi politik atau organisasi sosial di suatu tempat, mereka memiliki tipe asuhan orang tua yang sama. Orang tua mereka mengkhawatirkan kesehatan, konformitas, dan kepatuhan akan tuntutan orangtua.
- 2) Golongan konvensional terdiri dari anggota perkumpulan laki-laki dan perempuan. Orang yang relatif sedikit keterlibatannya dalam politik dan merupakan stereotip “Orang Biasa” yang konvensional, orang tua yang konvensional pada umumnya setia kepada nilai sosial tradisional seperti tanggung jawab, konformitas, prestasi, dan kepatuhan serta menuntut perilaku yang patut secara sosial dari anak-anak mereka. Orang tua dalam golongan ini menggunakan hukuman fisik dan psikologis dalam mendidik anak-anak mereka.
- 3) Golongan konstruktivis bekerja pada proyek pelayanan sosial, tetapi jarang menjadi peserta protes yang terorganisasi; orang tua mereka menekankan disiplin, prestasi, dan keandalan, pengungkapan diri yang terbatas, dan menggunakan hukuman nonfisik. Mereka lebih diakrabi anak-anak mereka ketimbang orang tua golongan konvensional.
- 4) Golongan aktivis mengajukan protes atas kekecewaan mereka terhadap ketimpangan masyarakat yang dipersepsi dan juga turut dalam proyek pelayanan masyarakat untuk memperbaiki ketimpangan itu, orang tua mendorong anak untuk independen dan bertanggungjawab, menggiring ekspresi diri berupa jenis

agresi fisik, dan kurang menekankan disiplin jika dibandingkan dengan kelompok yang konstruktivis dan mengengang hubungan dengan orang tua sebagai hubungan yang kaku.

- 5) Golongan pengingkar (disenter) adalah yang hanya terlibat dalam protes-protes terorganisasi. Orang tua golongan ini tidak konsisten dalam melaksanakan pendidikan anak. Mereka serba membolehkan (permisif) dalam bidang tertentu, dan sangat ketat (restriktif) dalam bidang lain, mereka kurang menekankan independensi dan kedewasaan yang dini dibandingkan dengan orang tua yang lain, namun menuntut prestasi melalui persaingan. Golongan pengingkar jauh lebih cenderung untuk memprotes sebagai bentuk pemberontakan terhadap orang tua daripada dalam golongan yang lain.

2.2. Teori Hegemoni

Istilah hegemoni berasal dari istilah Yunani, *hegeisthai* ("to lead"). Konsep hegemoni banyak digunakan oleh sosiolog untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa disini memiliki arti luas, tidak hanya terbatas pada penguasa negara (pemerintah). Hegemoni bisa didefinisikan sebagai: dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*).

Hegemoni merupakan kekuatan atau dominasi di mana suatu kelompok menguasai atau melawan kelompok lain. Hal ini dapat diartikan interpendensi asimetris dari hubungan politik, ekonomi, dan budaya di antara negara dan di antara kelas-kelas sosial dengan sebuah negara. Lebih lanjut hegemoni adalah dominasi dan subordinat dalam penyelenggaraan hubungan yang distrukturasikan oleh kekuatan.

Hegemoni pada awalnya merujuk pada dominasi (kepemimpinan) suatu negara kota Yunani terhadap negara-kota lain dan berkembang menjadi dominasi negara terhadap negara lain. Dari makna awal tersebut kemudian berkembang menjadi dominasi suatu kelas sosial terhadap kelas sosial lain dalam masyarakat melalui hegemoni budaya. Hegemoni juga merupakan suatu bentuk dominasi kekuasaan yang mengendalikan negara-negara bawahannya dengan *kekuasaan* (persepsi bahwa ia dapat memaksakan tujuan politiknya), dan bukannya dengan *kekuatan* (tindakan fisik langsung untuk memaksakan tujuan politiknya).

Teori hegemoni menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan kekerasan. Media dapat menjadi sarana di mana satu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lain. Proses bagaimana wacana mengenai gambaran masyarakat bawah bisa buruk di media, berlangsung dalam suatu proses yang kompleks. Hegemoni bekerja melalui konsensus ketimbang upaya penindasan satu kelompok terhadap kelompok lain.

Dalam pengertian tradisionalnya, hegemoni diartikan sebagai sistem kekuasaan atau dominasi politik. Istilah ini dalam tradisi Marxisme diperluas ke arah pengertian hubungan kekuasaan di antara kelas-kelas sosial, khususnya kelas yang berkuasa (*ruling class*). Dengan demikian, baik dalam Marxisme maupun tradisi sebelumnya, istilah hegemoni digunakan untuk menjelaskan fenomena kekuasaan politik (Piliang 2004:135). Meskipun demikian, Gramsci mengembangkan pengertian hegemoni secara lebih luas. Untuk melacak perkembangan konsep hegemoni Gramsci, berikut ini disajikan secara ringkas tinjauan Simon (2000) mengenai pokok-pokok pikiran Gramsci.

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Gramsci menggunakan *centaur* mitologi Yunani setengah binatang dan setengah manusia sebagai simbol dari ‘perspektif ganda’ suatu tindakan politik, yakni kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Dari sini Gramsci melihat, bahwa hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Dalam *Prison Notebooks* Gramsci menggunakan kata *direzione* (kepemimpinan, pengarahan) secara bergantian dengan *egemonia* (hegemoni) dan berlawanan dengan *dominazione* (dominasi).

Hegemoni menjadi sebuah konsep. Konsep Gramsci tentang hegemoni berkaitan erat dengan konsep Lenin. Bagi

Lenin, hegemoni merupakan strategi untuk revolusi, suatu strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan dari mayoritas. Gramsci menambahkan dimensi baru pada masalah ini dengan memperluas pengertiannya, sehingga hegemoni juga mencakup peran kelas kapitalis beserta anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh. Gramsci membedakan dominasi (kekerasan) dengan kepemimpinan moral dan intelektual.

Menurut Gramsci, suatu kelompok sosial dapat, bahkan harus, menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut); kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seandainya kekuasaan tetap berada di tangan kelompok, maka mereka harus tetap “memimpin.”

Jadi, Gramsci mengubah makna hegemoni dari strategi (sebagaimana menurut Lenin) menjadi sebuah konsep seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan Negara menjadi sarana untuk mengubahnya. Ia mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan negara ke dalam konsepnya tentang hegemoni. Bagi Gramsci, hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik, atau kelompok kelas hegemonik, adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain

dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui persetujuan politik dan ideologis. Konsep ideologis dibangun dengan memasukkan beberapa konsep lain yang berkaitan dengannya, yakni hubungan kekuatan ekonomi-korporatif/hegemonik, nasional kerakyatan, revolusi pasif, revolusi intelektual dan moral, pemikiran awam, masyarakat sipil, blok historis, dan watak kekuasaan.

Gramscy (1891-1937) merupakan tokoh yang terkenal dengan analisa hegemoninya. Analisa Gramscy merupakan usaha perbaikan terhadap konsep determinisme ekonomi dan dialektika sejarah Karl Marx. Dalam dialektika sejarah Marx, sistem kapitalisme akan menghasilkan kelas buruh dalam jumlah besar dan terjadi resesi ekonomi. Pada akhirnya, akan terjadi revolusi kaum buruh (proletar) yang akan melahirkan sistem sosialisme. Dengan kata lain, kapitalisme akan menghadirkan sosialisme. Namun hal itu, tidak terjadi.

Gramscy mengeluarkan argumen bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh ideologi, nilai, kesadaran diri, dan organisasi kaum buruh tenggelam oleh hegemoni kaum penguasa (borjuis). Karakteristiknya yaitu perjuangan panjang, mengutamakan perjuangan dalam sistem, dan perjuangan diarahkan kepada dominasi budaya dan ideologi.

Teori hegemoni Gramscy menekankan bahwa dalam lapangan sosial ada pertarungan untuk memperebutkan penerimaan publik. Karena pengalaman sosial kelompok subordinat (apakah oleh kelas, gender, ras, umur, dan sebagainya) berbeda dengan ideologi kelompok dominan. Oleh karena itu, perlu usaha bagi kelompok dominan untuk menyebarkan ideologi dan kebenarannya tersebut agar

diterima, tanpa perlawanan. Salah satu strategi kunci dalam hegemoni adalah *common sence*. Jika ide atau gagasan dari kelompok dominan atau berkuasa diterima sebagai *common sence*, maka kemudian ideologi itu diterima dan hegemoni telah terjadi.

Gramsci membangun suatu teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai tanpa tindakan kekerasan. Gramsci berpendapat bahwa kekuatan dan dominasi kapitalis tidak hanya melalui dimensi material dari sarana ekonomi dan relasi produksi, tetapi juga kekuatan (*force*) dan hegemoni. Jika faktor kekuatan menggunakan daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syarat-syarat suatu cara produksi atau nilai-nilai tertentu, maka hegemoni meliputi perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif” (secara sukarela) dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas penguasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral, dan politik.

Hegemoni menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para korbannya, sehingga upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Proses itu terjadi dan berlangsung melalui pengaruh budaya yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap, serta berperan dalam menafsirkan pengalaman tentang kenyataan. Melalui hegemoni, ideologi kelompok dominan dapat disebarkan, dan kepercayaan dapat ditularkan. Akan tetapi, berbeda dengan manipulasi atau

indoktrinasi, hegemoni justru terlihat wajar, orang menerima sebagai kewajaran dan sukarela. Ideologi hegemonik itu menyatu dan tersebar dalam praktik, kehidupan, persepsi, dan pandangan dunia sebagai sesuatu yang dilakukan dan dihayati secara sukarela.

Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah. Ada suatu nilai atau konsensus yang dianggap benar, sehingga ketika ada cara pandang atau wacana lain dianggap sebagai tidak benar. Salah satu strategi kunci dalam hegemoni adalah nalar awam (*common sense*). Jika ide atau gagasan dari kelompok dominan atau kelompok yang berkuasa diterima sebagai sesuatu yang *common sense* (jadi tidak didasarkan pada kelas sosial), kemudian ideologi itu diterima, maka hegemoni telah terjadi.

Konsep teori hegemoni menyatakan bahwa suatu kelas tertentu dan para anggotanya menjalankan kekuasaan atas kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni menurut Gramscy bukanlah suatu hubungan persetujuan dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Artinya, kelas bawah (*lower strata*) menerima dominasi dengan kesadaran palsu (*fals consciousness*). Masyarakat bawah menerima kesepakatan yang spontan terhadap dominasi kelas atas tersebut disebabkan oleh prestise dan posisi mereka, bukan sebagai sesuatu yang dikehendaki. Mereka menerima konsep tentang dunia bukan dari dirinya sendiri melainkan meminjam dari kelompok lain.

Teori hegemoni yang dicetuskan Gramsci adalah *sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.*

Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. Di sini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai. Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi (masyarakat dominan). Di sini terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa .

Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan adalah kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Masyarakat kelas dominan merekayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan. Sebagai contoh dalam situasi kenegaraan, upaya kelas dominan (pemerintah) untuk

merekayasa kesadaran kelas bawah (masyarakat) adalah dengan melibatkan para intelektual dalam birokrasi pemerintah serta intervensi melalui lembaga-lembaga pendidikan dan seni.

Konsep hegemoni merupakan supremasi satu kelompok atau lebih atas lainnya dan juga menunjuk pada relasi antara proletariat dan kelompok lainnya, selain itu karakteristik hegemoni sebagai “pengaruh kultural”, dan juga kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi. Teori hegemoni dibangun di atas pemahaman akan pentingnya ide dalam kontrol sosial politik. kekuasaan hegemoni lebih merupakan kekuasaan melalui “persetujuan” (*konsensus*), yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada.

Hegemoni lebih lanjut dapat dipahami sebagai suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi.

Hegemoni menghendaki ideologi yang mempertahankan asumsi budaya yang datang dari diri secara nyata. Dampak hegemoni menghasilkan persetujuan oleh rakyat pada pemerintahan yakni berupa prinsip-prinsip, aturan, dan hukum. Hubungan antara dan di antara mendifusikan informasi utama, mensosialisasikan agen-agen masyarakat serta interaksi, menjumlahkan penerimaan orientasi ideologi

sosial yang ciptakan dan mempertahankan diri adalah esensi dari hegemoni.

Mekanisme kelembagaan seperti sekolah, gereja, partai-partai politik, media massa, dan sebagainya merupakan 'tangan-tangan' kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Bahasa, misalnya, menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemonik. Konflik sosial yang ada dibatasi baik intensitasnya maupun ruang lingkupnya, karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan-harapan menurut system yang telah ditentukan. (Dalam arena sosial semacam itu, tidak peluang dan ruang publik bagi agen atau aktor-aktor dalam masyarakat untuk berbuat lain di luar kerangka ideologi kelompok hegemonik. Individu akan dapat keluar dari keadaan yang membatasi dirinya dengan cara melakukan *counter* hegemoni.)

Dalam kondisi demikian, hegemoni dapat dicapai melalui kombinasi antara paksaan dan kerelaan. Wilayah ideologi menjadi sentral, karena ia tak dapat dipisahkan dengan pembentukan gagasan. Di sinilah pentingnya peran kelompok intelektual, sebab hegemoni mengandung makna kepemimpinan intelektual dan moral. Kelompok intelektual organis sebagai tandingan kelompok intelektual tradisional, sebagaimana telah dipilah oleh Gramsci dapat memainkan peran menumbuhkembangkan semangat perjuangan kelas (rakyat), sebab hakikatnya kelompok intelektual organis terbentuk secara organis dan mereka merupakan bagian institutif perjuangan kelas dan memberikan pemihakan pada kelas tertindas. Intelektual organis pada gilirannya mampu

berkiprah sebagai motor penggerak dalam sosialisasi ideologi massa rakyat.

Teori hegemoni perlu dipahami secara lebih cermat dengan pertimbangan bahwa dalam rangka globalisasi, maka politik, ekonomi, dan budaya dominan yang selama ini dikuasai oleh negara-negara besar bertarung untuk memperoleh simpati sekaligus keuntungan dari negara-negara berkembang. Sebagai bangsa yang baru berkembang yang terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama, hendaknya kita selalu waspada terhadap berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh ekonomi dominan. Melalui teori hegemoni, Gramsci telah menyediakan semacam rambu-rambu yang diharapkan mampu mencegah berbagai 'kecelakaan' yang disebabkan olehnya.

Hegemoni bukan semata-mata dalam bentuk fisik, melainkan juga wacana, dengan kekuatan sebagaimana dimiliki secara fisik. Menurut visi kontemporer hegemoni wacana justru dianggap dominan karena keseluruhan bentuk fisik dapat diubah ke dalam wacana, sebagai bentuk yang 'diceritakan'. Hegemoni Barat pascakolonial, sebagaimana diperkenalkan dalam teori postkolonial, misalnya, tidak dilakukan dalam bentuk fisik, melainkan melalui kekuatan wacana, seperti Barat dan non-Barat, Barat dan peribumi, negara maju dan negara berkembang, negara industri dan negara agraris, dan sebagainya. Demikianlah superioritas Barat menjadi pengetahuan bagi bangsa Timur yang sekaligus menimbulkan inferioritas. Hegemoni melalui wacana jauh lebih ampuh sebab ia dapat dikemudikan melalui jarak jauh, tanpa mengadakan intervensi secara langsung. Hegemoni

wacana inilah yang didekonstruksi oleh teori-teori posmodernisme, sehingga kelompok-kelompok minoritas dapat diangkat.

Hegemoni bekerja melalui konsensus ketimbang upaya penindasan satu kelompok terhadap kelompok lain. Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah. Ketahanan hegemoni tidak pernah hancur. Hegemoni terkalahkan ketika dominasi ideologi melemah dibandingkan dengan ketahanan sosial.

Hegemoni bekerja melalui dua saluran yaitu melalui ideologi dan budaya di mana nilai-nilai bekerja. Melalui hegemoni, ideologi kelompok dominan dapat disebar, nilai dan kepercayaan dapat ditularkan. Dalam hegemoni, kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik, dan budaya dari kelompok dominan. Hegemoni diterima sebagai sesuatu yang wajar, sehingga ideologi kelompok dominan dapat menyebar dan dipraktikkan. Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh pihak dominan sedemikian sehingga pihak yang didominasi tetap diam dan taat terhadap kepemimpinan kelompok penguasa. Hegemoni bisa dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan, jika dilihat sebagai strategi, maka konsep hegemoni bukanlah strategi eksklusif milik penguasa. Maksudnya, kelompok manapun bisa menerapkan konsep hegemoni dan menjadi penguasa.

2.3. Teori Ideologi

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata *ideology* sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “*sains tentang ide*”. Ideologi adalah suatu gagasan teratur tentang nilai-nilai yang saling melengkapi, orientasi dan perspektif ide yang diekspresikan melalui media, teknologi, dan komunikasi interpersonal. Beberapa ideologi bersifat sangat kompleks tetapi sebagian ada juga yang terintegrasi dengan baik, ada yang bersifat Kompasrer tetapi ada juga yang bertahan untuk jangka panjang. Ada yang resistensinya tinggi dan ada juga yang sukses di masyarakat.

Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.

Dalam memahami teori ideologi terdapat tiga pandangan yang dikemukakan oleh Martin Seliger, Alvin Gouldner, dan Althusser. Seliger memandang ideologi sebagai sistem kepercayaan. Seliger mengembangkan pendekatan yang menjadi dasar pikiran atas perbedaan antara dua konsepsi ideologi, konsepsi terbatas yang membatasi term ideologi

pada sistem kepercayaan politik tertentu, dan di sisi lain terdapat konsepsi inklusif yang menerapkan term tersebut pada seluruh sistem kepercayaan politik, serta tidak respek terhadap kepercayaan yang mengarahkan tindakan diorientasikan pada upaya pemeliharaan, pengrusakan atau membangun kembali tatanan sosial. Tujuan Seliger adalah mempertahankan konsepsi inklusif ideologi dan menunjukkan bagaimana konsepsi ini dapat dihubungkan dengan proses perdebatan politik.

Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu, sebagai akal sehat, dan beberapa kecenderungan filosofis, atau sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat yang dominan kepada seluruh anggota masyarakat. Seliger dalam Thomson, 2003: 132 mengemukakan ideologi sebagai kumpulan kepercayaan dan ketidakpercayaan (penolakan) yang diekspresikan dalam kalimat-kalimat yang bernilai, kalimat-kalimat permohonan dan pernyataan eksplanatoris...(1a) dibuat untuk memberikan basis permanen yang relatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk membenarkan kepercayaan pada norma moral dan sedikit bukti faktual serta rasionalisasi berbasis kesadaran diri yang bertalian dengan legitimasi implementasi dan preskripsi teknis yang dimaksudkan untuk menjamin tindakan yang ditampilkan demi perlindungan, reformasi, destruksi atau rekonstruksi dari tatanan yang ada.

Ideologi, berdasarkan pandangan Seliger adalah orientasi tindakan (*action-oriented*) yang berisi kepercayaan yang diorganisir dalam satu sistem yang koheren. Implementasi

aktual ideologi memiliki pengaruh pada struktur formal sistem kepercayaan. Lebih lanjut Seliger membedakan ideologi menjadi dua yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Ideologi fundamental menekankan dan meyakini tujuan akhir dan pandangan besar yang akan dicapai dan preskripsi moral menjadi sentralnya sementara ideologi operatif adalah prinsip-prinsip yang secara aktual mendasari kebijakan yang dimaksudkan sebagai pembenaran.

Ideologi merupakan serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat yang dominan kepada seluruh anggota masyarakat. Ideologi dalam hal ini adalah ungkapan yang sangat tepat untuk mendeskripsikan nilai-nilai dan publik agenda suatu bangsa, kelompok agama, gerakan politik, serikat pekerja, dan lain sebagainya. Namun, terminologi ini lebih sering merujuk pada relasi antara informasi dan kekuatan sosial dalam skala besar dalam konteks politik ekonomi. Dalam pengertian ini cara berpikir khusus yang diadvokasikan melalui berbagai saluran oleh mereka yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi dalam masyarakat.

Selain Seliger, Alvin Gouldner mengungkapkan konsepsi lain tentang ideologi. Gouldner memandang ideologi sebagai proyeksi rasional, dengan mengelaborasi konsep ideologi yang penuh dengan perspektif historis. Jika Seliger menguji sejarah ideologi untuk menemukan asal usul konsepsi yang tidak begitu saja dapat dibenarkan, maka Gouldner kembali kepada sejarah untuk menemukan sebuah kejelasan konsep ideologi. Implikasi mendasar dalam ideologi lebih lanjut menurut Gouldner adalah ideologi tidak dapat diperlakukan sebagai “sesuatu di luar sana” untuk dicermati

dan diteliti secara empiris, karena itu perlu kembali pada problem memahami diri (*self-understanding*) dan sedikit melakukan refleksi tentang teori sosial.

Berbeda dengan Seliger dan Gouldner, Alhtusser memandang ideologi sebagai ciri yang dibutuhkan oleh masyarakat, sejauh masyarakat tersebut mampu memberikan makna untuk membentuk anggotanya dan merubah kondisi eksistensinya. Masyarakat manusia menyembunyikan ideologi sebahai elemen dan atmosfer yang sangat diperlukan bagi nafas kehidupan mereka. Biasanya ideologi dipahami sebagai bentuk kesadaran atau sebuah bidang ide. Dalam pandangan Alhtusser perkembangan relasi produksi secara esensial dilindungi oleh pengujian *kekuasaan negara* melalui para aparatusnya atau lembaga yang mendukung negara.

Produksi dan penyebaran ideologi diminan secara umum dianggap sebagai salah satu tugas dan pencapaian negara, atau tugas dari agen tertentu dan pejabat resmi negara. Dua bentuk apparatus negara dibedakan Alhtusser, aparatus negara yang represif yang terdiri dari pemerintah, layanan sipil, tentara, polisi, pengadilan, penjara dan sebagainya dan aparatus negara ideologis yang meliputi gereja, sekolah, keluarga, sistem yang legal, sistem hokum, partai politik, persatuan dagang, sistem komunikasi massa, dan aktivitas budaya seperti olahraga dan seni. Fungsi aparatur negara represif utamanya melalui kekerasan sedangkan fungsi aparatus negara ideologis utamanya adalah “ideologi”.

Alhtusser berpendapat bahwa bentuk lembaga dan aktivitas yang berbeda yang telah membentuk aparat negara ideologis disatukan oleh kenyataan bahwa ideologi terdapat di

tengah-tengah mereka merupakan ideologi dari kelompok dominan, yaitu bahwa secara esensial semuanya sebagai mekanisme penyebaran ideologi dominan. Elemen ideologi yang lain dapat dihadirkan bersama aparat tersebut, tapi bidang ideologi terstruktur berdasarkan keinginan ideologi kelas dominan yang selalu memberikan kontrol terhadap aparat negara ideologis. Karena itu, berdasarkan pemahaman tersebut, macam-macam institusi negara dianggap sebagai sarana untuk memproduksi dan menyebarkan ideologi dominan, untuk melestarikan perkembangan relasi produksi serta untuk menjaga individu yang bertindak sebagai subjek yang patuh pada tatanan yang ada.

Lebih lanjut Althusser menekankan secara umum fungsi ideologi sebagai interpelasi individu terhadap subjek (dan terutama terhadap wacana yang dimiliki) yang disadari melalui kompleksitas formasi ideologi (dan terutama melalui *interdiscourse* yang berbelit-belit) dan memberikan masing-masing subjek “realitasnya” sendiri, yaitu sistem kebenaran yang dibuktikan sendiri dan pemaknaan yang diajukan-diterima-dipahami.

Manipulasi informasi publik yang terus menerus ini secara potensial dapat membangun ideologi dominan yang membantu melanggengkan kepentingan pencipta ideologi secara materil dan kultural. Ideologi tidak hanya sekedar otoritas ekonomi, pembagian kelas sosial di masyarakat kapitalis mengatakan bahwa ideologi hanya bisa dimengerti sebagai ideologi dominan di mana bentuk simbolisnya digunakan oleh pihak penguasa untuk membentuk dan melanggengkan hubungan yang sifatnya mendominasi

tersebut. Para elit penguasa (sosio-ekonomi) secara terus-menerus memenuhi masyarakat dengan agenda ideologi mereka karena mereka juga sebagai pengontrol institusi komunikasi yang menguasai simbol-simbol ideologi.

Ideologi adalah kapitalis, dalam konsepsi Marx, ideologi adalah sebetulnya kesadaran palsu. Raymond William mengklasifikasikan penggunaan ideologi dalam tiga ranah. Pertama, sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu. Kedua sebuah sistem kepercayaan yang dibuat –ide palsu atau kesadaran palsu – yang bisa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah. Dan yang ketiga, proses umum produksi makna dan ide. Ideologi di sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan produksi makna (Eriyanto, 2006: 87).

Teori Ideologi menekankan bahwa semua teks dan semua makna mempunyai dimensi sosial politik dan tidak dapat dimengerti kalau tidak menyertakan dimensi konteks sosialnya. Kerja ideologi sebagaimana dinyatakan oleh John Fiske, selalu mendukung *status quo* di mana kelompok yang mempunyai kekuasaan lebih besar menyebarkan gagasan mereka. Bagi Fiske, semua teori ideologi sepakat bahwa, ideologi bekerja untuk dominasi kelas, perbedaannya hanya pada cara bagaimana dominasi itu bekerja, dan tingkat efektivitasnya.

Secara umum cara kerja ideologi dapat dibedakan menjadi lima model yaitu melalui legitimasi, penipuan, unifikasi, fragmentasi, dan reifikasi. Pada cara kerja ideologi yang pertama *legitimasi* relasi dominasi dapat dibangun dan dilestarikan, seperti yang diungkapkan Max Weber

(Thompson, 2004 : 97), melalui legitimasi yaitu melalui kepatutan dan kelayakan dukungan. Relasi dominasi memiliki legitimasi apabila mengandung klaim legitimasi yang didasarkan pada latar belakang tertentu, diungkapkan dengan menggunakan simbol tertentu dan dalam kondisi tertentu bersifat lebih atau kurang efektif. Weber menggunakan tiga bentuk latar belakang (landasan) yang menjadi dasar dimunculkannya klaim legitimasi : landasan rasional (menggunakan legalitas aturan yang telah dirancang sebelumnya), landasan tradisional (menggunakan kesucian tradisi yang sudah berumur lama) dan landasan kharismatik (menggunakan karakter individu tertentu yang memiliki otoritas).

Klaim yang didasarkan pada landasan-landasan itu dapat diungkapkan melalui bentuk symbol dengan menggunakan salah satu bentuk strategi konstruksi simbol. Salah satunya dengan yang disebut dengan rasionalisasi, di sini sang pembuat bentuk simbol mengkonstruksi serangkaian pemikiran yang berusaha mempertahankan dan menjustifikasi seperangkat relasi atau institusi sosial, dengan demikian membujuk audiens agar dapat memberikan dukungan yang sepatutnya. Bentuk strategi lain adalah universalisasi. Dalam strategi ini, institusi yang dibangun untuk kepentingan kelompok tertentu dikatakan sebagai melayani kepentingan semua (umum), dan bentuk institusi semacam itu lalu dianggap terbuka bagi siapapun yang memiliki kemampuan dan kecenderungan di dalamnya. Klaim legitimasi juga dapat diekspresikan melalui strategi narativisasi, klaim yang dimasukkan dalam cerita-cerita yang mengisahkan masa lalu

dan menganggap hari ini merupakan bagian dari tradisi yang harus dihargai terus menerus yang pada gilirannya tradisi itu terkadang *dibuat-buat* yang dimaksudkan untuk menciptakan rasa memiliki terhadap komunitas dan sejarah serta melupakan pengalaman konflik, perbedaan, dan perpecahan.

Cerita atau narasi dalam klaim legitimasi *narativisasi* dikisahkan baik melalui sejarah resmi atau melalui individu berdasarkan pengalaman kesehariannya, yang diarahkan untuk memberikan justifikasi terhadap penerapan kekuasaan yang dimilikinya serta untuk memperkenalkan pihak lain fakta yang belum pernah dialaminya. Pidato dan dokumen, sejarah, novel, dan film semuanya dikonstruksi sebagai narasi yang mencerminkan relasi sosial dan membeberkan konsekuensi-konsekuensi tindakan, artinya bahwa semuanya dapat dimaksudkan untuk membangun dan mempertahankan relasi kuasa.

Cara kerja ideologi yang kedua adalah penipuan (*dissimulation*). Relasi dominasi dapat dibangun dan dipelihara dengan cara disembunyikan, diingkari atau dikaburkan, atau dihadirkan dengan cara mengalihkan perhatian dari atau memberikan penjelasan terhadap relasi atau proses yang sedang berlangsung. Ideologi yang berfungsi sebagai praktek penipuan diekspresikan melalui bentuk simbol dengan menggunakan variasi strategi yang berbeda. Salah satu strategi tersebut adalah *displacement* (penggantian) sebuah istilah yang biasanya digunakan untuk mengacu pada satu objek atau individu namun kemudian dialihkan dan mengacu pada individu yang lain, dan dengan demikian

konotasi positif atau negatif yang dikandung istilah tersebut dialihkan pada objek atau individu yang lain.

Ideologi yang berfungsi sebagai penipuan dapat diekspresikan melalui strategi kiasan yaitu penggunaan lambang bahasa atau simbol. Di antara bentuk kiasan yang paling umum digunakan adalah bentuk sinekdok, metonimi dan metafor, semuanya dapat digunakan untuk menyembunyikan relasi dominasi. Sinekdok meliputi peleburan sebagian atau keseluruhan semantik di mana seseorang menggunakan sebuah istilah dimaksudkan untuk mengacu pada bagian tertentu selain keseluruhannya, atau mengacu kepada keseluruhan selain daripada sebagiannya. Teknik seperti ini dapat menyembunyikan relasi sosial dengan cara mengaburkan dan membalikkan relasi antara kolektivitas dengan bagiannya, antara kelompok yang lebih kecil dengan bentuk sosial dan politik yang lebih besar, misalnya dengan menggunakan istilah umum seperti the “British”, the American, dan the Russian, yang biasanya digunakan untuk mengacu pada pemerintah atau kelompok tertentu dalam sebuah negara-bangsa.

Metonimi meliputi penggunaan istilah yang dimaksudkan sebagai pemberian atribusi kata tambahan atau ciri yang berhubungan dengan benda yang maknanya dimaksudkan untuk mengacu pada benda itu sendiri, sekalipun pada dasarnya tidak perlu menghubungkan antar istilah yang akan menjadi acuan tersebut. Melalui penggunaan metonimi, makna yang diacu dapat bersifat implisit sekalipun tidak dinyatakan secara eksplisit, dan secara positif maupun

negatif dinilai berdasarkan keterkaitannya dengan sesuatu yang lain.

Metafor merupakan aplikasi sebuah istilah atau frase terhadap sebuah objek atau tindakan yang secara literal tidak diterapkan. Ekspresi metaforis memunculkan ketegangan kalimat sebagai akibat dari pengkombinasian istilah-istilah yang diambil dari bidang semantik yang berbeda. Metafor dapat menyembunyikan relasi sosial dengan cara memberikan -atau individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya- karakter yang secara literal tidak dimiliki, dengan demikian berarti menekankan ciri tertentu dalam memahami yang lain dan merubahnya menjadi pemahaman yang positif atau negatif. Penggunaan jenis kiasan bahasa selalu bersifat ideologis. Penggunaan kiasan merupakan ciri umum yang biasa didapatkan dalam wacana sehari-hari yaitu merupakan cara yang efektif untuk memobilisasi makna dalam dunia sosial-historis, dan dalam konteks tertentu makna yang dimobilisir tersebut dapat disusupkan ke dalam kekuasaan yang dimaksudkan untuk menciptakan, mempertahankan, dan mengembangkan relasi dominasi.

Cara kerja ideologi yang ketiga adalah *unifikasi*. Relasi dominasi dapat dibangun dan dilestarikan dengan cara mengkonstruksi, pada tatanan simbol, bentuk penyatuan yang membawahi individu-individu dalam identitas kolektif serta tidak mentolelir perbedaan dan perpecahan yang dapat memisahkan mereka. Strategi yang dipilih untuk mengekspresikan model ini dalam bentuk simbol disebut strategi *standarisasi*. Bentuk simbol disesuaikan dengan kerangka dasar yang menjadi basis bagi perubahan simbol

yang ditawarkan dan dapat diterima. Strategi ini diikuti misalnya, oleh otoritas negara yang ingin mengembangkan bahasa nasionalnya dalam konteks kelompok masyarakat yang berbeda secara bahasa. Pemaparan bahasa nasional dimaksudkan untuk menciptakan identitas kolektif antar kelompok, hierarki yang legitimate di antara bahasa yang ada dan mampu berdialektik dengan batas-batas negara-bangsa.

Strategi konstruksi simbol yang lain yang memungkinkan dicapainya proses *unifikasi* adalah *simbolisasi dari kesatuan*. Strategi ini meliputi konstruksi simbol dari kesatuan, identitas kolektif dan identifikasi yang menggabungkan sebuah kelompok atau pluralitas kelompok misalnya melalui lagu kebangsaan dan juga bendera. Dalam prakteknya, simbolisasi kesatuan selalu terintegrasi dengan proses narativisasi, sebagai simbol kesatuan yang menjadi bagian integral dari sebuah narasi awal yang menceritakan sejarah bersama dan menggambarkan nasib kolektif. Hal ini umum dan tidak terjadi dalam skala organisasi yang luas semacam negara modern, tapi juga dalam organisasi dan kelompok sosial yang lebih kecil yang dikendalikan secara bersama melalui proses kesatuan simbol dan melalui penciptaan identitas kolektif yang secara terus menerus dikokohkan. Dengan mengikat individu secara bersama serta menolak perbedaan dan pertentangan, simbolisasi kesatuan dapat diarahkan untuk membangun dan melestarikan relasi dominasi.

Model cara kerja dominasi yang keempat adalah *fragmentasi*. Relasi dominasi ditegakkan tidak dengan menyatukan individu dalam kolektivitas, tapi dengan

mengkotak-kotakkan individu dan kelompok tersebut yang mungkin memiliki kemampuan untuk melawan kelompok dominan, atau dengan mengorientasikan kekuatan kelompok yang berlawanan untuk menghadapi sasaran yang dinyatakan sebagai jahat, membahayakan, dan mengancam. Bentuk strategi simbol selanjutnya adalah *diferensiasi* yaitu menekankan ketidaksamaan, perbedaan dan pertentangan di antara individu dan kelompok, karakteristik yang memisahkan dan mencegah mereka untuk membentuk upaya yang efektif dalam membangun relasi yang ada atau dalam berpartisipasi aktif dengan menjalankan kekuasaan.

Cara Kerja dominasi yang kelima adalah *reifikasi* (*reification*), di sini relasi dominasi dapat dibangun dan dipelihara dengan menunjukkan kesementaraan hubungan kesejarahan yang selama ini dianggap permanen, natural, dan abadi. Proses tersebut digambarkan sebagai benda atau peristiwa dari jenis kebiasaan tertentu, dengan demikian ia kehilangan karakter sosial dan historisnya. Ideologi yang berfungsi sebagai reifikasi dengan demikian mencakup eliminasi atau pengaburan karakter fenomena sosial-historis. Model ini dapat diekspresikan melalui bentuk simbol dengan menggunakan strategi *naturalisasi*. Hubungan yang di dalamnya, kreasi sosial dan historis diperlakukan sebagai peristiwa yang lazim atau sebagai hasil pasti dari sesuatu yang bersifat alamiah, artinya bahwa pembagian kerja yang terbentuk secara sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dipandang sebagai hasil karakteristik fisiologi dan perbedaan jenis kelamin.

Strategi yang sama yang disebut dengan *eternalisasi*, yaitu fenomena sosial-historis dihilangkan karakter historisnya dengan cara selalu digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat permanen, tidak berubah dan berulang. Kebiasaan, tradisi, dan institusi yang tampaknya tanpa batas menjangkau masa lalu sehingga dengan demikian jejak asal usulnya mulai hilang dan beberapa pertanyaan tujuan akhirnya tidak dapat dijelaskan, mendapatkan kekakuan yang tidak dapat dengan mudah dilunakkan. Semuanya hadir dalam kehidupan sosial dan penampakan karakter ahistorisnya ditegaskan kembali melalui bentuk simbol yang dalam konstruksi dan pengulangannya mengabadikan kontigensinya.

Ideologi yang berfungsi sebagai reifikasi dapat juga diekspresikan melalui variasi gramatikal dan sintaktik, seperti *nominalisasi* dan *pasivisasi*. Nominalisasi terjadi ketika kalimat atau bagian dari kalimat, deskripsi tindakan dan seluruh partisipan yang ada di dalamnya berubah menjadi kata benda. Nominalisasi dan pasivisasi memfokuskan perhatian pendengar dan pembacanya pada pokok masalah tertentu ketika memahami suatu persoalan. Keduanya menghilangkan aktor dan agensi serta cenderung menghadirkan proses sebagai sesuatu atau peristiwa yang mengambil tempat pada tiadanya sang subjek yang menghasilkan keduanya. Dua bentuk tersebut juga cenderung menghilangkan makna acuannya pada konteks ruang dan waktu dengan cara menghilangkan susunan kata kerja atau merubahnya dengan bentuk sedang (*continuous tense*).

Variasi gramatikal dan sintaktik dalam kondisi tertentu cenderung membangun dan mempertahankan relasi dominasi

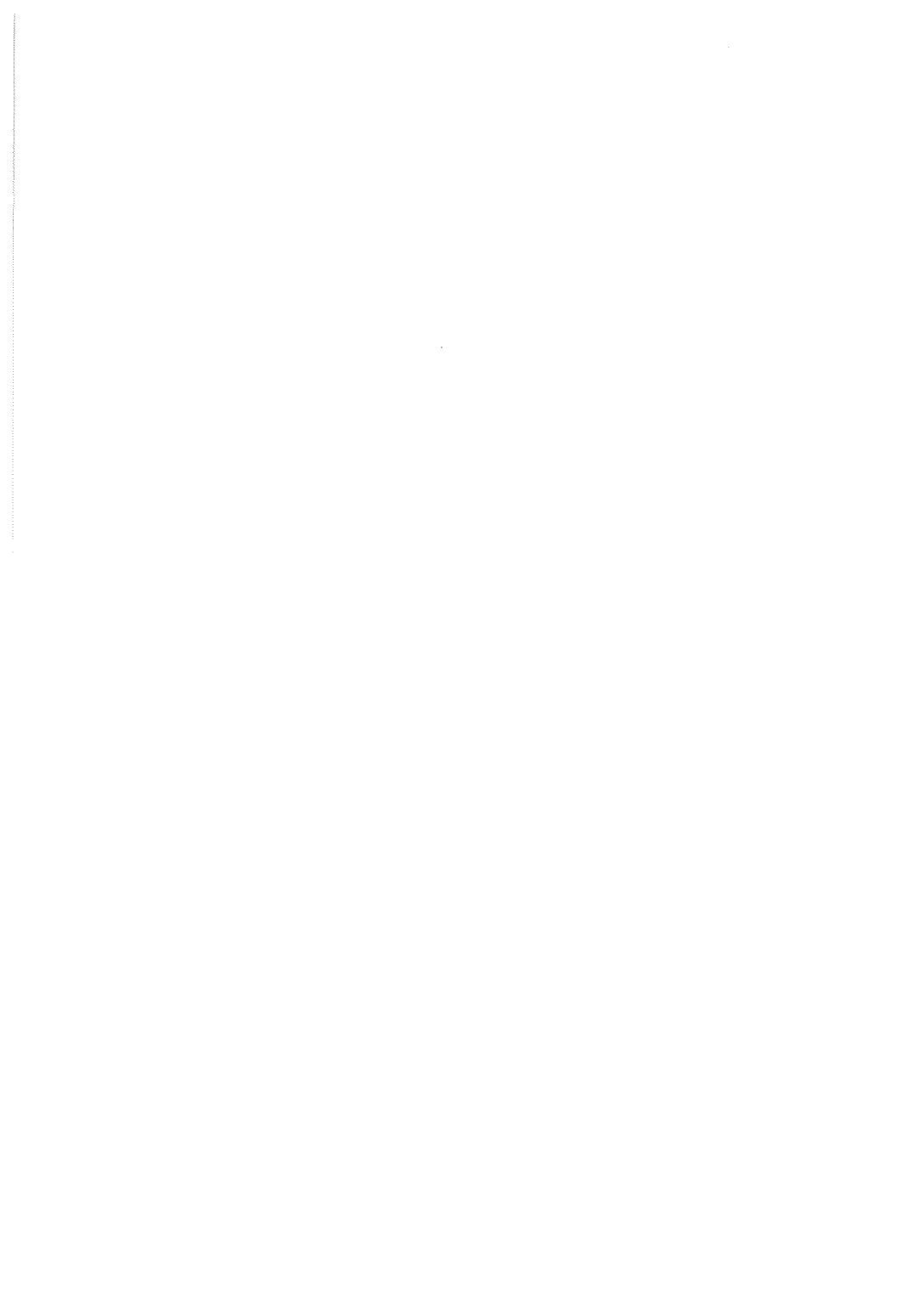
melalui konkritisasi fenomena sosial-historis. Dengan menghadirkan proses sebagai benda, menghilangkan aktor dan agensi dan menjadikannya waktu sebagai kelanjutan terus-menerus dari peristiwa yang terjadi saat ini maka akan menghasilkan banyak cara untuk membangun kembali dimensi masyarakat “tanpa sejarah” padainti masyarakat historis.

Teori ideologi menekankan bahwa semua teks dan semua makna mempunyai dimensi sosial politik dan tidak dapat dimengerti kalau tidak menyertakan dimensi konteks sosialnya. Kerja ideologi selalu mendukung *status quo*, melalui mana kelompok yang mempunyai kekuasaan lebih besar menyebarkan gagasan dan pesannya. Sistem ekonomi diorganisir sesuai dengan kepentingan mereka, dan sistem ideologi diambil dari kerja itu untuk menyebarkan gagasan mereka. Ideologi bekerja untuk dominasi kelas, perbedaannya hanya pada cara bagaimana dominasi itu bekerja, dan tingkat efektivitasnya.

Teori-teori klasik tentang ideologi diantaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi ini diterima secara *taken for granted*. Wacana dalam pendekatan ini dipandang sebagai medium di mana kelompok yang dominan mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki sehingga tampak absah dan wajar.

Ideologi dapat dipahami secara fungsional dan struktural. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. ideologi secara fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Ideologi yang doktriner bilamana ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Sebagai contohnya adalah komunisme. Sedangkan ideologi yang pragmatis, apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, namun dirumuskan secara umum hanya prinsip-prinsipnya, dan ideologi itu disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama dan sistem politik.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain dan metode untuk menyebarkannya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.I. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan pola pikir (cara pandang, aliran, mazhab) mengenai keseluruhan proses, format dan hasil penelitian. Ragam paradigma meliputi paradigma klasikal (positivis dan postpositivis), konstruktivis, kritisal, dan partisipatoris. Paradigma adalah suatu *mental window* atau *world view* dalam suatu penelitian (Hidayat, 2006: 6). Paradigma mengacu pada set proposisi (pernyataan) yang menerangkan bagaimana dunia dan kehidupan dipersepsikan. Paradigma mengandung pandangan tentang dunia, cara pandang untuk menyederhanakan kompleksitas dunia nyata, dan karenanya dalam konteks pelaksanaan penelitian, memberi gambaran mengenai apa yang penting, apa yang dianggap mungkin dan sah untuk dilakukan, apa yang mungkin diterima akal sehat (Paton, 1990).

Paradigma diartikan oleh Bogdan dan Biklen dalam Lexy Maleong (2000: 30) sebagai kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama yang berisikan konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dalam penelitian. Denzin & Lincoln (1994:105) mendefinisikan paradigma sebagai: “*Basic belief system or worldview that guides the investigator, not only in choices of method but in ontologically and epistemologically fundamental ways.*” Pengertian tersebut mengandung makna paradigma adalah *sistem keyakinan dasar* atau cara memandang dunia yang membimbing peneliti tidak hanya dalam memilih metoda tetapi juga cara-cara fundamental yang bersifat ontologis dan epistemologis. Secara singkat, Denzin & Lincoln (1994:107) mendefinisikan “*Paradigm as Basic Belief Systems Based on Ontological, Epistemological, and Methodological Assumptions*”. Paradigma merupakan *sistem keyakinan dasar* berdasarkan asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologi. Denzin & Lincoln (1994:107) menyatakan: “*A paradigm may be viewed as a set of basic beliefs (or metaphysics) that deals with ultimates or first principle.*” Suatu paradigma dapat dipandang sebagai seperangkat kepercayaan dasar (atau yang berada di balik fisik yaitu metafisik) yang bersifat pokok atau prinsip utama. Sedangkan Guba (1990:18) menyatakan suatu paradigma dapat dicirikan oleh respon terhadap tiga pertanyaan mendasar yaitu pertanyaan ontologi, epistemologi, dan metodologi. Selanjutnya dijelaskan:

- a. *Ontological: What is the nature of the “knowable?” or what is the nature of reality?* Ontologi: Apakah hakikat dari sesuatu yang dapat diketahui? Atau apakah hakikat

dari realitas? Secara lebih sederhana, ontologi dapat dikatakan mempertanyakan tentang hakikat suatu realitas, atau lebih konkret lagi, ontologi mempertanyakan hakikat suatu fenomena.

b. *Epistemological: What is the nature of the relationship between the knower (the inquirer) and the known (or knowable)?* Epistemologi: Apakah hakikat hubungan antara yang ingin mengetahui (peneliti) dengan apa yang dapat diketahui? Secara lebih sederhana dapat dikatakan epistemologi mempertanyakan mengapa peneliti ingin mengetahui realitas, atau lebih konkret lagi epistemologi mempertanyakan mengapa suatu fenomena terjadi atau dapat terjadi?

c. *Methodological: How should the inquirer go about finding out knowledge?* Metodologi: Bagaimana cara peneliti menemukan pengetahuan? Secara lebih sederhana dapat dikatakan metodologi mempertanyakan bagaimana cara peneliti menemukan pengetahuan, atau lebih konkret lagi metodologi mempertanyakan cara atau metoda apa yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan pengetahuan?

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Paradigma Kritis berusaha membongkar kesadaran palsu serta merupakan pemberdayaan dan mengungkap apa yang ada di balik realita. Menurut Stuart Hall paradigma kritikal bukan hanya mengubah pandangan mengenai realitas yang dipandang alamiah oleh kaum pluralis, tetapi juga berargumen bahwa media adalah kunci utama pertarungan kekuasaan.

Paradigma Kritis melihat objek atau realitas yang diamati merupakan penampakan realitas semu (*virtual reality*) atau sekedar ekspresi kesadaran palsu (*fals consciousness*) yang dimiliki manusia, bukan merupakan suatu realitas objektif, atau realitas yang sesuai dengan esensi sebenarnya. Tujuan paradigam kritis antara lain untuk memperoleh temuan yang memiliki signifikansi sosial.

Dalam paradigma kritis yang disebut data adalah realitas yang ada di balik kenyataan yang tampak. Paradigma ini berbicara sesuatu di balik tabir terutama menyangkut masalah-masalah ideologi, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi-politik dari sebuah masalah yang diteliti.

Selain itu paradigma kritis memandang ilmu sosial sebagai proses secara kritis berusaha mengungkap *the real structure* dibalik ilusi, kesadaran palsu yang ditampakkan oleh dunia materi, serta bertujuan untuk membentuk kesadaran sosial di mana realitas yang teramati merupakan realitas semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah, kekuatan sosial budaya, ekonomi, dan politik.

Analisis wacana masuk dalam kategori paradigma kritis. Analisis wacana merupakan penerapan praktis dari epistemologi. Pertanyaan yang diajukan bukanlah mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, melainkan justru mengenai bagaimana orang memandang apa yang terjadi. Studi tentang makna, khususnya analisis wacana termasuk dalam ruang lingkup teori interpretasi. Interpretasi adalah suatu tindakan kreatif dalam mengungkap kemungkinan-kemungkinan makna.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu interpretasi teks dimana interpretasi adalah upaya peneliti untuk melakukan dialog terhadap hasil analisis teks dengan teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah, teori komunikasi politik, teori hegemoni dan teori ideologi. Data dalam penelitian ini adalah teks pidato Presiden Amerika Serikat Barack Obama ketika berkunjung di Indonesia 10 November 2010.

3.3. Objek Kajian

Sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah Teks Pidato Barack Obama yang disampaikan pada kuliah umum di kampus Universitas Indonesia, Depok tanggal 10 November 2010.

1.4. Metode Analisis

Teks Pidato Presiden Barack Obama akan dianalisis dengan menggunakan CDA (Critical Discourse Analysis). CDA secara eksplisit bertujuan untuk memasukan telaah teoritik-sosial ke dalam analisa wacana dan mendorong komitmen sosial dan intervensionisme ke dalam penelitian. Ciri utama dan ranah kajian CDA didiskusikan, dengan penekanan pada upaya-upaya menuju pembentukan teori oleh salah satu akademisi paling terkemuka CDA, Norman Fairclough. Bagian lain meninjau asal-muasal dan perkembangan disiplin ilmu CDA, disebutkan pula beberapa kritikan yang belakangan muncul, dan menempatkan CDA di dalam gambaran yang lebih luas dari paradigma kritis baru

yang berkembang dalam sejumlah (sub)disiplin berorientasi bahasa. Dalam paradigma kritis ini, topik-topik semacam ideologi, ketimpangan, dan kuasa menjadi bahasan utama, dan banyak akademisi yang secara produktif berusaha memasukan telaah teoritik-sosial ke dalam kajian bahasa.

Tujuan CDA adalah untuk menganalisa “relasi-relasi dominasi, diskriminasi, kuasa, dan kendali yang samar maupun transparan seperti yang terlihat dalam bahasa” (Wodak 1997:173). Lebih spesifik lagi, “(CDA) mengkaji interaksi-interaksi sosial yang nyata dan kerap berjangkauan luas yang mengambil bentuk (sebagian) berupa bahasa. Pendekatan kritis bersifat khas dalam pandangan-pandangan (a) hubungan antara bahasa dengan masyarakat, dan (b) hubungan antara analisa dengan praktik-praktik yang dianalisa” (Wodak 1997:173).

CDA menyatakan bahwa wacana dibentuk dan dikondisikan secara sosial. Selain itu, wacana merupakan obyek kuasa yang tersamar dalam masyarakat modern dan CDA bertujuan untuk membuatnya lebih nampak dan transparan. *Karakteristik penting perubahan ekonomi, sosial, dan budaya dari modernitas lanjut ialah mereka ada sebagai wacana di samping proses-proses yang terjadi di luar wacana, dan sebaliknya proses-proses yang terjadi di luar wacana itu secara mendasar dibentuk oleh wacana-wacana itu.* Chouliaraki dan Fairclough (1999:4)

Usaha yang paling menyeluruh dan ambisius untuk menteorisasikan program CDA tidak diragukan lagi ada dalam buku *Discourse and Social Change* (1992a) karya Fairclough. Fairclough membangun suatu teori sosial

mengenai wacana dan menyediakan suatu cetak biru metodologis untuk analisa wacana kritis dalam praktik. (Pernyataan programatik lain dari CDA dapat ditemukan dalam karya Fairclough (1992b, 1995b), Chouliaraki & Fairclough (1999), van Leeuwen (1993), van Dijk (1993a, c, 1997), dan Wodak (1995, 1997).

Fairclough (1992a) membuat sketsa suatu kerangka kerja tiga dimensi untuk memahami dan menganalisa wacana. Dimensi pertama adalah wacana-sebagai-teks, yakni karakteristik bahasa dan organisasi instansi kongkret wacana. Pilihan-pilihan dan pola-pola dalam kosa kata (yakni ujaran, metafora), tata bahasa yakni transivitas (*transivity*), modalitas), kohesi (yakni kata penghubung, skemata), dan struktur teks (yakni *episoding, turn-taking system*) seharusnya dianalisa secara sistematis (lihat bawah untuk ketergantungan CDA pada cabang-cabang tertentu dari bahasa). Pemakaian bentuk kata kerja pasif dalam liputan berita, dapat berdampak pada pengaburan agen proses politik. Menurut Fairclough (1992a), perhatian terhadap fitur tekstual yang kongkret ini membedakan CDA dari proses pendekatan serupa seperti pendekatan Michael Foucault.

Dimensi kedua adalah wacana-sebagai-praktik-diskursif, yakni wacana sebagai sesuatu yang diproduksi, diedarkan, disebarkan, dan dikonsumsi di dalam masyarakat. Fairclough melihat proses-proses itu sebagian besar dalam pengertian sirkulasi objek bahasa yang kongkret (teks spesifik atau tipe-teks yang diproduksi, diedarkan, dikonsumsi, dan seterusnya), namun jika dibandingkan dengan Foucault, nampak jelas hanya sedikit waktu yang diluangkan terhadap sumberdaya

dan kondisi-kondisi “makro” lain pada produksi dan distribusi wacana. Mendekati wacana sebagai praktik diskursif mengandung arti bahwa dalam menganalisa kosa kata, tata bahasa, kohesi, dan struktur teks, perhatian seharusnya diberikan terhadap tindakan berbicara, koherensi, dan interteksualitas tiga aspek yang mengaitkan suatu teks dengan konteksnya. Fairclough membedakan antara “*manifest intertextuality*” (yakni secara terbuka mencomot teks-teks lain) dan “*constitutive intertextuality*” (yakni teks yang terdiri dari elemen-elemen heterogen: konvensi generik, tipe wacana, *register, style*). Salah satu aspek penting dari bentuk pertama adalah representasi wacana: bagaimana ujaran yang dicuplik dipilih, diubah, dikontekstualkan (kontribusi terbaru unruk mempelajari representasi wacana, lihat Baynham & Slembrouck 1999).

Dimensi ketiga adalah wacana-sebagai-praktik-sosial, yakni efek ideologi dan proses hegemonik yang di dalamnya wacana adalah suatu *feature* (untuk pemakaian CDA terhadap teori-teori dan konsep-konsep Althusser dan Gramsci, lihat bawah). Hegemoni menaruh perhatian pada kuasa yang dicapai melalui pembentukan aliansi dan pengintegrasian kelas dan kelompok melalui kesepakatan, sehingga “artikulasi dan reartikulasi tatanan wacana merupakan hal yang dipertaruhkan dalam perjuangan hegemonik” (Fairclough 1992a:1993). Dari ketiga dimensi ini Fairclough membangun pendekatannya untuk perubahan: perubahan hegemonik, dan ini dapat disaksikan dalam perubahan diskursif, ketika perubahan diskursif dipandang dari sudut intertekstualitas. Cara di mana wacana direpresentasikan, diucapkan kembali,

atau ditulis kembali menyoroti kemunculan tatanan wacana baru, perjuangan atas normativitas, upaya-upaya untuk mengendalikan, dan perlawanan terhadap rejim kuasa.

Fairclough (1992a) sangat eksplisit berkaitan dengan ambisinya: model wacana yang ia kembangkan dikerangkai dalam suatu teori proses ideologi dalam masyarakat, karena wacana dilihat dalam pengertian proses hegemoni dan perubahan dalam hegemoni. Fairclough berhasil mengidentifikasi proses hegemonik berskala besar seperti demokratisasi, komodifikasi, dan teknologisasi dengan berdasarkan konstruksi heteroglosik (*heteroglossic*) dari genre dan gaya (*style*) teks (lihat contoh di bawah). Ia juga mengidentifikasi beragam cara yang di dalamnya individu-individu bergerak melalui semacam rejim diskursif yang terlembagakan, diri-diri yang mengkonstruksi, kategori-kategori sosial, dan realitas sosial. Pada saat yang sama, arah umum adalah tunggal yang di dalamnya teori sosial digunakan untuk menyediakan suatu metawacana bahasa dan yang di dalamnya sasarnya adalah teknik analisa teks yang disempurnakan dan lebih berdaya.

Titik khusus kritik CDA adalah rangkaian bahasa/wacana/wicara (*speech*) dan struktur sosial. CDA berusaha menyingkap cara-cara yang di dalamnya struktur sosial mempengaruhi pola-pola, relasi-relasi, dan model-model wacana (dalam bentuk relasi-relasi kuasa, efek-efek ideologi, dan seterusnya), dan dalam memperlakukan relasi-relasi itu sebagai masalah, para peneliti CDA menempatkan dimensi kritis dari penelitian mereka. Tidaklah cukup untuk sekedar membeberkan dimensi sosial dari pemakaian bahasa.

Dimensi-dimensi itu adalah obyek evaluasi moral dan politik dan penelaahan dimensi-dimensi itu seharusnya menimbulkan dampak dalam masyarakat: memberdayakan kaum lemah, memberi suara kaum yang terbungkam, menyingkap penyimpangan kekuasaan, dan memobilisasi masyarakat untuk membetulkan penyimpangan-penyimpangan sosial. CDA mendorong intervensionisme dalam praktik-praktik sosial yang ditelitinya secara kritis. Toolan (1997) bahkan menetapkan suatu pendirian baku: CDA seharusnya membuat suatu rumusan untuk perubahan dan menganjurkan pembedulan-pembedulan untuk wacana-wacana khusus. Maka CDA secara terbuka mengusung komitmen-komitmen yang kuat untuk perubahan, pemberdayaan, dan berorientasi praktik.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

A Critical Discourse Analysis In Text President Obama's Speech In Jakarta, Indonesia

President Obama's Speech In Jakarta, Indonesia

University of Indonesia
Jakarta, Indonesia

THE PRESIDENT : *Terima kasih. Terima kasih*, thank you so much, thank you every body. *Selamat pagi* (Applause.) It is wonderful to be here at the University of Indonesia. To the faculty and the staff and the students, and to DR. Gumilar Rusliwa Somantri, thank you so much for your hospitality. (Applause.)

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the people of Jakarta

and thank you to the people of Indonesia. *Pulang kampung nih.* (Applause.) I am so glad that I made it back to Indonesia and was determined to visit a country that's meant so much to me. And unfortunately, this visit is too short, but I look forward to coming back a year from now when Indonesia hosts the East Asia Summit. (Applause.)

Before I go any further, I want to say that's our thoughts and prayers are with all of those Indonesians who are affected by the recent tsunami and the volcanic eruptions-- particularly those who've lost loved ones, and those who've been displaced. And I responding to natural disasters, and we are pleased to be able to help as needed. As neighbors help neighbors and families take in the displaced, I know that the strength and the resilience of the Indonesian people will pull you through once more.

Let me begin with a simple statement : *Indonesia bagian dari diri saya.* (Applause.) I first came to this country when my mother married an Indonesian named Lolo Soetoro. And as young boy I was coming to a different world. But the people of Indonesia quickly made me feel at home. Jakarta-- now, Jakarta looked very different in those days. The city was filled with buildings that were no more than a few stories tall. This was back in 1967, '68-- most of you weren't born yet. (Laughter.) The Hotel Indonesia was one of the few high rises, and there was just one big department store called *Sarinah*. That was it. (Applause.) *Betchaks* and *bemos*, that's how to get around. They outnumbered automobiles in those days. And you didn't have all the big highways that you have

today. Most of them gave way to unpaved roads and the *kampongs*.

So we moved to *Menteng Dalam*, where -- (Applause) -- hey, some folks from *Menteng Dalam* right here. (Applause.) And we Lived in a small house. We had a Mango tree out front. And I learned to love Indonesia while flying kites and running along the paddy fields and catching dragonfiles, buying *satay* and *baso* from the street vendors. (Applause.) I still remember that. *Baso!* (laughter.) But most of all, I remember the people-- the old men and women who welcomed us with smiles; the children who made a foreign child feel like a neighbor and a friend; and the teachers who helped me learn about this country.

Because Indonesia is made up of thousands of islands, and hundreds of languages, and people from scores of regions and ethnic groups, my time here helped me appreciate the common humanity of all people. And while my stepfather, like most Indonesians, was raised a Muslim, he firmly believed that all religions were worthy of respect. And in this way-- (Applause)-- in this way he reflected the spirit of religious tolerance that is enshrined in Indonesia's Constitution, and that remains one of this country's defining and inspiring characteristics. (Applause.)

Now, I stayed here for four years a time that helped shape my childhood; a time that saw the birth of my wonderful sister, Maya; a time that made such an impression on my mother that she kept returning to Indonesia over the next 20 years to live and to work and to travel -- and to pursue

her passion of promoting opportunity in Indonesia's villages, especially opportunity for women and for girls.

And I was so honored--(applause)--I was so honored when President Yudhoyono last night at the state dinner presented an award on behalf of my mother, recognizing the work that she did. And she would have been so proud, because my mother held Indonesia and its people very close to her heart for her entire life. (Applause.)

So much has changed in the four decades since I boarded a plane to move back to Hawaii. If you asked me-- or any of my schoolmates who knew me back then -- I don't think any of us could have anticipated that one day I would come back to Jakarta as the President of the United States. (Applause.) And few could have anticipated the remarkable story of Indonesia over these last four decades. The Jakarta that I once knew has grown into a teeming city of nearly 10 million, with skyscrapers that dwarf the Hotel Indonesia, and thriving centers of culture and of commerce. While my Indonesian friends and I used to run in fields with water buffalo and goats -- (laughter) -- a new generation of Indonesian is among the most wired in the world -- connected through cell phones and social networks. And while Indonesia as a young nation focused inward, a growing Indonesia now plays a key role in the Asia Pacific and in the global economy. (Applause.)

Now, this change also extends to politics. When my stepfather was a boy, he watched his own father and older brother leave home to fight and die in the struggle for Indonesian independence. And I'm happy to be here on Heroes

Day to honor the memory of many Indonesians who have sacrificed on behalf of this great country. (Applause.)

When I moved to Jakarta, it was 1967 and it was a time that had followed great suffering and conflict in parts of this country. And even though my stepfather had served in the Army, the violence and killing during that time of political upheaval was largely unknown to me because it was unspoken by my Indonesian family and friends. In my household, like so many other across Indonesia, the memories of that time were an invisible presence. Indonesians had their independence, but oftentimes they were afraid to speak their minds about issues.

In the years since then, Indonesia has charted its own course through an extraordinary democratic transformation – from the rule of an iron fist to the role of the people. In recent years, the world has watched with hope and admiration as Indonesians embraced the peaceful transfer of power and the direct election of leaders. And just as your democracy is symbolized by youe elected President and legislature, your democracy is sustained and fortified by its checks and balances : a dynamic civil society; political parties and unions; vibrant media and engaged citizen who have ensured that in Indonesia there will be no turning back from democracy.

But even as this land of my youth has changed in so many ways, those things that I learned to love about Indonesia that spirit of tolerance that is writing into your Constitutions; symbolized in mosques and churches and temples standing alongside each other; that spirit that's embodied in your

people that still lives on. (Applause). *Bhineka Tunggal Ika* – unity in diversity. (Applause). This is the foundation of Indonesia’s example to the world, and this is why Indonesia will play such an important parting the 21st century.

So today, I return to Indonesia as a friend, but also as a President who seeks a deep and enduring partnership between our two countries.(Applause). Because as vast and diverse countries; as neighbors on either side of the Pacific; an above all as democracies – the United States and Indonesia are bound together by shared interest and shared values.

Yesterday, President Yudoyono and I announced a new Comprehensive Partnership between the United States and Indonesia. We are increasing ties between our governments in many different areas, and -- just as importantly-- we are increasing ties among our people. This is a partnership of equals, grounded in mutual interest and mutual respect.

So with the rest of my time today, I’d like to talk about why the story I just told the story of Indonesia since the days when I lived here is so important to the United States and to the world. I will focus on three areas that are closely related, and fundamental to human progress – development, democracy and religious faith. First, the friendship between the United States and Indonesia can advance our mutual interest in development.

When I moved to Indonesia, it would have been hard to imagine a future in which the prosperity of families in Chicago and Jakarta would be connected. But our economic are now global, and Indonesians have experienced both the promise and the perils of globalization: from the shock of the

Asian financial crisis in the '90s, to the millions lifted out of poverty because of increased trade and commerce. What that means – and what we learned in the recent economic crisis – is that we have a stake in each other's success.

America has a stake in Indonesia growing and developing, with prosperity that is broadly shared among the Indonesian people – because a rising middle class here in Indonesia means new markets for our goods, just as America is a market for goods coming from Indonesia. So we are investing more in Indonesia, and our exports have grown by nearly 50 percent, and we are opening doors for Americans and Indonesians to do business with one another.

America has a stake in Indonesia that plays its rightful role in shaping the global economy. Gone are the days when seven or eight countries would come together to determine the direction of global markets. That's why G20 is now the center of international economic cooperation, so that emerging economies like Indonesia have a greater voice and also bear greater responsibility for guiding the global economy. And through its leadership of the G20's anti-corruption group, Indonesia should lead on the world stage and by example in embracing transparency and accountability. (Applause).

America has a stake in Indonesia that pursues sustainable development, because the way we grow will determine the quality of our lives and the health of our planet. And that's why we're developing clean energy technologies that can power industry and preserve Indonesia's precious natural resources -- and America welcomes your country's

strong leadership in the global effort to combat climate change.

Above all, America has a stake in the success of the Indonesian people. Underneath the headlines of the day, we must build bridges between our people, because our future security and prosperity is shared. And that is exactly what we're doing – by increasing collaboration among our scientist and researchers, and by working together to foster entrepreneurship. And I'm especially pleased that we have committed to double the number of American and Indonesian students studying in our respective countries. (Applause). We want more Indonesian students in American schools, and we want more American students to come study in this country. (Applause). We want to forge new ties and greater understanding between young people in this young century. These are the issues that really matter in our daily lives. Development, after all, is not simply about growth rates and number on a balance sheet. It's about whether a child can learn the skills they need to make it in a changing world. It's about whether a good idea is allowed to grow into a business, and not suffocated by corruption. It's about whether those forces that have transformed the Jakarta I once knew -- technology and trade and the flow of people and goods – can translate into a better life for all Indonesians, for all human beings, a life marked by dignity and opportunity.

Now, this kind of development is inseparable from the role of democracy. Today, we sometimes hear that democracy stands in the way of economic progress. This is not a new argument. Particularly in time of change and economic

uncertainly, some will say that it is easier to take a shortcut to development by trading away the right of human beings for the power of the state. But that's not what I saw on my trip to India, and that is not what I see here in Indonesia. Your achievements demonstrate that democracy and development reinforce one another. Like any democracy, you have known setbacks along the way. America is no different. Our own Constitution spoke of the effort to forge a "more perfect union," and that is a journey that we've traveled ever since. We've endured civil war and we struggled to extend equal rights to all of our citizens. But it is precisely this effort that has allowed us to become stronger and more prosperous, while also becoming a more just and a more free society.

Like other countries that emerged from colonial rule in the last century, Indonesia struggled and sacrificed for the right to determine your destiny. That is what Heroes Day is all about – an Indonesia that belongs to Indonesians. But you also ultimately decided that freedom cannot mean replacing the strong hand of a colonizer with a strongman of your own. Of course, democracy is messy. Not everyone likes the result of every election. You go through your ups and downs. But the journey is worthwhile, and it goes beyond casting a ballot. It takes strong institutions to check the power – the concentration of power. It takes open markets to allow individuals to thrive. It takes a free press and an independent justice system to root out abuses and excess, and to insist on accountability. It takes open society and active citizens to reject inequality and injustice.

These are the forces that will propel Indonesia forward. And it will require a refusal to tolerate the corruption that stands in the way of opportunity; a commitment to transparency that gives every Indonesian a stake in their government; and a belief that the freedom of Indonesians – that Indonesians have fought for is what holds this great nation together.

That is the message of the Indonesians who have advanced this democratic story – from those who fought in the Battle of Surabaya 55 years ago today; to the students who marched peacefully for democracy in the 1990s; to leaders who have embraced the peaceful transition of power in this young century. Because ultimately, it will be the rights of citizens that will stitch together this remarkable *Nusantara* that stretches from Sabang to Merauke, an insistence – (applause)-- an insistence that every child born in this country should be treated equally, whether they come from Java or Aceh; from Bali or Papua. (Applause). That all Indonesians have equal rights.

That effort extends to the example that Indonesia is now setting abroad. Indonesia took the initiative to establish the Bali Democracy Forum, an open forum for countries to share their experiences and practices in fostering democracy. Indonesia has also been at the forefront of pushing for more attention to human rights within ASEAN. The nations of Southeast Asia must have the right to determine their own destiny, and the United States will strongly support that right. But the people of Southeast Asia must have the right to determine their own destiny as well. And that's why we

condemned elections in Burma recently that were neither free nor fair. That is why we are supporting your vibrant civil society in working with counterparts across this region. Because there's no reason why respect for human rights should stop at the border of any country.

Hand in hand, that is what development and democracy are about – the notion that certain values are universal. Prosperity without freedom is just another form of poverty. Because there are aspirations that human being share -- the liberty of knowing that your leader is accountable to you, and that you won't be locked up for disagreeing with them; the opportunity to get an education and to be able to work with dignity; the freedom to practice your faith without fear or restriction. Those are universal values that must be observed everywhere.

Now, religion is the final topic that I want to address today, and democracy and development it is fundamental to the Indonesian story.

Like the other Asian nations that I'm visiting on this trip, Indonesia is steeped in spirituality a place where people worship God in many different ways. Along with this rich diversity, it is also home to the world's largest Muslim population a truth I came to know as a boy when I heard the call to prayer across Jakarta.

Just as individuals are not defined solely by their faith, Indonesia is defined by more than its Muslim population. But we also know that relations between United States and Muslim communities have frayed over many years. As President, I have made it a priority to begin to repair these

relations. (Applause). As a part of that effort, I went to Cairo last June, and I called for new beginning between the United States and Muslim around the world – one that creates a path for us to move beyond our differences.

I said then, and I will repeat now, that no single speech can eradicate years of mistrust. But I believed then, and I believe today, that we do have a choice. We can choose to be defined by our differences, and give in to a future of suspicion and mistrust. Or we can choose to do the hard work of forging common ground, and commit ourselves to the steady pursuit of progress. And I can promise you – no matter what setbacks may come, the United States is committed to human progress. That is who we are. That is what we've done. And that is what we will do. (Applause).

Now, we know well the issues that have caused tensions for many years – and these are issues that I addressed in Cairo. In the 17 months that have passed since that speech, we have made some progress, but we have much more work to do. Innocent civilians in America, in Indonesia and across the world are still targeted by violent extremism. I made clear that America is not, and never will be, at war with Islam. Instead, all of us must work together to defeat al Qaeda and its affiliates, who have no claim to be leaders of any religion – certainly not a great, world religion like Islam. But those who want to build must not cede ground to terrorists who seek to destroy. And this is not a task for America alone. Indeed, here in Indonesia, you've made progress in rooting out extremists and combating such violence.

In Afghanistan, we continue to work with coalition of nations to build the capacity of the Afghan government to secure its future. Our shared interest is in building peace in a war-torn land – a peace that provides no safe haven for violent extremists, and that provide hope for the Afghan people.

Meanwhile, we've made progress on one of our core commitments – our effort to end the war in Iraq. Nearly 100.000 American troops have now left Iraq under my presidency. (Applause). Iraqis have taken full responsibility for their security. And we will continue to support Iraq as it forms an inclusive government, and we will bring all of our troops home.

In the Middle East, we have faced false starts and setbacks, but we've been persistent in our pursuit of peace. Israelis and Palestinians restarted direct talks, but enormous obstacles remain. There should be no illusion that peace and security will come easy. But let there be no doubt : America will spare no effort in working for the outcome that is just, and that is in interests of all the parties involved – two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. That is our goal. (Applause).

The stakes are high in resolving all of these issues. For our world has grown smaller, and while those forces that connect us have unleashed opportunity and great wealth, they also empower those who seek to derail progress. One bomb in a marketplace can obliterate the bustle of daily commerce. One whispered rumor can obscure the truth and set off violence between communities that once lived together in

peace. In an age of rapid change and colliding cultures, what we share as human beings can sometimes be lost.

But I believe that the history of both America and Indonesia should give us hope. It is a story written into our national mottos. In the United States, our motto is *E pluribus unum* -- out of many, one. *Bhineka Tunggal Ika* unity in diversity. (Applause). We are two nations, which have traveled different paths. Yet our nations show that hundreds of millions who hold different beliefs can be united in freedom under one flag. And we are now building on that shared humanity through young people who will study in each other's schools; through the entrepreneurs forging ties that can lead to greater prosperity; and through our embrace of fundamental democratic values and human aspirations.

Before I came here, I visited *Istiqlal* Mosque a place of worship that was still under construction when I lived in Jakarta. And I admired its soaring minaret and its imposing dome and welcoming space. But its name and history also speak to what makes Indonesia great. *Istiqlal* means independence, and its construction was in part a testament to the nations struggle for freedom. Moreover, this house of worship for many thousands of Muslims was designed by a Christian architect. (Applause).

Such is Indonesia's spirit. Such is the message of Indonesia's inclusive philosophy, Pancasila. (Applause). Across an archipelago that contains some of God's most beautiful creations, islands rising above an ocean named for peace, people choose to worship God as they please. Islam flourishes, but so do other faiths. Development is

strengthened by an emerging democracy. Ancient traditions endure, even as a rising power is on the move.

That is not to say that Indonesia is without imperfections. No country is. But here we can find the ability to bridge divides of race and region and religion by the ability to see yourself in other people. As a child of a different race who come here from a distant country, I found this spirit in the greeting that I received upon moving here: *Selamat Datang*. As a Christian visiting a mosque on this visit, I found it in the words of leader who was asked about my visit and said, "Muslims are also allowed in churches. We are all God's followers.

That spark of the divine lives within each of us. We cannot give in to doubt or cynicism or despair. The stories of Indonesia and America should make us optimistic, because it tells us that history is on the side of human progress; that unity is more powerful than division; and the people of this world can live together in peace. May our two nations, working together, with faith and determination, share these truths with all mankind.

Sebagai penutup, saya mengucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia; terima kasih atas. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.

(Distributed by the Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State. Web site :<http://www.america.gov>)

Pidato Obama versi bahasa Indonesia

Terima kasih. Terima kasih, terima kasih kepada semua hadirin. Selamat pagi (tepek tangan). Ini merupakan sesuatu yang luar biasa saya berada di sini di Universitas Indonesia. Kepada Civitas Akademika, mahasiswa, dan juga DR Gumilar Rusliwa Somantri. Terima kasih banyak atas perhatiannya.(tepek tangan).

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas sambutan hangat ini. Terima kasih untuk masyarakat Jakarta. Dan terima kasih bagi seluruh bangsa Indonesia. *Pulang kampung nih*. (tepek tangan.) Saya senang akhirnya bisa berkunjung ke negeri ini dengan ditemani oleh Michelle. Tahun ini, kami telah dua kali gagal datang ke Indonesia. Namun, saya berkeras untuk menyambangi sebuah negeri yang amat bermakna bagi saya ini. Sayangnya, lawatan ini begitu singkat. Tapi saya berharap bisa datang lagi tahun depan pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT Asia Timur.(tepek tangan)

Sebelum berbicara lebih jauh, saya ingin menyampaikan bahwa doa dan perhatian kami tertuju kepada para korban bencana tsunami dan gunung meletus baru-baru ini, khususnya bagi mereka yang kehilangan orang tercinta serta tempat tinggal. Amerika Serikat senantiasa ada di sisi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana alam ini, dan kami akan dengan senang hati menolong semampunya. Sebagaimana tetangga yang mengulurkan tangan kepada tetangganya yang lain, dan banyak keluarga menampung orang-orang yang kehilangan rumah, saya tahu bahwa kekuatan dan ketahanan yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia akan sanggup mengangkat kalian keluar dari kesusahan ini.

Saya akan memulai dengan pernyataan sederhana: Indonesia bagian dari diri saya. Pertama kali saya bersentuhan dengan negeri ini adalah ketika ibu saya menikahi seorang pria Indonesia bernama Lolo Soetoro. Sebagai seorang bocah, saya terdampar di sebuah dunia yang berbeda. Namun, orang-orang di sini membuat saya merasa berada di rumah saya sendiri.

Pada masa itu, Jakarta terlihat begitu berbeda. Kota ini disesaki gedung-gedung yang tak begitu tinggi. Hotel Indonesia adalah salah satu bangunan tinggi. Kala itu, ada sebuah pusat perbelanjaan baru bernama Sarinah. Jumlah becak jauh lebih banyak daripada kendaraan bermotor. Dan jalan raya tersisih oleh jalan-jalan kampung tak beraspal.

Kami tinggal di Menteng Dalam, pada sebuah rumah mungil yang halamannya ditumbuhi sebatang pohon mangga. Saya belajar mencintai Indonesia pada saat menerbangkan layang-layang, berlarian di sepanjang pematang sawah, menangkap capung, dan jajan sate atau bakso dari pedagang keliling. Yang paling saya kenangkan adalah orang-orangnya: lelaki dan perempuan sepuh yang menyapa kami dengan senyumnya; anak-anak yang membuat seorang asing seperti saya jadi seperti tetangga; dan guru-guru yang mengajarkan keluasan dunia.

Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, dan orang-orang dari berbagai daerah dan suku, periode saya tinggal di negeri ini melapangkan jalan bagi saya menghargai kemanusiaan. Walau ayah tiri saya, sebagaimana

orang Indonesia umumnya, dibesarkan sebagai seorang Muslim, ia sepenuhnya percaya bahwa semua agama patut dihargai secara setara. Dengan cara itu, ia mencerminkan semangat toleransi keberagaman yang diabadikan dalam Undang-undang Dasar Indonesia yang tetap menjadi salah satu ciri negeri ini, yang tentunya memberi inspirasi.

Saya tinggal di kota ini selama bertahun-tahun sungguh suatu masa yang membentuk masa kecil saya; suatu masa yang menjadi saksi bagi kelahiran adik saya yang manis, Maya; dan suatu masa yang telah memesona ibu saya sehingga ia terus-menerus menghampiri Indonesia 20 tahun kemudian untuk tinggal, bekerja dan bepergian - mengejar hasratnya mendorong terbukanya kesempatan di pedesaan Indonesia khususnya bagi perempuan. Sepanjang hidupnya, negeri ini, beserta orang-orangnya, tetap tersimpan di hati ibu saya.

Begitu banyak yang berubah dalam empat dekade ini sejak saya kembali ke Hawaii. Jika kalian bertanya kepada saya - atau teman sekolah pada masa itu yang mengenal saya - saya yakin tak ada di antara kami yang mampu menyangka bahwa saya akan kembali ke negeri ini sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan beberapa orang semestinya bisa meramalkan kisah luar biasa yang melibatkan Indonesia dalam empat dekade terakhir.

Jakarta yang dahulu saya kenal kini telah berkembang menjadi sebuah kota yang dijejali hampir sepuluh juta manusia, gedung-gedung pencakar langit yang membuat Hotel Indonesia terlihat kerdil, serta pusat-pusat kebudayaan dan perdagangan. Dulu saya dan kawan-kawan semasa kanak

biasa berkejar-kejaran di lapangan ditemani kerbau dan kambing. Kini, generasi baru Indonesia termasuk dalam golongan paling terhubung dalam jagat komunikasi dunia melalui telepon genggam dan media sosial. Dulu, Indonesia sebagai bangsa yang masih muda berfokus ke dalam. Kini, bangsa ini memainkan peran penting di kawasan Asia-Pasifik dan ekonomi global.

Perubahan ini menjangkau ranah politik. Waktu ayah tiri saya masih kanak, ia menyaksikan ayah dan abangnya pergi berperang dan tewas demi kemerdekaan Indonesia. Saya lega bisa ada di sini tepat ketika Hari Pahlawan untuk mengingat jasa begitu banyak orang Indonesia yang rela berkorban demi negara yang besar ini.

Ketika saya pindah ke Jakarta pada tahun 1967, beberapa daerah di negeri ini baru saja mengalami penderitaan dan konflik yang hebat. Meski ayah tiri saya pernah menjadi seorang tentara, kekerasan dan pembantaian yang terjadi pada masa kekisruhan politik itu tak dapat saya pahami karena keluarga Indonesia dan teman-teman saya memilih bungkam. Di dalam rumah tangga saya, seperti keluarga Indonesia umumnya, peristiwa itu hadir secara sembunyi-sembunyi. Bangsa Indonesia merdeka, tapi rasa takut senantiasa mengikuti.

Pada masa-masa sesudahnya, Indonesia memilih jalurnya sendiri melalui tranformasi demokratis yang luar biasa - dari pemerintahan tangan besi, ke pemerintahan rakyat. Tahun-tahun belakangan, dunia menyaksikan dengan harapan dan rasa kagum usaha bangsa Indonesia merengkuh peralihan kekuasaan dengan jalan damai dan pemilihan kepala

negara serta daerah secara langsung. Ketika demokrasi di negeri ini disimbolkan oleh terpilihnya Presiden dan wakil rakyat, ketika itu pula demokrasi dijalankan dan dipelihara melalui kontrol dan keseimbangan (check dan balance): Sebuah masyarakat madani, partai dan serikat politik yang madani; media dan warga negara penuh semangat yang telah yakin bahwa - di dalam Indonesia - tak ada lagi jalan memutar.

Bahkan ketika tanah tempat kemudaan saya pernah berlalu ini telah berubah banyak, hal-hal yang pernah saya pelajari untuk mencintai Indonesia - semangat toleransi yang tercantum dalam Undang-undang Dasar dan terpacak melalui masjid, gereja dan candi, pun tertanam dalam darah bangsa - masih mengalir di tubuh saya. Bhinneka Tunggal Ika - persatuan dalam keragaman. Falsafah itu merupakan pondasi yang dicontohkan Indonesia kepada dunia. Itu sebabnya Indonesia akan memainkan peran penting pada abad ke-21.

Hari ini, saya kembali ke Indonesia sebagai seorang sahabat sekaligus Presiden yang mengharapkan terjalinnya kerja sama erat antar kedua negara. Sebagai negara yang luas dan majemuk, berdamping-dampingan dengan Samudera Pasifik dan, di atas itu semua, demokrasi, Amerika Serikat dan Indonesia ditakdirkan bersama oleh kepentingan dan nilai-nilai yang sama.

Kemarin, Presiden Yudhoyono dan saya menyetujui Kerja Sama Komprehensif yang baru antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pemerintahan kedua negara mempererat hubungan di berbagai bidang dan, yang juga penting, memperkuat hubungan antar bangsa. Kerja sama ini tentunya

berdasar atas rasa saling membutuhkan dan saling menghormati.

Dengan sisa waktu yang saya miliki hari ini, saya ingin berbagi tentang mengapa kisah yang baru saja saya utarakan begitu penting bagi Amerika Serikat dan dunia. Saya ingin menitikberatkan pembahasan pada tiga hal yang saling berkait-erat serta mendasar bagi kemajuan manusia: Pembangunan, demokrasi dan agama.

Pertama, persahabatan yang terjalin antara Amerika Serikat dan Indonesia dapat memajukan pembangunan yang saling menguntungkan. Ketika saya hidup di Indonesia, sulit membayangkan sebuah masa depan dimana kemakmuran yang dirasakan oleh banyak keluarga di Chicago dan Jakarta akan berhubungan. Kini, kita ada pada zaman ekonomi global. Bangsa Indonesia telah merasakan risiko dan harapan dari globalisasi: Mulai dari krisis ekonomi Asia yang terjadi pada akhir tahun 1990, dan jutaan orang yang berhasil bangkit dari kemiskinan. Artinya, dan yang akhirnya kita pelajari dari krisis ekonomi barusan, masing-masing dari kita memiliki sumbangsih pada keberhasilan yang diraih pihak lain.

Amerika memiliki sumbangsih terhadap sebagian dari Indonesia yang merasakan kemakmuran, karena tumbuhnya kelas menengah di sini juga berarti timbulnya pasar bagi produk-produk kami seperti juga Amerika merupakan pasar bagi Indonesia. Karena itu, kami menanamkan modal lebih banyak di Indonesia. Ekspor dari Amerika telah naik 50 persen, dan kami membuka pintu bagi pengusaha Amerika dan Indonesia untuk saling berhubungan.

Amerika memiliki sumbangsiah terhadap Indonesia, yang memainkan peranannya dalam perekonomian global. Hari-hari ketika tujuh atau delapan negara membentuk kelompok dan menentukan arah perekonomian dunia telah berlalu. Karena itulah saat ini G-20 telah menjadi pusat kerja sama ekonomi internasional: Hal yang memungkinkan negeri seperti Indonesia memiliki suara lebih nyaring dan tanggung jawab lebih besar. Melalui kepemimpinan Indonesia di dalam kelompok G-20 yang memerangi korupsi, negeri ini harus ada di depan pada panggung dunia dengan memberikan contoh baik dalam mempraktikkan transparansi dan akuntabilitas.

Amerika memiliki sumbangsiah terhadap Indonesia yang mengejar pembangunan berkelanjutan. Karena cara kita bertumbuh akan mempengaruhi kualitas hidup kita serta kesejahteraan planet yang kita diami. Karena itulah kita mengembangkan teknologi untuk menghasilkan energi bersih yang mampu menopang industri dan menjaga sumber daya alam Indonesia. Amerika menyambut kepemimpinan negeri anda dalam usaha global memerangi perubahan iklim.

Di atas itu semua, Amerika memiliki sumbangsiah terhadap keberhasilan manusia Indonesia. Kita harus membangun jembatan yang menghubungkan kedua bangsa karena kita akan berbagi jaminan dan kemakmuran di masa nanti. Itu yang kini sedang kita rintis: Meningkatkan kolaborasi antara ilmuwan dan peneliti kita serta bekerja sama memelihara kewirausahaan. Saya pribadi puas karena kita berhasil meningkatkan jumlah pelajar Amerika dan Indonesia yang meneruskan pendidikan di universitas-universitas yang ada pada kedua negara.

Baru saja saya bicarakan masalah-masalah penting dalam kehidupan kita. Lagipula, pembangunan tak melulu hanya berhubungan dengan tingkat pertumbuhan dan angka-angka dalam neraca. Pembangunan juga menyangkut bagaimana seorang anak mampu mempelajari keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi dunia yang selalu berubah. Pembangunan berkaitan dengan bagaimana gagasan baik dapat diwujudkan dan tak tercemar dengan korupsi. Pembangunan juga berhubungan dengan bagaimana kekuatan-kekuatan yang telah mengubah Jakarta yang pernah saya kenal - teknologi, perdagangan, arus keluar-masuk orang dan barang - mampu membuat hidup orang jadi lebih baik: Kehidupan uang ditandai dengan martabat dan kesempatan.

Pembangunan semacam itu tak mampu dipisahkan dari demokrasi.

Kini, kita sering mendengar bahwa demokrasi menghalangi pertumbuhan ekonomi. Ini bukanlah alasan baru. Orang akan berkata, khususnya di tengah perubahan dan kondisi ekonomi tak menentu, bahwa pembangunan akan lebih mudah dijalankan dengan mengorbankan hak asasi manusia. Tapi, saya tak melihat itu di India, juga Indonesia. Apa yang kalian telah raih menunjukkan bahwa demokrasi dan pembangunan saling menopang.

Seperti layaknya demokrasi di negara lain, halangan selalu merintang. Amerika juga mengalaminya. Undang-undang Dasar yang kami miliki menyatakan upaya untuk menempa "penyatuan lebih sempurna." Kami telah menempuh perjalanan untuk meraih itu. Kami melewati Perang Saudara dan berjuang menegakkan hak-hak pribadi warga negara

Amerika Serikat. Usaha itu kemudian membuat kami lebih kuat dan sejahtera serta menjadi sebuah masyarakat yang lebih adil dan bebas.

Seperti negara lain yang bangkit dari pemerintahan kolonial di abad lalu, Indonesia berjuang dan berkorban demi memiliki hak menentukan nasib sendiri. Itulah makna Hari Pahlawan sesungguhnya: Sebuah Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi, secara bersamaan, kemerdekaan yang telah didapatkan itu tak pula berarti menggantikan kekuatan kolonial dengan kekuatan pemerintahan lokal.

Tentunya, demokrasi morat-marit. Tak semua pihak menyukai hasil akhir suatu pemilihan umum. Kalian semua mengalami segala suka dan duka. Namun, perjalanan itu patut dilewati karena tak hanya melulu mengenai surat suara. Butuh lembaga yang kuat untuk mengontrol pemusatan kekuatan. Butuh pasar terbuka untuk memungkinkan banyak individu maju. Butuh pers dan sistem peradilan yang independen. Butuh masyarakat terbuka dan warga negara yang aktif untuk melawan ketimpangan dan ketidakadilan.

Yang demikian adalah kekuatan yang akan mendorong Indonesia. Korupsi harus dilawan. Komitmen pada keterbukaan, yang memungkinkan tiap warga memiliki sumbangsih terhadap pemerintahannya, mesti ada. Kepercayaan bahwa kemerdekaan yang telah direbut merupakan hal yang tetap menyatukan negeri ini harus ditumbuhkan.

Itu adalah pesan dari manusia Indonesia yang telah memajukan kisah demokratis ini: Dari mereka yang berperang di Surabaya 55 tahun lampau; kepada para mahasiswa yang

tergabung dalam demonstrasi tahun 1990an; kepada para pemimpin yang telah berhasil menjalani transisi kekuasaan secara damai pada awal abad ini. Karena, akhirnya, para warga negara memiliki hak untuk menyatukan Nusantara, yang membentang sepanjang Sabang dan Merauke: Sebuah penegasan bahwa setiap bayi yang lahir di negeri ini wajib diperlakukan dengan adil meski mereka berketurunan Jawa, Aceh, Bali atau Papua.

Upaya-upaya semacam itu ditunjukkan Indonesia kepada dunia. Negeri ini berinisiatif membentuk Forum Demokrasi Bali, sebuah forum bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman dalam menjaga demokrasi. Indonesia juga telah berusaha menekan ASEAN memperhatikan hak asasi manusia. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara berhak menentukan takdirnya sendiri dan Amerika Serikat akan mendukung upaya itu. Namun, warga Asia Tenggara harus pula memiliki hak menentukan nasib mereka sendiri. Itu sebabnya kami mengutuk pemilihan umum di Burma, yang jauh dari kebebasan maupun keadilan. Itu sebabnya kami menyokong masyarakat madani yang penuh semangat di negeri ini. Tidak ada alasan untuk mencegah penegakan hak asasi manusia di manapun.

Itulah pembangunan dan demokrasi - gagasan bahwa ada nilai-nilai yang sifatnya universal. Kemakmuran tanpa kemerdekaan adalah bentuk lain dari kemiskinan. Manusia memiliki cita-cita bersama: Kebebasan untuk tahu bahwa pemimpinmu bertanggung jawab atasmu dan bahwa anda takkan dibui bila memiliki pandangan yang berseberangan dengannya. Anda memiliki kesempatan belajar dan bekerja

dengan kemuliaan. Anda bebas menjalankan kepercayaan yang anda anut tanpa takut dikucilkan.

Agama merupakan topik terakhir yang akan saya bicarakan hari ini dan, seperti layaknya demokrasi dan pembangunan, merupakan hal mendasar bagi kisah Indonesia. Seperti negara Asia lain yang saya kunjungi, Indonesia tenggelam dalam spiritualitas: Sebuah tempat manusia menyembah Tuhan dengan berbagai cara. Sejalan dengan keberagamannya, Indonesia juga negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia - hal yang telah saya ketahui sejak kecil ketika mendengar lantunan azan di Jakarta.

Individu tak hanya didefinisikan berdasarkan kepercayaannya. Begitu pula Indonesia. Negeri ini tidak hanya ditetapkan berdasarkan penduduk Muslimnya. Kita juga tahu bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan masyarakat Islam telah lama rusak. Sebagai Presiden, saya mendahulukan perbaikan atas hubungan yang rusak ini. Salah satu upaya itu adalah kunjungan ke Kairo pada bulan Juni yang lalu dan keinginan untuk memulai lagi hubungan yang baru antara Amerika Serikat dan umat Islam sedunia.

Waktu itu saya bilang, dan akan saya ulangi sekarang, bahwa tak ada satu pidato pun yang dapat menghapuskan tahun-tahun penuh ketidakpercayaan. Tapi waktu itu saya percaya, demikian pula sekarang, bahwa kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk bisa menetapkan diri kita berdasarkan perbedaan-perbedaan yang kita miliki dan menyerah pada masa depan yang penuh kecurigaan dan ketidakpercayaan. Atau kita bisa memilih untuk bekerja keras demi memelihara persamaan hak. Saya berjanji, apapun

rintangannya, Amerika Serikat akan berkomitmen memajukan manusia. Itulah kami. Kami telah melakukannya. Kami akan terus menjalankannya.

Kami tahu baik masalah-masalah yang menyebabkan adanya tekanan bertahun-tahun ini. Kami telah menciptakan kemajuan setelah 17 bulan pemerintahan. Tapi, pekerjaan belum selesai.

Banyak warga tak berdosa di Amerika, Indonesia dan belahan dunia lainnya masih menjadi target kaum ekstremis. Saya telah menegaskan bahwa Amerika tidak sedang memerangi, dan takkan terlibat perang dengan, Islam. Namun, kita semua harus menghancurkan Al-Qaeda dan antek-anteknya. Siapapun yang ingin membangun tak boleh bekerja sama dengan teroris. Ini bukanlah tugas Amerika sendiri. Indonesia telah berhasil memerangi para teroris dan aliran garis keras.

Di Afghanistan, kami terus bekerja bersama beberapa negara untuk membantu pemerintah Afghanistan meretas masa depannya. Kepentingan kami di sana adalah memungkinkan terwujudnya perdamaian yang pada akhirnya mampu memunculkan harapan bagi negeri itu.

Kami juga telah mencatat kemajuan dalam salah satu komitmen utama kami: Upaya mengakhiri perang di Irak. 100 ribu tentara Amerika telah meninggalkan negeri itu. Penduduk Irak telah memiliki tanggung jawab penuh atas keamanan mereka. Kami terus mendukung Irak dalam prosesnya membentuk pemerintahan yang inklusif. Kami juga akan memulangkan seluruh tentara AS.

Di Timur Tengah, kami telah menghadapi permulaan yang gagal serta halangan. Namun, kami juga terus menjaga upaya merengkuh perdamaian. Bangsa Israel dan Palestina memulai kembali perundingan. Namun, masih ada masalah besar di sana. Ilusi bahwa kedamaian dan keamanan akan datang dengan mudah tak boleh muncul. Tapi, singkirkanlah keragu-raguan: Kami takkan menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh hasil yang adil bagi semua pihak yang bertikai: Dua negara, Israel dan Palestina, hidup berdampingan secara damai dan sentosa.

Penyelesaian atas masalah-masalah itu memiliki taruhan yang besar. Dunia yang kita huni telah menjadi kian kecil. Sementara kekuatan-kekuatan yang menghubungkan kita membuka kesempatan, kekuatan-kekuatan itu juga menyokong pihak yang ingin menghambat kemajuan. Sebuah bom di tengah pasar melumpuhkan kegiatan jual-beli. Sepotong gosip dapat mengaburkan kebenaran dan memicu kekerasan di tengah masyarakat yang sebelumnya hidup rukun. Di zaman ini, ketika perubahan begitu cepat dan berbagai budaya berbenturan, apa yang kita bagikan sebagai manusia dapat musnah.

Saya percaya bahwa sejarah Indonesia dan Amerika mampu memberikan kita harapan. Kisah keduanya tertulis dalam semboyan yang dimiliki oleh negara kita masing-masing. E pluribus unum - beragam tapi bersatu. Bhinneka Tunggal Ika - persatuan dalam keberagaman. Kita dua bangsa yang mengambil jalan masing-masing. Namun kedua negara ini menunjukkan bahwa ratusan juta orang yang memiliki kepercayaan berbeda mampu bersatu dengan merdeka di

bawah satu bendera. Dan kita sekarang membangun kemanusiaan melalui anak-anak muda yang akan melalui pendidikan di sekolah masing-masing; melalui wirausahawan yang saling berhubungan demi meraih kemakmuran; dan melalui upaya kita memeluk nilai-nilai demokrasi serta cita-cita manusiawi.

Tadi saya mampir ke Masjid Istiqlal. Rumah ibadah itu masih dalam pengerjaan ketika saya tinggal di Jakarta. Saya mengagumi menaranya yang menjulang, kubah yang megah, serta tempatnya yang lapang. Namun, nama serta sejarahnya juga menjadi saksi kebesaran Indonesia. Istiqlal maknanya kemerdekaan. Bangunan itu sebagiannya merupakan wasiat perjuangan sebuah bangsa menuju kemerdekaan. Terlebih lagi, masjid itu dibangun oleh seorang arsitek Kristen.

Itulah semangat Indonesia. Itulah pesan yang diimbuhkan dalam Pancasila. Di sebuah negeri kepulauan yang berisi beberapa ciptaan Tuhan yang paling elok, pulau-pulau yang menyembul dari samudera, orang bebas memilih Tuhan yang ingin mereka sembah. Islam berkembang, begitu pula ajaran lain. Pembangunan diperkuat oleh demokrasi yang sedang berkembang. Tradisi purba terpelihara meski sebuah kekuatan sedang lahir.

Tapi bukan berarti Indonesia negeri sempurna. Tak ada satu negeri pun yang bisa. Tapi di sini ras, wilayah, dan agama yang berbeda mampu dijembatani. Sebagai seorang bocah yang berasal dari suatu ras dan datang dari sebuah negeri yang jauh, saya menemukan semangat untuk melihat diri sebagai seorang individu dalam ucapan "Selamat Datang". Sebagai seorang pemeluk Kristiani yang

mengunjungi masjid, saya mengutip pendapat seseorang yang ditanyai tentang kunjungan saya: "Orang Islam juga boleh masuk gereja. Kita semua adalah umat Tuhan."

Ungkapan itu mencetuskan gagasan bahwa sifat ketuhanan ada di dalam diri kita. Kita tak boleh menyerah pada penyangkalan atau sinisisme atau keputusan. Kisah yang melibatkan Indonesia dan Amerika menunjukkan kepada kita bahwa sejarah mengikuti perkembangan manusia; bahwa persatuan lebih kuat daripada perpecahan; dan bahwa warga dunia dapat hidup dengan damai. Semoga kedua negeri kita dapat terus bekerja sama, dengan kepercayaan dan determinasi, menyebarkan kebenaran-kebenaran ini dengan seluruh manusia.

**TERIMA KASIH UNTUK SEMUA RAKYAT
INDONESIA...TERIMA KASIH.**

ASSALAMUALAIKUM...Thanks Very Much...

Pidato Obama, Isi Pidato Obama di UI Bahasa Inggris, Terjemahan Pidato Obama di Indonesia, **Isi Lengkap Naskah Pidato Obama di Universitas Indonesia UI.**

4.2 Interpretasi

Naskah teks Pidato presiden Barack Obama dianalisis dengan menggunakan metode Critical Discourse Analysis (CDA) Norman Fairclough. Tahapan analisis dalam Metode CDA adalah terdiri dari:

1. Level Teks
Interpretasi teks
2. Level Produksi Teks

Produksi teks pidato Barack Obama

3. Level Konsumsi Teks

Komunikasikan pidato Barack Obama di Kampus Universitas Indonesia Depok adalah masyarakat Indonesia

4. Level Wacana Sosial Budaya

Kajian sosial budaya

4.2.1. Level Teks

Interpretasi teks

Pidato Obama di kampus UI Depok mengisyaratkan pentingnya peran Indonesia dalam kancah Internasional. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam namun minim dalam hal sumber daya manusia mengakibatkan Indonesia terpuruk dalam hal ekonomi. Dalam banyak hal Indonesia banyak tergantung pada negara lain. Situasi ketergantungan berdampak negatif yang tidak mampu menciptakan tumbuhnya pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam analisis wacana hendaknya mempertimbangkan peristiwa bahasa dengan melihat bahasa dari dua sisi yaitu segi arti dan referensi. Dalam wacana terdapat pernyataan (preposisi) yang bertujuan untuk menyatakan sesuatu (arti/makna) akan tetapi juga menyatakan sesuatu tentang sesuatu (referensi). Referensi inilah yang memperluas dimensi makna bahasa dan mempengaruhi sistem sosial budaya sampai pikiran manusia untuk itu wacana harus dilihat dari satu kesatuan yang utuh.

Wacana dalam pemahaman Fairclough mempunyai tiga efek. Pertama, wacana memberikan andil dalam

mengkonstruksi identitas sosial dan posisi subjek. Kedua, wacana membantu mengkonstruksi relasi sosial di antara orang-orang. Dan ketiga, wacana memberikan kontribusi dalam mengkonstruksi sistem pengetahuan dan kepercayaan. Ketiga efek dari wacana ini adalah fungsi dari bahasa dan dimensi dari makna yang dihubungkan dengan identitas, relasional, dan fungsi ideasional dari bahasa.

Demikian juga dalam teks pidato Barack Obama harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan menginterpretasi teks, mengkajinya pada tahap produksi teks, sampai penyajian teks dan efek dari pidato itu bagi dunia internasional bukan hanya hubungan Indonesia-Amerika Serikat tetapi mencakup dunia secara global dan juga seluruh aspek kehidupan.

Barack Obama paham dan juga mengerti akan pentingnya keberadaan Indonesia sebuah negara yang terbentuk atas ribuan pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke dengan beragam budaya, suku, bahasa, dan agama. Masyarakatnya yang plural menempatkan Bhineka Tunggal Ika menjadi pemersatu akan perbedaan itu. Obama tidak memungkiri betapa kaya Indonesia dari segi geografis dan juga budaya.

Sebagian besar isi pidato Barack Obama menceritakan kehidupannya di Indonesia, serta hal-hal yang diingatnya saat bergaul dengan kehidupan kampung di Jakarta. Pada pidato itu, Obama menyebutkan tiga hal yang menjadi perhatian selama kunjungannya ke Indonesia. Tiga hal itu adalah pembangunan, demokrasi, dan keyakinan beragama. "Indonesia dan Amerika saling bergantung. Seperti

peningkatan ekonomi di kalangan menengah berarti juga pasar baru bagi ekspor AS. Dalam masalah pembangunan, Obama menyebutkan Indonesia dan Amerika memiliki hubungan yang kuat dan bergantung satu sama lain.

Pidato Presiden Amerika Barack Obama di Jakarta merupakan kelanjutan dari rangkaian pidato sebelumnya pada 4 Juni 2009 di Universitas Al Azhar Kairo Mesir membawa dampak yang luar biasa terhadap perkembangan politik dan rezim yang berkuasa di benua Afrika. “A New Beginning” yang disampaikan di hadapan civitas akademik Universitas Al Azhar Kairo oleh Barack menjadi sebuah awal perubahan untuk Mesir sendiri. Presiden Mesir, Hosni Mubarak yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun lengser di tahun 2011.

Sejak kedatangan Presiden Amerika ke Mesir, negeri itu seperti mendapat udara segar. Para oposisi, pemuda, cerdas cendikia dan sebagian besar masyarakat Mesir seperti terinspirasi oleh orasi yang disampaikan oleh Barack. Era baru hubungan Amerika dengan dunia Islam versi orasi Barack Obama yang menggambarkan hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di Timur Tengah, dengan tujuan tersmar untuk mereformasi pemimpin, mengganti rezim penguasa seperti Presiden Hosni Mubarak dengan mengatasmakan atas dasar perubahan, atas dasar menentang kekuasaan rezim Husni yang berkuasa lebih dari 30 tahun, rakyat bergerak. Masyarakat Mesir menjadi berani berorasi menentang dan menuntut pengantian rezim.

Isi pidato Obama di Mesir adalah sebagai berikut :

“I am honoured to be in the timeless city of Cairo, and to be hosted by two remarkable institutions. For over a thousand years, Al-Azhar has stood as a beacon of Islamic learning, and for over a century, Cairo University has been a source of Egypt’s advancement. Together, you represent the harmony between tradition and progress. I am grateful for your hospitality, and the hospitality of the people of Egypt. I am also proud to carry with me the goodwill of the American people, and a greeting of peace from Muslim communities in my country: assalaamu alaykum.

We meet at a time of tension between the United States and Muslims around the world – tension rooted in historical forces that go beyond any current policy debate. The relationship between Islam and the West includes centuries of coexistence and co-operation, but also conflict and religious wars. More recently, tension has been fed by colonialism that denied rights and opportunities to many Muslims, and a Cold War in which Muslim-majority countries were too often treated as proxies without regard to their own aspirations. Moreover, the sweeping change brought by modernity and globalisation led many Muslims to view the West as hostile to the traditions of Islam.

Violent extremists have exploited these tensions in a small but potent minority of Muslims. The attacks of September 11th, 2001 and the continued efforts of these extremists to engage in violence against civilians has led some in my country to view Islam as inevitably hostile not

only to America and Western countries, but also to human rights. This has bred more fear and mistrust.

So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace, and who promote conflict rather than the co-operation that can help all of our people achieve justice and prosperity. This cycle of suspicion and discord must end.

I have come here to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world; one based upon mutual interest and mutual respect; and one based upon the truth that America and Islam are not exclusive, and need not be in competition. Instead, they overlap, and share common principles – principles of justice and progress; tolerance and the dignity of all human beings.

I do so recognising that change cannot happen overnight. No single speech can eradicate years of mistrust, nor can I answer in the time that I have all the complex questions that brought us to this point. But I am convinced that in order to move forward, we must say openly the things we hold in our hearts, and that too often are said only behind closed doors. There must be a sustained effort to listen to each other; to learn from each other; to respect one another; and to seek common ground. As the Holy Koran tells us, “Be conscious of God and speak always the truth.” That is what I will try to do to speak the truth as best I can, humbled by the task before us, and firm in my belief that the interests we share as human beings are far more powerful than the forces that drive us apart.

Part of this conviction is rooted in my own experience. I am a Christian, but my father came from a Kenyan family that includes generations of Muslims. As a boy, I spent several years in **Indonesia** and heard the call of the azaan at the break of dawn and the fall of dusk. As a young man, I worked in Chicago communities where many found dignity and peace in their Muslim faith.

As a student of history, I also know civilisation's debt to Islam. It was Islam – at places like Al-Azhar University – that carried the light of learning through so many centuries, paving the way for Europe's Renaissance and Enlightenment. It was innovation in Muslim communities that developed the order of algebra; our magnetic compass and tools of navigation; our mastery of pens and printing; our understanding of how disease spreads and how it can be healed. Islamic culture has given us majestic arches and soaring spires; timeless poetry and cherished music; elegant calligraphy and places of peaceful contemplation. And throughout history, Islam has demonstrated through words and deeds the possibilities of religious tolerance and racial equality.

I know, too, that Islam has always been a part of America's story. The first nation to recognise my country was Morocco. In signing the Treaty of Tripoli in 1796, our second President John Adams wrote, "The United States has in itself no character of enmity against the laws, religion or tranquillity of Muslims." And since our founding, American Muslims have enriched the United States. They have fought in our wars, served in government, stood for civil rights, started businesses, taught at our Universities, excelled in our sports

arenas, won Nobel Prizes, built our tallest building, and lit the Olympic Torch. And when the first Muslim-American was recently elected to Congress, he took the oath to defend our Constitution using the same Holy Koran that one of our Founding Fathers — Thomas Jefferson — kept in his personal library.

So I have known Islam on three continents before coming to the region where it was first revealed. That experience guides my conviction that partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. And I consider it part of my responsibility as President of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear.

But that same principle must apply to Muslim perceptions of America. Just as Muslims do not fit a crude stereotype, America is not the crude stereotype of a self-interested empire. The United States has been one of the greatest sources of progress that the world has ever known. We were born out of revolution against an empire. We were founded upon the ideal that all are created equal, and we have shed blood and struggled for centuries to give meaning to those words — within our borders, and around the world. We are shaped by every culture, drawn from every end of the Earth, and dedicated to a simple concept: *E pluribus unum*: “Out of many, one.”

Much has been made of the fact that an African-American with the name Barack Hussein Obama could be elected President. But my personal story is not so unique. The dream of opportunity for all people has not come true for

everyone in America, but its promise exists for all who come to our shores — that includes nearly seven million American Muslims in our country today who enjoy incomes and education that are higher than average.

Moreover, freedom in America is indivisible from the freedom to practice one's religion. That is why there is a mosque in every state of our union, and over 1,200 mosques within our borders. That is why the U.S. government has gone to court to protect the right of women and girls to wear the hijab, and to punish those who would deny it.

So let there be no doubt: Islam is a part of America. And I believe that America holds within her the truth that regardless of race, religion, or station in life, all of us share common aspirations to live in peace and security; to get an education and to work with dignity; to love our families, our communities, and our God. These things we share. This is the hope of all humanity.

Of course, recognizing our common humanity is only the beginning of our task. Words alone cannot meet the needs of our people. These needs will be met only if we act boldly in the years ahead; and if we understand that the challenges we face are shared, and our failure to meet them will hurt us all.

For we have learned from recent experience that when a financial system weakens in one country, prosperity is hurt everywhere. When a new flu infects one human being, all are at risk. When one nation pursues a nuclear weapon, the risk of nuclear attack rises for all nations. When violent extremists operate in one stretch of mountains, people are endangered

across an ocean. And when innocents in Bosnia and Darfur are slaughtered, that is a stain on our collective conscience. That is what it means to share this world in the 21st century. That is the responsibility we have to one another as human beings.

This is a difficult responsibility to embrace. For human history has often been a record of nations and tribes subjugating one another to serve their own interests. Yet in this new age, such attitudes are self-defeating. Given our interdependence, any world order that elevates one nation or group of people over another will inevitably fail. So whatever we think of the past, we must not be prisoners of it. Our problems must be dealt with through partnership; progress must be shared.

That does not mean we should ignore sources of tension. Indeed, it suggests the opposite: we must face these tensions squarely. And so in that spirit, let me speak as clearly and plainly as I can about some specific issues that I believe we must finally confront together.

The first issue that we have to confront is violent extremism in all of its forms.

In Ankara, I made clear that America is not and never will be at war with Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security. Because we reject the same thing that people of all faiths reject: the killing of innocent men, women, and children. And it is my first duty as President to protect the American people.

The situation in Afghanistan demonstrates America's goals, and our need to work together. Over seven years ago, the United States pursued al Qaeda and the Taliban with broad international support. We did not go by choice, we went because of necessity. I am aware that some question or justify the events of 9/11. But let us be clear: al Qaeda killed nearly 3,000 people on that day. The victims were innocent men, women and children from America and many other nations who had done nothing to harm anybody. And yet Al Qaeda chose to ruthlessly murder these people, claimed credit for the attack, and even now states their determination to kill on a massive scale. They have affiliates in many countries and are trying to expand their reach. These are not opinions to be debated; these are facts to be dealt with.

Make no mistake: we do not want to keep our troops in Afghanistan. We seek no military bases there. It is agonizing for America to lose our young men and women. It is costly and politically difficult to continue this conflict. We would gladly bring every single one of our troops home if we could be confident that there were not violent extremists in Afghanistan and Pakistan determined to kill as many Americans as they possibly can. But that is not yet the case.

That's why we're partnering with a coalition of forty-six countries. And despite the costs involved, America's commitment will not weaken. Indeed, none of us should tolerate these extremists. They have killed in many countries. They have killed people of different faiths more than any other, they have killed Muslims. Their actions are irreconcilable with the rights of human beings, the progress of

nations, and with Islam. The Holy Koran teaches that whoever kills an innocent, it is as if he has killed all mankind; and whoever saves a person, it is as if he has saved all mankind. The enduring faith of over a billion people is so much bigger than the narrow hatred of a few. Islam is not part of the problem in combating violent extremism – it is an important part of promoting peace.

We also know that military power alone is not going to solve the problems in Afghanistan and Pakistan. That is why we plan to invest \$1.5 billion each year over the next five years to partner with Pakistanis to build schools and hospitals, roads and businesses, and hundreds of millions to help those who have been displaced. And that is why we are providing more than \$2.8 billion to help Afghans develop their economy and deliver services that people depend upon.

Let me also address the issue of Iraq. Unlike Afghanistan, Iraq was a war of choice that provoked strong differences in my country and around the world. Although I believe that the Iraqi people are ultimately better off without the tyranny of Saddam Hussein, I also believe that events in Iraq have reminded America of the need to use diplomacy and build international consensus to resolve our problems whenever possible. Indeed, we can recall the words of Thomas Jefferson, who said: “I hope that our wisdom will grow with our power, and teach us that the less we use our power the greater it will be.”

Today, America has a dual responsibility: to help Iraq forge a better future – and to leave Iraq to Iraqis. I have made it clear to the Iraqi people that we pursue no bases, and no

claim on their territory or resources. Iraq's sovereignty is its own. That is why I ordered the removal of our combat brigades by next August. That is why we will honor our agreement with Iraq's democratically-elected government to remove combat troops from Iraqi cities by July, and to remove all our troops from Iraq by 2012. We will help Iraq train its Security Forces and develop its economy. But we will support a secure and united Iraq as a partner, and never as a patron.

And finally, just as America can never tolerate violence by extremists, we must never alter our principles. 9/11 was an enormous trauma to our country. The fear and anger that it provoked was understandable, but in some cases, it led us to act contrary to our ideals. We are taking concrete actions to change course. I have unequivocally prohibited the use of torture by the United States, and I have ordered the prison at Guantanamo Bay closed by early next year.

So America will defend itself respectful of the sovereignty of nations and the rule of law. And we will do so in partnership with Muslim communities which are also threatened. The sooner the extremists are isolated and unwelcome in Muslim communities, the sooner we will all be safer.

The second major source of tension that we need to discuss is the situation between Israelis, Palestinians and the Arab world.

America's strong bonds with Israel are well known. This bond is unbreakable. It is based upon cultural and historical

ties, and the recognition that the aspiration for a Jewish homeland is rooted in a tragic history that cannot be denied. Around the world, the Jewish people were persecuted for centuries, and anti-Semitism in Europe culminated in an unprecedented Holocaust. Tomorrow, I will visit Buchenwald, which was part of a network of camps where Jews were enslaved, tortured, shot and gassed to death by the Third Reich. Six million Jews were killed more than the entire Jewish population of Israel today. Denying that fact is baseless, ignorant, and hateful. Threatening Israel with destruction or repeating vile stereotypes about Jews is deeply wrong, and only serves to evoke in the minds of Israelis this most painful of memories while preventing the peace that the people of this region deserve.

On the other hand, it is also undeniable that the Palestinian people Muslims and Christians have suffered in pursuit of a homeland. For more than sixty years they have endured the pain of dislocation. Many wait in refugee camps in the West Bank, Gaza, and neighboring lands for a life of peace and security that they have never been able to lead. They endure the daily humiliations large and small that come with occupation. So let there be no doubt: the situation for the Palestinian people is intolerable. America will not turn our backs on the legitimate Palestinian aspiration for dignity, opportunity, and a state of their own.

For decades, there has been a stalemate: two peoples with legitimate aspirations, each with a painful history that makes compromise elusive. It is easy to point fingers for Palestinians to point to the displacement brought by Israel's founding, and

for Israelis to point to the constant hostility and attacks throughout its history from within its borders as well as beyond. But if we see this conflict only from one side or the other, then we will be blind to the truth: the only resolution is for the aspirations of both sides to be met through two states, where Israelis and Palestinians each live in peace and security.

That is in Israel's interest, Palestine's interest, America's interest, and the world's interest. That is why I intend to personally pursue this outcome with all the patience that the task requires. The obligations that the parties have agreed to under the Road Map are clear. For peace to come, it is time for them and all of us to live up to our responsibilities.

Palestinians must abandon violence. Resistance through violence and killing is wrong and does not succeed. For centuries, black people in America suffered the lash of the whip as slaves and the humiliation of segregation. But it was not violence that won full and equal rights. It was a peaceful and determined insistence upon the ideals at the center of America's founding. This same story can be told by people from South Africa to South Asia; from Eastern Europe to Indonesia. It's a story with a simple truth: that violence is a dead end. It is a sign of neither courage nor power to shoot rockets at sleeping children, or to blow up old women on a bus. That is not how moral authority is claimed; that is how it is surrendered.

Now is the time for Palestinians to focus on what they can build. The Palestinian Authority must develop its capacity to govern, with institutions that serve the needs of its people.

Hamas does have support among some Palestinians, but they also have responsibilities. To play a role in fulfilling Palestinian aspirations, and to unify the Palestinian people, Hamas must put an end to violence, recognize past agreements, and recognize Israel's right to exist.

At the same time, Israelis must acknowledge that just as Israel's right to exist cannot be denied, neither can Palestine's. The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. This construction violates previous agreements and undermines efforts to achieve peace. It is time for these settlements to stop.

Israel must also live up to its obligations to ensure that Palestinians can live, and work, and develop their society. And just as it devastates Palestinian families, the continuing humanitarian crisis in Gaza does not serve Israel's security; neither does the continuing lack of opportunity in the West Bank. Progress in the daily lives of the Palestinian people must be part of a road to peace, and Israel must take concrete steps to enable such progress.

Finally, the Arab States must recognize that the Arab Peace Initiative was an important beginning, but not the end of their responsibilities. The Arab-Israeli conflict should no longer be used to distract the people of Arab nations from other problems. Instead, it must be a cause for action to help the Palestinian people develop the institutions that will sustain their state; to recognize Israel's legitimacy; and to choose progress over a self-defeating focus on the past.

America will align our policies with those who pursue peace, and say in public what we say in private to Israelis and

Palestinians and Arabs. We cannot impose peace. But privately, many Muslims recognize that Israel will not go away. Likewise, many Israelis recognize the need for a Palestinian state. It is time for us to act on what everyone knows to be true.

Too many tears have flowed. Too much blood has been shed. All of us have a responsibility to work for the day when the mothers of Israelis and Palestinians can see their children grow up without fear; when the Holy Land of three great faiths is the place of peace that God intended it to be; when Jerusalem is a secure and lasting home for Jews and Christians and Muslims, and a place for all of the children of Abraham to mingle peacefully together as in the story of Isra, when Moses, Jesus, and Mohammed (peace be upon them) joined in prayer.

The third source of tension is our shared interest in the rights and responsibilities of nations on nuclear weapons. This issue has been a source of tension between the United States and the Islamic Republic of Iran. For many years, Iran has defined itself in part by its opposition to my country, and there is indeed a tumultuous history between us. In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically-elected Iranian government. Since the Islamic Revolution, Iran has played a role in acts of hostage-taking and violence against U.S. troops and civilians. This history is well known. Rather than remain trapped in the past, I have made it clear to Iran's leaders and people that my country is prepared to move forward. The question, now, is

not what Iran is against, but rather what future it wants to build.

It will be hard to overcome decades of mistrust, but we will proceed with courage, rectitude and resolve. There will be many issues to discuss between our two countries, and we are willing to move forward without preconditions on the basis of mutual respect. But it is clear to all concerned that when it comes to nuclear weapons, we have reached a decisive point. This is not simply about America's interests. It is about preventing a nuclear arms race in the Middle East that could lead this region and the world down a hugely dangerous path.

I understand those who protest that some countries have weapons that others do not. No single nation should pick and choose which nations hold nuclear weapons. That is why I strongly reaffirmed America's commitment to seek a world in which no nations hold nuclear weapons. And any nation – including Iran – should have the right to access peaceful nuclear power if it complies with its responsibilities under the nuclear Non-Proliferation Treaty. That commitment is at the core of the Treaty, and it must be kept for all who fully abide by it. And I am hopeful that all countries in the region can share in this goal.

The fourth issue that I will address is democracy. I know there has been controversy about the promotion of democracy in recent years, and much of this controversy is connected to the war in Iraq. So let me be clear: no system of government can or should be imposed upon one nation by any other.

That does not lessen my commitment, however, to governments that reflect the will of the people. Each nation gives life to this principle in its own way, grounded in the traditions of its own people. America does not presume to know what is best for everyone, just as we would not presume to pick the outcome of a peaceful election. But I do have an unyielding belief that all people yearn for certain things: the ability to speak your mind and have a say in how you are governed; confidence in the rule of law and the equal administration of justice; government that is transparent and doesn't steal from the people; the freedom to live as you choose. Those are not just American ideas, they are human rights, and that is why we will support them everywhere.

There is no straight line to realize this promise. But this much is clear: governments that protect these rights are ultimately more stable, successful and secure. Suppressing ideas never succeeds in making them go away. America respects the right of all peaceful and law-abiding voices to be heard around the world, even if we disagree with them. And we will welcome all elected, peaceful governments provided they govern with respect for all their people.

This last point is important because there are some who advocate for democracy only when they are out of power; once in power, they are ruthless in suppressing the rights of others. No matter where it takes hold, government of the people and by the people sets a single standard for all who hold power: you must maintain your power through consent, not coercion; you must respect the rights of minorities, and participate with a spirit of tolerance and compromise; you

must place the interests of your people and the legitimate workings of the political process above your party. Without these ingredients, elections alone do not make true democracy.

The fifth issue that we must address together is religious freedom. Islam has a proud tradition of tolerance. We see it in the history of Andalusia and Cordoba during the Inquisition. I saw it firsthand as a child in **Indonesia**, where devout Christians worshiped freely in an overwhelmingly Muslim country. That is the spirit we need today. People in every country should be free to choose and live their faith based upon the persuasion of the mind, heart, and soul. This tolerance is essential for religion to thrive, but it is being challenged in many different ways.

Among some Muslims, there is a disturbing tendency to measure one's own faith by the rejection of another's. The richness of religious diversity must be upheld – whether it is for Maronites in Lebanon or the Copts in Egypt. And fault lines must be closed among Muslims as well, as the divisions between Sunni and Shia have led to tragic violence, particularly in Iraq.

Freedom of religion is central to the ability of peoples to live together. We must always examine the ways in which we protect it. For instance, in the United States, rules on charitable giving have made it harder for Muslims to fulfill their religious obligation. That is why I am committed to working with American Muslims to ensure that they can fulfill zakat.

Likewise, it is important for Western countries to avoid impeding Muslim citizens from practicing religion as they see fit for instance, by dictating what clothes a Muslim woman should wear. We cannot disguise hostility towards any religion behind the pretence of liberalism.

Indeed, faith should bring us together. That is why we are forging service projects in America that bring together Christians, Muslims, and Jews. That is why we welcome efforts like Saudi Arabian King Abdullah's Interfaith dialogue and Turkey's leadership in the Alliance of Civilizations. Around the world, we can turn dialogue into Interfaith service, so bridges between peoples lead to action whether it is combating malaria in Africa, or providing relief after a natural disaster.

The sixth issue that I want to address is women's rights. I know there is debate about this issue. I reject the view of some in the West that a woman who chooses to cover her hair is somehow less equal, but I do believe that a woman who is denied an education is denied equality. And it is no coincidence that countries where women are well-educated are far more likely to be prosperous.

Now let me be clear: issues of women's equality are by no means simply an issue for Islam. In Turkey, Pakistan, Bangladesh and **Indonesia**, we have seen Muslim-majority countries elect a woman to lead. Meanwhile, the struggle for women's equality continues in many aspects of American life, and in countries around the world.

Our daughters can contribute just as much to society as our sons, and our common prosperity will be advanced by

allowing all humanity men and women to reach their full potential. I do not believe that women must make the same choices as men in order to be equal, and I respect those women who choose to live their lives in traditional roles. But it should be their choice. That is why the United States will partner with any Muslim-majority country to support expanded literacy for girls, and to help young women pursue employment through micro-financing that helps people live their dreams.

Finally, I want to discuss economic development and opportunity.

I know that for many, the face of globalization is contradictory. The Internet and television can bring knowledge and information, but also offensive sexuality and mindless violence. Trade can bring new wealth and opportunities, but also huge disruptions and changing communities. In all nations including my own this change can bring fear. Fear that because of modernity we will lose of control over our economic choices, our politics, and most importantly our identities – those things we most cherish about our communities, our families, our traditions, and our faith.

But I also know that human progress cannot be denied. There need not be contradiction between development and tradition. Countries like Japan and South Korea grew their economies while maintaining distinct cultures. The same is true for the astonishing progress within Muslim-majority countries from Kuala Lumpur to Dubai. In ancient times and

in our times, Muslim communities have been at the forefront of innovation and education.

This is important because no development strategy can be based only upon what comes out of the ground, nor can it be sustained while young people are out of work. Many Gulf States have enjoyed great wealth as a consequence of oil, and some are beginning to focus it on broader development. But all of us must recognize that education and innovation will be the currency of the 21st century, and in too many Muslim communities there remains underinvestment in these areas. I am emphasizing such investments within my country. And while America in the past has focused on oil and gas in this part of the world, we now seek a broader engagement.

On education, we will expand exchange programs, and increase scholarships, like the one that brought my father to America, while encouraging more Americans to study in Muslim communities. And we will match promising Muslim students with internships in America; invest in on-line learning for teachers and children around the world; and create a new online network, so a teenager in Kansas can communicate instantly with a teenager in Cairo.

On economic development, we will create a new corps of business volunteers to partner with counterparts in Muslim-majority countries. And I will host a Summit on Entrepreneurship this year to identify how we can deepen ties between business leaders, foundations and social entrepreneurs in the United States and Muslim communities around the world.

On science and technology, we will launch a new fund to support technological development in Muslim-majority countries, and to help transfer ideas to the marketplace so they can create jobs. We will open centers of scientific excellence in Africa, the Middle East and Southeast Asia, and appoint new Science Envoys to collaborate on programs that develop new sources of energy, create green jobs, digitize records, clean water, and grow new crops. And today I am announcing a new global effort with the Organization of the Islamic Conference to eradicate polio. And we will also expand partnerships with Muslim communities to promote child and maternal health.

All these things must be done in partnership. Americans are ready to join with citizens and governments; community organizations, religious leaders, and businesses in Muslim communities around the world to help our people pursue a better life.

The issues that I have described will not be easy to address. But we have a responsibility to join together on behalf of the world we seek a world where extremists no longer threaten our people, and American troops have come home; a world where Israelis and Palestinians are each secure in a state of their own, and nuclear energy is used for peaceful purposes; a world where governments serve their citizens, and the rights of all God's children are respected. Those are mutual interests. That is the world we seek. But we can only achieve it together.

I know there are many Muslim and non-Muslim who question whether we can forge this new beginning. Some are

eager to stoke the flames of division, and to stand in the way of progress. Some suggest that it isn't worth the effort that we are fated to disagree, and civilizations are doomed to clash. Many more are simply skeptical that real change can occur. There is so much fear, so much mistrust. But if we choose to be bound by the past, we will never move forward. And I want to particularly say this to young people of every faith, in every country you, more than anyone, have the ability to remake this world.

All of us share this world for but a brief moment in time. The question is whether we spend that time focused on what pushes us apart, or whether we commit ourselves to an effort a sustained effort to find common ground, to focus on the future we seek for our children, and to respect the dignity of all human beings.

It is easier to start wars than to end them. It is easier to blame others than to look inward; to see what is different about someone than to find the things we share. But we should choose the right path, not just the easy path. There is also one rule that lies at the heart of every religion – that we do unto others as we would have them do unto us. This truth transcends nations and peoples – a belief that isn't new; that isn't black or white or brown; that isn't Christian, or Muslim or Jew. It's a belief that pulsed in the cradle of civilization, and that still beats in the heart of billions. It's a faith in other people, and it's what brought me here today.

We have the power to make the world we seek, but only if we have the courage to make a new beginning, keeping in mind what has been written.

The Holy Koran tells us, “O mankind! We have created you male and a female; and we have made you into nations and tribes so that you may know one another.”

The Talmud tells us: “The whole of the Torah is for the purpose of promoting peace.”

The Holy Bible tells us, “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.”

The people of the world can live together in peace. We know that is God’s vision. Now, that must be our work here on Earth. Thank you. And may God’s peace be upon you.

Terima kasih. Selamat siang. Saya merasa terhormat berada di kota Kairo yang tak lekang oleh waktu, dan dijamu oleh dua institusi yang luar biasa. Selama lebih seribu tahun, Al Azhar telah menjadi ujung tombak pembelajaran Islam, dan selama lebih seabad, Universitas Kairo telah menjadi sumber kemajuan Mesir. Bersama, anda mewakili keselarasan antara tradisi dan kemajuan. Saya berterima kasih atas keramahan anda, dan keramahan rakyat Mesir. Saya juga bangga membawa niat baik rakyat Amerika, dan menyampaikan salam perdamaian dari warga muslim di negara saya: “assalamu`alaikum”.

Kita bertemu pada saat ada ketegangan besar antara Amerika Serikat dan warga Muslim seluruh dunia – ketegangan yang berakar pada gerak sejarah yang melampaui setiap perdebatan kebijakan yang kini berlangsung. Hubungan antara Islam dan Barat selama berabad-abad mencakup koeksistensi dan kerja sama, tapi juga konflik dan peperangan bernuansa agama. Akhir-akhir ini, ketegangan muncul akibat kolonialisme yang menyangkal hak dan peluang bagi banyak

warga Muslim, serta Perang Dingin yang membuat banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim diperlakukan sebagai boneka dengan mengabaikan aspirasi mereka. Lebih jauh lagi, perubahan besar yang diusung oleh modernitas dan globalisasi membuat kalangan Muslim menilai Barat bersikap memusuhi Islam.

Kelompok ekstrimis garis keras telah mengeksploitasi hubungan yang tegang itu, jumlah mereka kecil namun memiliki potensi di kalangan Muslim. Serangan pada 11 September 2001 dan upaya berkelanjutan dari kalangan ekstrimis ini untuk menyerang warga sipil telah membuat sebagian kalangan di negara saya menilai Islam bukan cuma memusuhi Amerika dan negara Barat, melainkan juga hak asasi manusia. Semua ini semakin memupuk rasa takut dan saling tidak percaya.

Selama hubungan Barat dan Islam ditentukan oleh perbedaan-perbedaan, kita akan memperkuat mereka yang menyebarkan kebencian ketimbang perdamaian, serta memperkuat mereka yang mempromosikan konflik ketimbang kerja sama yang dapat membantu rakyat mencapai keadilan dan kemakmuran. Lingkaran kecurigaan dan permusuhan ini harus kita akhiri.

Saya datang ke Kairo untuk mengupayakan awal baru antara Amerika Serikat dan Muslim diseluruh dunia, berdasarkan kepentingan bersama dan rasa saling menghormati dan berlandaskan pada kenyataan bahwa Amerika dan Islam tidaklah eksklusif satu sama lain, dan tidak perlu bersaing. Kedua pihak bertemu dan berbagi

prinsip yang sama yaitu prinsip-prinsip keadilan dan kemajuan; toleransi dan martabat semua umat manusia.

Saya menyadari perubahan tidak dapat terjadi dalam semalam. Saya tahu banyak harapan terhadap pidato ini, tetapi satu pidato tidak akan mampu menghapus rasa curiga yang terpupuk selama bertahun-tahun, dan dalam waktu singkat siang ini saya juga tidak akan mampu menjawab semua pertanyaan rumit yang membawa kita ke titik ini. Tapi saya percaya bahwa agar bisa melangkah maju, kita harus secara terbuka mengatakan kepada satu sama lain hal-hal yang ada dalam hati kita, dan yang seringkali hanya diungkapkan di belakang pintu tertutup. Harus ada upaya terus menerus untuk mendengarkan satu sama lain; saling belajar satu sama lain; saling menghormati, dan mencari persamaan. Sebagaimana kitab suci Al Qur'an mengatakan, "Ingatlah kepada Allah dan bicaralah selalu tentang kebenaran." Ini yang akan saya lakukan hari ini berbicara tentang kebenaran sesuai kemampuan saya, dengan rendah hati oleh tugas di depan kita, dan dengan keyakinan bahwa kepentingan bersama yang kita miliki sebagai umat manusia jauh lebih kuat daripada kekuatan-kekuatan yang memisahkan kita.

Sebagian dari keyakinan ini berakar dari pengalaman saya pribadi. Saya penganut Kristiani, tapi ayah saya berasal dari Kenya yang turun temurun penganut Muslim. Saat kecil, saya tinggal di Indonesia beberapa tahun dan mendengar lantunan adzan subuh dan maghrib. Ketika muda, saya bekerja di komunitas-komunitas kota Chicago yang banyak anggotanya menemukan martabat dan kedamaian dalam keimanan Islam.

Sebagai pelajar sejarah, saya juga mengetahui peradaban berhutang besar terhadap Islam. Adalah Islam di tempat-tempat seperti Universitas Al-Azhar yang mengusung lentera ilmu selama berabad-abad, dan membuka jalan bagi era Kebangkitan Kembali dan era Pencerahan di Eropa. Adalah inovasi dalam masyarakat Muslim yang mengembangkan urutan aljabar; kompas magnet dan alat navigasi; keahlian dalam menggunakan pena dan percetakan; dan pemahaman mengenai penularan penyakit serta pengobatannya. Budaya Islam telah memberikan kita gerbang-gerbang yang megah dan puncak-puncak menara yang menjunjung tinggi; puisi-puisi yang tak lekang oleh waktu dan musik yang dihargai; kaligrafi yang anggun dan tempat-tempat untuk melakukan kontemplasi secara damai. Dan sepanjang sejarah, Islam telah menunjukkan melalui kata-kata dan perbuatan bahwa toleransi beragama dan persamaan ras adalah hal-hal yang mungkin.

Saya juga tahu bahwa Islam selalu menjadi bagian dari riwayat Amerika. Negara pertama yang mengakui negara saya adalah Maroko. Saat menandatangani Perjanjian Tripoli pada tahun 1796, presiden kedua kami John Adams menulis, "Amerika Serikat tidaklah memiliki karakter bermusuhan dengan hukum, agama, maupun ketentraman umat Muslim." Dan sejak berdirinya negara kami, umat Muslim Amerika telah memperkaya Amerika Serikat. Mereka telah berjuang dalam sejumlah peperangan, bekerja dalam pemerintahan, memperjuangkan hak-hak sipil, mengajar di perguruan-perguruan tinggi kami, unggul dalam arena-arena olah raga kami, memenangkan Hadiah Nobel, membangun gedung-

gedung kami yang tertinggi, dan menyalakan obor Olimpiade. Dan ketika warga Muslim-Amerika pertama terpilih sebagai anggota Kongres belum lama ini, ia mengambil sumpah untuk membela Konstitusi kami dengan menggunakan Al Quran yang disimpan oleh salah satu Bapak Pendiri kami Thomas Jefferson di perpustakaan pribadinya.

Jadi saya mengenal Islam di tiga benua sebelum datang ke kawasan tempat agama ini pertama kali diturunkan. Pengalaman tersebut memandu keyakinan saya bahwa kemitraan antara Amerika dan Islam harus didasarkan pada apakah Islam itu, bukan pada apakah yang bukan Islam. Dan saya menganggap ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk memerangi stereotip negatif tentang Islam di mana pun munculnya.

Tapi prinsip yang sama harus diterapkan pada persepsi tentang Amerika. Seperti halnya umat Muslim tidak sesuai dengan stereotip yang mentah, Amerika juga bukan stereotip mentah tentang sebuah kekaisaran yang memiliki kepentingan sendiri. Amerika Serikat telah menjadi salah satu sumber kemajuan terbesar yang dikenali dunia. Kami lahir akibat revolusi melawan sebuah kekaisaran. Kami berdiri berdasarkan ide bahwa semua orang diciptakan sama, dan kami telah menumpahkan darah dan berjuang selama berabad-abad untuk memberikan arti kepada kata-kata tersebut – di dalam batas negara kami, dan di sekeliling dunia. Kami terbentuk oleh setiap budaya, yang datang dari setiap sudut bumi, dan berdedikasi pada sebuah konsep sederhana: E pluribus unum: “Dari banyak menjadi satu”.

Banyak dikatakan menyangkut fakta bahwa seorang Amerika keturunan Afrika dengan nama Barack Hussein Obama dapat terpilih sebagai presiden. Tapi kisah pribadi saya bukanlah sesuatu yang unik. Mimpi akan kesempatan bagi semua belumlah terwujud bagi setiap orang di Amerika, tapi janji itu diberikan bagi semua yang datang ke pantai kami – termasuk hampir tujuh juta warga Muslim Amerika di negara kami saat ini yang memiliki pendapatan dan pendidikan lebih tinggi dari rata-rata.

Lebih jauh lagi, kebebasan di Amerika tidaklah terpisahkan dari kebebasan menjalankan agama. Itu sebabnya ada masjid di setiap negara bagian di negeri kami, dan ada lebih dari 1200 masjid di dalam batas negara kami. Itu sebabnya pemerintah Amerika telah maju ke pengadilan untuk membela hak wanita dan anak perempuan mengenakan hijab, dan untuk menghukum mereka yang mengingkarinya.

Jadi janganlah ada keraguan: Islam adalah bagian dari Amerika. Dan saya percaya bahwa Amerika memegang kebenaran dalam dirinya bahwa terlepas dari ras, agama, dan posisi dalam hidup, kita semua memiliki aspirasi yang sama – untuk hidup dalam damai dan keamanan; untuk memperoleh pendidikan dan untuk bekerja dengan martabat; untuk mengasihkan keluarga kita, masyarakat kita, dan Tuhan kita. Ini adalah hal-hal yang sama-sama kita yakini. Ini adalah harapan dari semua kemanusiaan.

Tentu saja, mengenali persamaan kemanusiaan merupakan awal dari tugas kita. Justru ini adalah awal. Kata-kata saja tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyat. Kebutuhan baru terpenuhi jika kita bertindak berani di tahun-tahun

mendatang; Dan kita harus bertindak dengan pemahaman bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi adalah tantangan bersama, dan kegagalan kita mengatasinya akan merugikan kita semua.

Karena kita telah belajar dari pengalaman baru-baru ini bahwa ketika sistem keuangan melemah di satu negara, kemakmuran di mana pun ikut dirugikan. Ketika jenis flu baru menulari satu orang, semua terkena risiko. Ketika satu negara membangun senjata nuklir, risiko serangan nuklir bagi semua negara ikut naik. Ketika kelompok ekstrim keras beroperasi di satu rangkaian pegunungan, rakyat di seberang samudera pun ikut menghadapi bahaya. Dan ketika mereka yang tak bersalah di Bosnia dan Darfur dibantai, itu menjadi noda dalam nurani kita bersama. Itulah artinya berbagi dunia di abad ke-21. Inilah tanggung jawab kita kepada satu sama lain sebagai umat manusia.

Dan ini adalah tanggung jawab yang sulit diemban. Karena sejarah manusia telah merekam berbagai bangsa dan suku yang mencoba menaklukkan satu sama lain demi kepentingan sendiri. Tapi di era baru ini, sikap seperti itu justru akan mengalahkan diri sendiri. Karena saling ketergantungan kita, setiap tatanan dunia yang mengangkat satu bangsa atau sekelompok orang lebih tinggi dari yang lain pada akhirnya akan gagal. Jadi apa pun pikiran kita mengenai masa lalu, kita tidak boleh terperangkap olehnya. Masalah-masalah kita harus ditangani dengan kemitraan; kemajuan harus dibagi bersama.

Itu tidak berarti kita tidak mengindahkan sumber-sumber ketegangan. Justru yang disarankan adalah sebaliknya: kita

harus menghadapi ketegangan-ketegangan ini secara langsung. Dan dalam semangat ini, saya akan berbicara sejelas dan seimbang mungkin mengenai isu-isu spesifik yang saya percaya akhirnya harus kita hadapi bersama. Isu pertama yang harus kita hadapi adalah ekstrimisme garis keras dalam semua wujud.

Di Ankara, saya telah menjelaskan bahwa Amerika tidak sedang dan tidak akan pernah berperang dengan Islam. Kami akan, meski demikian, tak lelah-lelahnya melawan kelompok ekstrim keras yang mengancam serius keamanan kami. Karena kami menolak apa yang juga ditolak oleh semua orang beragama: yaitu pembunuhan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersalah. Dan adalah tugas saya yang pertama sebagai Presiden untuk melindungi rakyat Amerika.

Situasi di Afghanistan mendemonstrasikan sasaran-sasaran Amerika dan kebutuhan kita untuk bekerja sama. Lebih tujuh tahun lalu, Amerika Serikat mengejar Al Qaida dan Taliban dengan dukungan internasional yang luas. Kami tidak melakukannya karena ada pilihan, kami melakukannya karena perlu. Saya sadar bahwa sejumlah orang mempertanyakan atau membenarkan peristiwa serangan 11 September. Tapi mari kita perjelas: Al Qaida membunuh hampir 3000 orang pada hari itu. Para korban adalah kaum pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah dari Amerika dan banyak negara lain yang tidak berbuat apa-apa untuk melukai orang lain. Tapi Al Qaida memilih untuk dengan kejam membunuh mereka, mengklaim pujian atas serangan tersebut, dan bahkan sekarang menyatakan tekad mereka untuk membunuh lagi dalam skala sangat besar. Mereka

memiliki kaki tangan di banyak negara dan sedang mencoba untuk memperluas jangkauan mereka. Ini bukan opini yang dapat diperdebatkan; ini adalah fakta yang harus dihadapi.

Janganlah salah paham: kami tidak menginginkan tentara kami di Afghanistan. Kami tidak berencana mendirikan basis militer di sana. Sangat menyakitkan bagi Amerika untuk kehilangan nyawa banyak warga pria dan wanita kami. Adalah mahal dan sulit secara politik untuk melanjutkan konflik ini. Kami dengan senang hati akan memulangkan setiap tentara kami jika kami bisa yakin bahwa tidak ada kaum ekstrimis keras di Afghanistan dan Pakistan yang bertekad membunuh sebanyak mungkin orang Amerika sebisa mereka. Tetapi hal itu tidak bukanlah kenyataan yang ada sekarang. Itulah sebabnya kami bermitra dengan koalisi 46 negara. Dan meksi biayanya besar, niat Amerika tidak akan melemah. Tak satu pun dari kita yang seharusnya mentoleransi kaum ekstrimis seperti ini. Mereka telah membunuh di banyak negara. Mereka telah membunuh orang dari beragam agama lebih dari yang lain, mereka telah membunuh umat Muslim. Tindakan-tindakan mereka sangat bertentangan dengan hak umat manusia, kemajuan bangsa-bangsa, dan dengan Islam. Kitab suci Al Quran mengajarkan bahwa siapa yang membunuh orang tak bersalah, maka ia seperti telah membunuh semua umat manusia; dan siapa yang menyelamatkan satu orang; maka ia telah menyelamatkan semua umat manusia. Iman indah yang diyakini oleh lebih semiliar orang sungguh lebih besar daripada kebencian sempit sekelompok orang. Islam bukanlah bagian dari masalah dalam

memerangi ekstrimisme keras Islam haruslah menjadi bagian penting dari penggalakan perdamaian.

Kami juga tahu bahwa kekuatan militer saja tidak akan memecahkan masalah di Afghanistan dan Pakistan. Itu sebabnya kami berencana untuk menanam investasi sebesar 1,5 miliar dolar setiap tahun selama lima tahun ke depan untuk bermitra dengan warga Pakistan membangun sekolah, rumah sakit, jalan-jalan, dan usaha, dan ratusan juta untuk membantu mereka yang telah kehilangan tempat tinggal. Dan itu sebabnya kami menyediakan lebih dari 2.8 miliar dolar untuk membantu rakyat Afghanistan membangun ekonomi mereka dan menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Kini saya akan berbicara tentang masalah Irak. Tidak seperti Afghanistan, Irak adalah perang karena pilihan yang telah menimbulkan perbedaan-perbedaan kuat di negara saya dan di dunia. Meski saya percaya bahwa rakyat Irak pada akhirnya lebih baik tanpa tirani Saddam Hussein, saya juga percaya bahwa peristiwa-peristiwa di Irak telah mengingatkan Amerika tentang perlunya menggunakan diplomasi dan membangun konsensus untuk mengatasi masalah-masalah kita kapan pun memungkinkan. Kita bahkan dapat mengingat kata-kata salah satu presiden terbesar kami, Thomas Jefferson, yang mengatakan: “Saya berharap kebijakan kita akan bertambah sejalan dengan kekuatan kita, dan mengajarkan kita bahwa semakin sedikit kita menggunakan kekuatan, justru semakin besar kekuatan itu.”

Hari ini Amerika memiliki dua tanggung jawab: yaitu untuk membantu Irak membangun masa depan yang lebih

baik, dan untuk menyerahkan Irak ke tangan rakyat Irak. Saya telah menjelaskan kepada warga Irak bahwa kami tidak berencana mendirikan basis di sana, dan tidak mengklaim baik teritori maupun sumber daya mereka. Kedaulatan Irak ada di tangan mereka sendiri. Itu sebabnya saya memerintahkan pencabutan brigade-brigade tempur kami sampai bulan Agustus mendatang. Itu sebabnya kami akan menghormati kesepakatan kami dengan pemerintah Irak yang terpilih secara demokratis untuk menarik pasukan tempur dari kota-kota Irak pada Juli mendatang, dan untuk memulangkan semua tentara kami dari Irak pada tahun 2012. Kami akan membantu Irak melatih Tentara Keamanan dan membangun ekonominya. Tapi kami akan mendukung Irak yang aman dan bersatu sebagai mitra, dan tidak pernah sebagai pelindung.

Dan akhirnya, seperti halnya Amerika tidak pernah bisa mentoleransi kekerasan oleh kaum ekstrimis, kami tidak pernah boleh mengompromikan prinsip-prinsip kami. Serangan 11 September adalah trauma besar bagi negara kami. Rasa takut dan marah yang muncul karenanya bisa dipahami, tapi dalam sejumlah kasus, itu telah membuat kami bertindak berlawanan dengan pemikiran-pemikiran kami. Kami sedang mengambil langkah-langkah konkret untuk mengubah arah. Saya telah sepenuhnya melarang praktik penyiksaan oleh Amerika Serikat, dan saya telah memerintahkan penutupan penjara di Teluk Guantanamo awal tahun depan.

Jadi Amerika akan membela diri, dengan menghormati kedaulatan bangsa-bangsa dan aturan hukum. Dan kami akan melakukannya dalam kemitraan dengan masyarakat-

masyarakat Muslim yang juga terancam. Semakin cepat kaum ekstrimis diisolasi dan diusir dari dalam masyarakat-masyarakat Muslim, semakin cepat kita semua akan menjadi selamat.

Sumber ketegangan besar yang kedua yang perlu kita diskusikan adalah situasi antara warga Israel, Palestina, dan dunia Arab.

Ikatan yang kuat antara Amerika dan Israel telah banyak diketahui. Ikatan ini tidak dapat dipatahkan. Ini lahir berdasarkan ikatan budaya dan sejarah, serta pengakuan bahwa aspirasi atas sebuah tanah air Yahudi berakar dari sebuah sejarah tragis yang tidak bisa diingkari.

Di seantero dunia, kaum Yahudi telah ditindas selama berabad-abad, dan anti-Semitisme di Eropa memuncak dalam peristiwa Holocaust yang tidak pernah ada sebelumnya. Besok saya akan mengunjungi Buchenwald yang menjadi bagian dari jaringan kamp-kamp tempat kaum Yahudi diperbudak, disiksa, ditembak, dan digas hingga tewas oleh Third Reich. Enam juta orang Yahudi terbunuh lebih banyak dari seluruh populasi Yahudi di Israel hari ini. Mengingkari fakta tersebut adalah tidak berdasar, bodoh, dan penuh kebencian. Mengancam Israel dengan penghancuran atau mengulangi stereotip keji tentang umat Yahudi sungguh sangat salah dan hanya akan membangkitkan kembali ingatan yang terperih di benak umat Yahudi sembari mencegah perdamaian yang patut dimiliki rakyat di kawasan ini.

Di sisi lain, tidak bisa diingkari bahwa rakyat Palestina baik yang Muslim maupun yang Kristen telah menderita dalam perjuangan memperoleh tanah air. Lebih dari enam

puluh tahun, mereka telah merasakan sakitnya tidak memiliki tempat tinggal. Banyak yang menunggu di kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat, Gaza, dan tanah-tanah tetangga untuk sebuah kehidupan yang damai dan aman yang belum pernah mereka jalani. Mereka menerima hinaan setiap hari besar dan kecil yang hadir bersama pendudukan. Jadi janganlah ada keraguan: situasi yang dihadapi rakyat Palestina tidaklah dapat ditoleransi. Amerika tidak akan bersikap tidak acuh terhadap aspirasi sah Palestina atas martabat, kesempatan, dan sebuah negara milik mereka sendiri.

Selama beberapa dekade, yang ada hanyalah jalan buntu: Dua rakyat dengan aspirasi yang sah, masing-masing memiliki sejarah menyakitkan yang membuat kompromi sulit dilakukan. Adalah mudah untuk menuding – rakyat Palestina menuding hilangnya tempat tinggal akibat berdirinya negara Israel, dan rakyat Israel menuding permusuhan yang terus menerus dan serangan dari dalam batas negaranya sendiri dan dari luar sepanjang sejarah negara tersebut. Tapi jika kita melihat konflik ini hanya dari satu sisi mana pun, maka kita akan dibutakan dari kebenaran: satu-satunya resolusi adalah aspirasi kedua pihak diwujudkan melalui dua negara, di mana rakyat Israel dan Palestina masing-masing hidup dalam damai dan keamanan. (tepuk tangan)

Ini adalah kepentingan Israel, kepentingan Palestina, dan kepentingan Amerika. Itu sebabnya saya berniat untuk secara pribadi mengejar hasil ini, dengan segala kesabaran yang dituntut oleh tugas ini. (tepuk tangan) Kewajiban-kewajiban yang telah disepakati pihak-pihak menurut Peta Jalan telah

jelas. Supaya perdamaian terwujud, waktunya bagi mereka dan bagi kita semua untuk melakukan tanggung jawab kita. Warga Palestina harus meninggalkan kekerasan. Perlawanan lewat kekerasan dan pembunuhan adalah salah dan tidak akan berhasil. Selama berabad-abad, rakyat kulit hitam di Amerika menderita hentakan pecut sebagai budak dan penghinaan akibat pemisahan berdasarkan warna kulit. Tetapi bukan kekerasan yang memenangkan hak-hak persamaan sepenuhnya. Sebuah tuntutan damai namun penuh tekad bagi realisasi kondisi ideal yang merupakan inti dari pendirian Amerika. Kisah sama ini juga diceritakan oleh rakyat mulai dari Afrika Selatan sampai Asia Selatan; dari Eropa Timur sampai Indonesia. Sebuah kisah yang mengandung kebenaran yang sederhana: bahwa kekerasan merupakan sebuah jalan buntu. Bukanlah sebuah tanda keberanian atau kekuasaan kalau menembak roket ke anak-anak yang sedang tidur, atau meledakkan perempuan tua di dalam bis. Itu bukanlah cara untuk mengklaim moralitas; namun itu merupakan cara untuk menghilangkannya.

Kini waktunya untuk warga Palestina memusatkan perhatian kepada apa yang bisa mereka bangun. Penguasa Palestina harus mengembangkan kemampuan untuk memerintah, dengan institusi yang melayani kebutuhan rakyatnya. Hamas memiliki dukungan di sebagian kalangan rakyat Palestina, tetapi mereka juga punya tanggung jawab. Guna memainkan peran yang memenuhi aspirasi rakyat Palestina, dan untuk mempersatukan rakyat Palestina, Hamas harus mengakhiri kekerasan, menghormati persetujuan di masa lalu dan mengakui hak eksistensi Israel.

Secara bersamaan, rakyat Israel harus mengakui bahwa sebagaimana hak Israel untuk eksis tidak bisa dibantah, demikian pula halnya dengan hak Palestina. Amerika Serikat tidak menerima keabsahan dari mereka yang berniat melenyapkan Israel ke dalam laut, tetapi kami juga tidak menerima keabsahan dari penerusan pembangunan pemukiman (tepu tangan) Yahudi. Pekerjaan konstruksi ini melanggar persetujuan sebelumnya dan melemahkan usaha mencapai perdamaian. Sudah tiba waktunya pembangunan pemukiman ini dihentikan. (tepu tangan)

Israel harus memenuhi kewajibannya untuk memastikan rakyat Palestina bisa hidup dan bekerja serta membangun masyarakat mereka. Selain menghancurkan banyak keluarga Palestina, terus berlangsungnya krisis kemanusiaan di Gaza juga tidak memperkuat keamanan Israel; begitu pula halnya dengan terus berlangsungnya kelangkaan peluang di Tepi Barat. Kemajuan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Palestina harus menjadi bagian dari peta jalan menuju perdamaian, dan Israel harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk memberdayakan kemajuan semacam itu.

Akhirnya, Negara-Negara Arab harus menyadari bahwa Inisiatif Perdamaian Arab merupakan awal yang penting, tetapi bukan akhir dari tanggung jawab mereka. Konflik Arab Israel tidak bisa lagi dipakai untuk mengalihkan perhatian rakyat negara-negara Arab dari masalah-masalah lainnya. Sebaliknya, konflik itu harus menjadi penggerak untuk membantu rakyat Palestina mengembangkan institusi yang akan melanggengkan negara mereka; mengakui hak Israel;

serta memilih kemajuan ketimbang fokus pada masa lalu yang begitu melemahkan.

Amerika akan menyesuaikan kebijakannya dengan mereka yang memperjuangkan perdamaian dan mengatakan secara terbuka apa yang kami katakan secara pribadi kepada warga Israel, Palestina, dan Negara-Negara Arab. (tepu tangan) Kita tidak bisa memaksakan perdamaian. Tetapi secara pribadi, banyak orang Muslim menyadari bahwa Israel tidak akan lenyap; juga banyak orang Israel menyadari perlunya kehadiran sebuah negara Palestina. Waktunya sudah tiba bagi kita untuk bertindak berdasarkan apa yang oleh setiap orang diketahui merupakan hal yang benar.

Terlalu banyak air mata sudah diteteskan. Terlalu banyak darah sudah ditumpahkan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk berjuang menciptakan sebuah masa dimana para ibu Israel dan Palestina bisa menyaksikan anak-anak mereka tumbuh tanpa ketakutan; masa dimana Tanah Suci dari ketiga agama besar merupakan tempat perdamaian yang diinginkan Allah; masa dimana Jerusalem merupakan tempat tinggal aman dan langgeng bagi orang Yahudi dan Kristen dan Muslim, dan merupakan sebuah tempat untuk semua keturunan Abraham hidup bersama secara damai sebagaimana dikisahkan dalam ISRA, ketika Musa, Yesus dan Muhammad (damai bersama mereka) bergabung dalam ibadah doa. (tepu tangan)

Sumber ketegangan ketiga adalah kepentingan kita bersama sehubungan hak-hak dan tanggung jawab negara-negara atas senjata nuklir.

Isu ini menjadi sumber ketegangan baru-baru ini antara Amerika dan Republik Islam Iran. Selama bertahun-tahun, Iran mendefinisikan dirinya sebagian lewat oposisinya terhadap negara saya, dan memang ada sejarah yang kacau di antara kami. Di tengah-tengah Perang Dingin, Amerika memainkan peran dalam penggulingan pemerintah Iran yang terpilih secara demokratis. Sejak Revolusi Islam, Iran telah memainkan peran dalam tindak penyanderaan dan kekerasan terhadap pasukan dan warga sipil Amerika. Sejarah ini diketahui secara luas. Daripada terperangkap dalam masa lalu, saya telah menjelaskan kepada para pemimpin dan rakyat Iran bahwa negara saya siap untuk melangkah maju. Pertanyaannya kini, bukanlah apa yang ditentang Iran, tetapi masa depan apa yang ingin dibangunnya.

Sulit untuk mengatasi puluhan tahun ketidakpercayaan, tetapi kami akan maju dengan keberanian, kebenaran dan tekad. Banyak isu yang harus dibahas oleh kedua negara kita, dan kami siap melangkah maju tanpa prasyarat namun didasarkan pada sikap saling menghormati. Tetapi jelas bagi semua pihak yang berkepentingan bahwa dalam soal senjata nuklir kita telah mencapai titik yang menentukan. Ini bukan sekedar terkait kepentingan Amerika, ini berhubungan dengan pencegahan perlombaan senjata nuklir yang bisa menyebabkan wilayah ini terjerumus ke dalam jalur sangat berbahaya dan menghancurkan tatanan non-proliferasi global. Saya memahami mereka yang memprotes bahwa beberapa negara memiliki senjata sementara yang lainnya tidak. Tak satupun negara bisa menentukan negara-negara mana yang boleh memiliki senjata nuklir. Itulah sebabnya saya secara

kuat mempertegas komitmen Amerika untuk mengusahakan sebuah dunia di mana tak satu pun negara memiliki senjata nuklir. (tepuk tangan) Dan setiap negara termasuk Iran harus punya akses ke energi nuklir untuk tujuan damai apabila ia patuh pada tanggung jawabnya dibawah Persetujuan Non-Proliferasi Nuklir. Komitmen itu merupakan inti dari Persetujuan itu, dan harus diberikan kepada semua pihak yang mematuhinya.

Isu keempat yang akan saya tanggapi adalah demokrasi. Saya percaya pada sebuah sistem pemerintahan yang memberi hak bersuara kepada rakyatnya, dan yang menghormati penegakan hukum serta hak untuk semua manusia. Saya tahu bahwa ada kontroversi tentang penggalakkan demokrasi dalam tahun-tahun terakhir ini, dan sebagian dari kontroversi ini terkait dengan perang di Irak. Saya perjelas: sistem pemerintahan apa pun tidak bisa dipaksakan kepada sebuah negara oleh negara lainnya.

Tetapi hal itu tidak mengurangi komitmen saya kepada negara-negara yang mencerminkan keinginan rakyatnya. Setiap negara menghidupkan prinsip-prinsipnya dengan caranya sendiri, yang berasal dari tradisi rakyatnya. Amerika tidak berpretensi tahu apa yang terbaik untuk semua orang, sebagaimana juga kami tidak berpretensi bahwa kami bisa menentukan hasil dari sebuah pemilihan damai. Tetapi saya memiliki keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa semua orang merindukan hal-hal tertentu: Kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dan ikut menentukan bagaimana bentuk pemerintahan; mempercayai penegakan hukum dan penyelenggaraan keadilan yang sama untuk setiap orang;

pemerintahan yang transparan dan tidak mencuri dari rakyatnya; kebebasan untuk hidup sesuai pilihan masing-masing. Itu bukan sekedar ide-ide Amerika, itu adalah hak asasi manusia dan oleh karena itu kami akan mendukungnya di mana saja. Tak ada garis lurus untuk menciptakan janji itu. Tetapi yang jelas adalah: pemerintahan-pemerintahan yang melindungi hak-hak ini pada akhirnya akan lebih stabil, sukses dan aman.

Tak ada garis lurus untuk menciptakan janji itu. Tetapi yang jelas adalah: Memberangus ide-ide tidak pernah berhasil melenyapkannya. Amerika menghormati hak-hak dari semua suara damai dan patuh hukum agar didengar di seluruh dunia meskipun kita tidak sepakat dengan mereka. Dan kami menyambut gembira semua pemerintahan terpilih dan damai asalkan mereka memerintah dengan menghormati rakyatnya. Dimanapun kekuasaan itu berada, pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat merupakan standar tunggal untuk semua pihak yang memegang kekuasaan.

Butir ini penting karena ada yang memperjuangkan demokrasi hanya pada saat mereka tidak berkuasa; setelah berkuasa, mereka secara keji memberangus hak-hak orang lain. (tepuk tangan) Di manapun kekuasaan itu berada, pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat merupakan standar tunggal untuk semua pihak yang memegang kekuasaan. anda harus mempertahankan kekuasaan lewat konsensus, bukan pemaksaan; anda harus menghormati hak-hak minoritas, dan berpartisipasi dalam semangat toleransi dan kompromi, anda harus mendahulukan kepentingan rakyat anda dan usaha sah dari proses politik di atas kepentingan partai. Tanpa ramuan

ini pemilihan saja tidak akan menciptakan demokrasi yang murni.

Isu kelima yang harus kita tanggapi bersama adalah kebebasan beragama. Islam memiliki sebuah tradisi toleransi yang patut dibanggakan. Kita menyaksikan hal ini dalam sejarah Andalusia dan Kordoba. Saya menyaksikan hal itu langsung ketika masih kanak-kanak di Indonesia, di mana warga Kristen yang saleh bebas beribadah di sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Itulah semangat yang kita butuhkan kini. Orang di setiap negara harus bebas memilih dan menjalankan keyakinan mereka berdasarkan keyakinan pikiran, hati dan jiwa. Toleransi ini penting agar agama bisa berkembang, tetapi juga ditantang dengan berbagai cara.

Di kalangan Muslim tertentu ada kecenderungan yang merisaukan, yakni mengukur kedalaman keyakinan diri sendiri lewat penolakan keyakinan orang lain. Kebhinekaan agama yang memperkaya harus ditegakkan apakah itu kelompok Maronit di Lebanon atau Koptik di Mesir. (tepek tangan) Dan garis pemisah juga harus dihilangkan di antara warga Muslim, sebagaimana perpecahan antara Sunni dan Syiah telah mengakibatkan kekerasan yang tragis, khususnya di Irak.

Kebebasan beragama penting bagi kemampuan rakyat hidup bersama. Kita harus senantiasa menelaah cara-cara yang kita pakai untuk melindunginya. Misalnya, di Amerika Serikat, peraturan sumbangan amal telah mempersulit warga Muslim untuk memenuhi kewajiban agama mereka. Itulah sebabnya saya bertekad untuk bekerja sama dengan warga

Muslim Amerika guna memastikan mereka bisa memenuhi zakat.

Juga penting agar negara-negara Barat mencegah larangan kepada warganegara Muslim untuk mempraktikkan agama sesuai kehendak mereka misalnya, dengan mendikte pakaian apa yang boleh dikenakan seorang perempuan Muslim. Sederhananya, kita tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangan terhadap agama apapun lewat alasan liberalisme.

Keyakinan seharusnya mempersatukan kita. Itulah sebabnya kami mengikhtiarkan proyek-proyek di Amerika yang mempertemukan warga Kristen, Muslim dan Yahudi. Itulah sebabnya kami menyambut gembira usaha dialog Antar Agama Raja Abdullah dan kepemimpinan Turki dalam Aliansi Keberadaban. Di seluruh dunia kita bisa memanfaatkan dialog menjadi pelayanan Antar Keyakinan, sehingga jembatan di antara berbagai rakyat mengarah pada tindakan apakah itu berupa perang melawan malaria di Afrika atau menyediakan bantuan bencana alam.

Isu keenam yang ingin saya tanggapi adalah hak-hak perempuan. Saya tahu ada perdebatan tentang isu ini. Saya menolak pandangan beberapa pihak di Barat bahwa perempuan yang memilih untuk menutupi rambutnya seakan-akan tidak memiliki persamaan hak, tetapi saya juga berpendapat bahwa seorang perempuan yang tidak bisa menikmati pendidikan tidak diberi kesamaan hak. Dan bukan kebetulan bahwa negara-negara di mana kaum perempuannya terdidik secara baik juga makmur.

Saya perjelas: isu-isu mengenai persamaan hak perempuan bukan semata-mata merupakan isu untuk Islam. Di Turki, Pakistan, Bangladesh dan Indonesia, kita saksikan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, mereka memilih seorang perempuan untuk memimpin. Sementara itu, perjuangan bagi persamaan hak perempuan masih terus merupakan aspek dalam kehidupan di Amerika, dan di negara-negara di seluruh dunia. Itulah sebabnya Amerika akan bermitra dengan setiap negara yang mayoritas penduduknya Muslim guna mendukung perluasan pemberantasan buta huruf untuk perempuan, dan membantu perempuan muda memperjuangkan pekerjaan lewat pinjaman untuk usaha kecil yang membantu rakyat merealisasikan cita-cita mereka. Saya yakin putri-putri kita bisa menyumbang kepada masyarakat setara seperti putra-putra kita, (tepek tangan) dan kemakmuran kita bersama bisa dimajukan dengan memberi kesempatan kepada semua orang laki-laki dan perempuan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Saya berpendapat perempuan tidak harus membuat pilihan sama seperti laki-laki agar mencapai kesamaan, dan saya menghormati perempuan yang memilih peran tradisional dalam menjalankan kehidupan mereka. Tetapi hal itu haruslah merupakan pilihan mereka sendiri.

Akhirnya, saya ingin membahas pembangunan ekonomi dan kesempatan. Saya tahu untuk banyak kalangan, wajah globalisasi bertentangan. Internet dan televisi bisa mengantarkan pengetahuan dan informasi, tetapi juga seksualitas yang bersifat ofensif dan kekerasan tak berperikemanusiaan. Perdagangan bisa menciptakan kekayaan dan

peluang baru, tetapi juga gangguan dan perubahan di masyarakat. Di semua negara termasuk negara saya perubahan ini bisa menyebabkan ketakutan. Ketakutan karena akibat modernitas kita kehilangan kendali atas pilihan ekonomi kita, politik kita dan yang terpenting, identitas kita hal-hal yang paling kita hargai dari masyarakat kita, keluarga kita, tradisi kita dan keyakinan kita.

Tetapi saya juga tahu kemajuan manusia tidak bisa ditampik. Tidak perlu ada kontradiksi antara pembangunan dan tradisi. Negara seperti Jepang dan Korea Selatan membina ekonomi mereka sambil tetap mempertahankan budaya mereka. Hal yang sama juga berlaku pada kemajuan mengagumkan dalam Islam mulai dari Kuala Lumpur sampai ke Dubai. Di masa kuno dan di masa kita, masyarakat Muslim membuktikan bahwa mereka mampu berada di garis depan inovasi dan pendidikan.

Ini penting karena tak ada strategi pembangunan yang semata-mata didasarkan pada apa yang dihasilkan tanah, dan strategi pembangunan juga tidak bisa dipertahankan kalau generasi mudanya tidak memiliki pekerjaan. Banyak Negara Teluk menikmati kekayaan sebagai akibat penghasilan minyaknya, dan beberapa sudah mulai memusatkan perhatian pada pembangunan yang lebih luas. Tetapi kita semua harus menyadari bahwa pendidikan dan inovasi akan menjadi faktor penentu dari abad ke 21. (tepu tangan) dan di banyak masyarakat Muslim masih kekurangan investasi dalam bidang-bidang ini..Saya tekankan hal itu di negara saya. Dan sementara Amerika di masa lalu memusatkan perhatian pada

minyak dan gas alam di bagian dunia ini, kami kini menghendaki hubungan yang lebih luas.

Dalam pendidikan, kami akan memperluas program pertukaran dan memperbanyak bea siswa, seperti yang mengantar ayah saya ke Amerika, sementara juga mendorong lebih banyak warga Amerika untuk belajar di tengah masyarakat Muslim. Dan kami akan menempatkan siswa-siswa Muslim yang menjanjikan di tempat-tempat magang di Amerika; melakukan investasi dalam pembelajaran online untuk guru-guru dan anak-anak di seluruh dunia; dan menciptakan jaringan online baru, sehingga seorang remaja di Kansas mampu berkomunikasi langsung dengan remaja di Kairo.

Dalam rangka pembangunan ekonomi, kami akan menciptakan sebuah korps relawan bisnis baru untuk bermitra dengan counterpartnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Dan saya akan menyelenggarakan KTT Kewiraswastaan tahun ini untuk mengidentifikasi bagaimana kita bisa mempererat hubungan antara pemimpin bisnis, yayasan dan wiraswasta sosial di Amerika dan masyarakat Muslim di seluruh dunia.

Dalam bidang sains dan teknologi, kami akan meluncurkan sebuah dana baru untuk mendukung pembangunan teknologi di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, dan membantu mentransfer ide-ide ke pasar-pasar sehingga tercipta lapangan pekerjaan. Kami akan membuka pusat keunggulan sains di Afrika, Timur Tengah dan Asia Tenggara serta mengangkat Utusan Sains baru untuk bekerja sama dalam program-program yang mengembangkan

sumber energi baru, menciptakan lapangan pekerjaan hijau, digitalisasi catatan, air bersih dan menumbuhkan tanaman panen baru. Dan hari ini saya mengumumkan sebuah usaha global baru bersama Organisasi Konferensi Islam guna memberantas polio. Dan kita juga akan memperluas kemitraan dengan masyarakat Muslim guna menggalakkan kesehatan anak dan ibu.

Semua ini harus dilakukan lewat kemitraan. Rakyat Amerika siap bergabung dengan warganegara dan pemerintahan; organisasi kemasyarakatan, pemimpin agama dan bisnis di masyarakat Muslim diseluruh dunia guna membantu rakyat kita memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Isu-isu yang telah saya uraikan tidak mudah ditanggapi. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk bergabung demi memperjuangkan dunia yang kita cita-citakan sebuah dunia di mana ekstremis tidak lagi mengancam rakyat kita, dan pasukan Amerika bisa pulang; sebuah dunia di mana rakyat Israel dan Palestina masing-masing memiliki negara mereka sendiri yang aman, dan energi nuklir dipergunakan untuk tujuan damai; sebuah dunia di mana pemerintahan melayani warganegaranya serta hak-hak dari semua umat Allah dihormati. Ini merupakan kepentingan bersama. Itulah dunia yang kita cita-citakan, tetapi hal itu hanya kita bisa capai bersama.

Saya tahu ada banyak Muslim dan non-Muslim yang mempertanyakan apakah kita bisa membina permulaan baru ini. Beberapa ingin menghasut api perpecahan, dan menghalangi kemajuan. Beberapa mengatakan hal ini tidak ada gunanya bahwa kita sudah ditakdirkan untuk berseteru

dan berbagai peradaban ditakdirkan beradu. Banyak lagi yang sekedar skeptis bahwa perubahan nyata bisa terselenggara. Begitu banyak ketakutan, begitu banyak ketidakpercayaan. Tetapi kalau kita memilih untuk terperangkap dalam masa lalu maka kita tidak pernah akan melangkah maju. Dan saya secara khusus ingin mengatakan kepada generasi muda dari setiap kepercayaan, di setiap negara anda, lebih dari orang lain, memiliki kemampuan untuk menata kembali dunia, menyusun kembali dunia.

Kita semua menghuni dunia ini untuk waktu yang singkat. Pertanyaannya adalah apakah kita melewatkan waktu itu terpusat pada hal-hal yang memecah belah kita, atau apakah kita mendedikasikan diri pada usaha-usaha berkesinambungan untuk mencapai kesamaan, memusatkan perhatian pada masa depan bagi anak-anak kita dan menghargai harga diri semua insan manusia.

Hal-hal ini tidaklah mudah. Lebih mudah memulai perang ketimbang menghentikannya. Lebih mudah menuduh pihak lain ketimbang melakukan introspeksi diri; untuk melihat apa yang berbeda pada diri seseorang ketimbang menemukan kesamaan kita. Tetapi ada pula sebuah aturan yang merupakan inti setiap agama bahwa kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka. Kebenaran ini berlaku lintas negara dan lintas rakyat sebuah keyakinan yang tidak baru, yang tidak hitam atau putih atau coklat; bukan kebenaran Kristen, atau Muslim atau Yahudi. Ini merupakan keyakinan yang berdetak dalam dari buaian peradaban, dan masih tetap berdetak dalam jantung

miliaran manusia. Ini merupakan rasa percaya pada orang lain, dan hal itulah yang membawa saya kesini hari ini.

Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia yang kita cita-citakan, tetapi hanya apabila kita punya keberanian untuk memasuki awal yang baru, sambil ingat pada apa yang tertulis. Kitab Suci Al Quran mengatakan, “Wahai manusia! Sesungguhnya kami telah ciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal...”

Talmud mengatakan kepada kita: “Seluruh Torah adalah untuk maksud menggalakkan perdamaian.”

Kitab Suci Injil mengatakan pada kita, “Diberkatilah pencipta perdamaian, karena mereka akan disebut putra-putra Allah.”

Rakyat seluruh dunia bisa hidup bersama dalam damai. Kita tahu itu merupakan visi Allah. Kini, itu menjadi kewajiban kita di Dunia. Terima kasih. Dan semoga damai Allah bersama anda. Terima kasih banyak. Terima kasih. (tepek tangan bergemuruh)

Pidato Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Universitas Kairo (Cairo University) 4 Juni 2009. Dimulai Pukul 13.10 waktu setempat dan berakhir pada Pukul 14.05.

Dikutip dari Siaran Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta di situs <http://www.usembassyjakarta.org>

Pidato Barack Obama di Mesir seolah menjadi awal pergolakan di Timur Tengah. Gelombang tuntutan perubahan yang bergerak cepat dan serentak, membuat presiden Husni Mubarak akhirnya harus turun secara menyedihkan, yang selanjutnya diganti oleh pemerintahan transisi dari tokoh oposisi dan melakukan pemilihan presiden secara demokratis seperti keinginan Amerika Serikat dan menghasilkan Prof. Dr. Muhammad Mursi sebagai pemenang dan menjadi presiden Mesir menggantikan Husni. Beberapa Ahli Politik memandang Revolusi Mesir ini di ilhami oleh kesuksesan Reformasi di Indonesia pada 1998 yang mampu menggulingkan Soeharto dari tampuk singgasananya.

Jatuhnya pemerintahan Husni Mubarak membawa dampak terhadap negara-negara di Timur Tengah seperti Libya dengan presidennya Kolonel Mohammad Khadafi yang berkuasa lebih lama dari Soeharto di zaman rezim orde baru juga harus tumbang. Moh Khadafi rontok dari kekuasaannya dan terbunuh dipersembunyiannya, hal ini tidak lepas dari dukungan Amerika Serikat untuk para pejuang perubahan di Lybia. Para pejuang Lybia didukung penuh oleh kekuatan militer Amerika untuk menghantam kekuatan militer yang setia terhadap Kolonel Khadafi.

Campur tangan Militer Amerika Serikat di Lybia membuktikan bahwa Amerika Serikat yang dipimpin oleh Barack Obama tetap mempertahankan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Dengan alasan demokratisasi di Timur Tengah, militer Amerika memberikan bantuan peralatan tempur secara terbuka terhadap pemberontak versi pemerintahan berkuasa. Sehingga gempuran tentara yang setia

kepada pemerintahan sebelumnya, harus mengangkat bendera putih dan menyerah kepada pemberontak. Jatuhnya pemerintahan Husni Mubarak, jatuhnya pemimpin Lybia Muammar Khadafi juga dialami oleh beberapa negara di Timur Tengah lainnya seperti Tunisia, Bahrain, dan juga Suriah.

Sebuah pidato yang disampaikan secara apik, secara menarik di forum universitas Al Azhar oleh Barack Obama sungguh berdampak besar pada perubahan di kawasan Timur Tengah. Gaung perubahan di Timur Tengah sepertinya sudah disusun secara matang, Harian Daily Telegraph pernah menulis bahwa Amerika Serikat mendukung para pemimpin gerakan Revolusi Mesir secara rahasia. Disebutkan bahwa pada tahun 2008, diplomat AS mendekati kelompok oposisi dan membuat skenario Revolusi Mesir dengan cara menggulingkan Hosni Mubarak dan membentuk pemerintahan yang Demokratis pada 2011.

Selain pidatonya di Mesir, Pidato Barack Obama di kampus Universitas Indonesia, juga berdampak di Kawasan Asia terlebih di Indonesia. Kedatangah Presiden Amerika Serikat di Jakarta dapat dipahami bukan hanya untuk bernostalgia seperti yang disampaikan Barack Obama pada awal pidatonya ; *“Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas sambutan hangat ini. Terima kasih untuk masyarakat Jakarta. Dan terima kasih bagi seluruh bangsa Indonesia. Pulang kampung nih. (tepuk tangan.)* Saya senang akhirnya bisa berkunjung ke negeri ini dengan ditemani oleh Michelle. Tahun ini, kami telah dua kali gagal datang ke Indonesia. Namun, saya berkeras untuk menyambangi sebuah

negeri yang amat bermakna bagi saya ini. Sayangnya, lawatan ini begitu singkat. Tapi saya berharap bisa datang lagi tahun depan pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT Asia Timur “

Disinilah menariknya pidato Barack Obama, dirinya seperti memiliki ikatan emosional dengan Indonesia, yang dia gambarkan dengan kata-kata “Pulang kampung nih” kalimat pulang kampung ini diorasikan dengan penuh semangat persaudaraan. Dilanjutkan oleh Barack ;” Indonesia bagian dari diri saya. Pertama kali saya bersentuhan dengan negeri ini adalah ketika ibu saya menikahi seorang pria Indonesia bernama Lolo Soetoro. Sebagai seorang bocah, saya terdampar di sebuah dunia yang berbeda. Namun, orang-orang di sini membuat saya merasa berada di rumah saya sendiri.”

Pada masa itu, Jakarta terlihat begitu berbeda. Kota ini disesaki gedung-gedung yang tak begitu tinggi. Hotel Indonesia adalah salah satu bangunan tinggi. Kala itu, ada sebuah pusat perbelanjaan baru bernama Sarinah. Jumlah becak jauh lebih banyak daripada kendaraan bermotor. Dan jalan raya tersisih oleh jalan-jalan kampung tak beraspal.

Kami tinggal di Menteng Dalam, pada sebuah rumah mungil yang halamannya ditumbuhi sebatang pohon mangga. Saya belajar mencintai Indonesia pada^{*} saat menerbangkan layang-layang, berlarian di sepanjang pematang sawah, menangkap capung, dan jajan sate atau bakso dari pedagang keliling. Yang paling saya kenangkan adalah orang-orangnya: lelaki dan perempuan sepuh yang menyapa kami dengan senyumnya; anak-anak yang membuat seorang asing seperti

saya jadi seperti tetangga; dan guru-guru yang mengajarkan keluasan dunia.

Obama seperti kembali ke era tahun 1960-an, di Jakarta masih dipimpin oleh seorang marinir bernama Ali Sadikin. Pada umur 6 sampai 9 tahun seperti masih segar dalam memorinya. Dia lanjutkan pidatonya ; Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, dan orang-orang dari berbagai daerah dan suku, periode saya tinggal di negeri ini melapangkan jalan bagi saya menghargai kemanusiaan. Walau ayah tiri saya, sebagaimana orang Indonesia umumnya, dibesarkan sebagai seorang Muslim, ia sepenuhnya percaya bahwa semua agama patut dihargai secara setara. Dengan cara itu, ia mencerminkan semangat toleransi keberagaman yang diabadikan dalam Undang-undang Dasar Indonesia yang tetap menjadi salah satu ciri negeri ini, yang tentunya memberi inspirasi.

Saya tinggal di kota ini selama bertahun-tahun sungguh suatu masa yang membentuk masa kecil saya; “suatu masa yang menjadi saksi bagi kelahiran adik saya yang manis, Maya; dan suatu masa yang telah memesona ibu saya sehingga ia terus-menerus menghampiri Indonesia 20 tahun kemudian untuk tinggal, bekerja dan bepergian - mengejar hasratnya mendorong terbukanya kesempatan di pedesaan Indonesia khususnya bagi perempuan. Sepanjang hidupnya, negeri ini, beserta orang-orangnya, tetap tersimpan di hati ibu saya. “

Dalam ungkapan Barack Obama kita dapat menarik kesimpulan bahwa dia mengenal Indonesia lebih dalam melalui sang ibu, yang memiliki seorang anak perempuan

bernama Maya, yang memberikan inspirasi untuk hilir mudik antara Jakarta Hawaii. Wanita berasal dari Hawaii inilah menjadi tokoh sentral dalam perkembangan psikis seorang Obama, yang pada masa kecilnya pernah bertemu dengan sang ayah, berasal dari Nairobi, Kenya.

Pada pidatonya di Universitas Indonesia. Di hadapan Civitas Akademika, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia yang disiarkan secara luas oleh media cetak dan elektronik. Barack Obama juga piawai menceritakan sejarah Indonesia, yang diungkapkan seperti berikut: “Indonesia memilih jalurnya sendiri melalui tranformasi demokratis yang luar biasa - dari pemerintahan tangan besi, ke pemerintahan rakyat. Tahun-tahun belakangan, dunia menyaksikan dengan harapan dan rasa kagum usaha bangsa Indonesia merengkuh peralihan kekuasaan dengan jalan damai dan pemilihan kepala negara serta daerah secara langsung. Ketika demokrasi di negeri ini disimbolkan oleh terpilihnya Presiden dan wakil rakyat, ketika itu pula demokrasi dijalankan dan dipelihara melalui kontrol dan keseimbangan (check dan balance): Sebuah masyarakat madani, partai dan serikat politik yang madani; media dan warga negara penuh semangat yang telah yakin bahwa di dalam Indonesia tak ada lagi jalan memutar.

Bahkan ketika tanah tempat kemudaan saya pernah berlalu ini telah berubah banyak, hal-hal yang pernah saya pelajari untuk mencintai Indonesia - semangat toleransi yang tercantum dalam Undang-undang Dasar dan terpacak melalui masjid, gereja dan candi, pun tertanam dalam darah bangsa masih mengalir di tubuh saya. Bhinneka Tunggal Ika persatuan dalam keragaman. Falsafah itu merupakan pondasi

yang dicontohkan Indonesia kepada dunia. Itu sebabnya Indonesia akan memainkan peran penting pada abad ke-21.”

Dalam teks pidato ini sepertinya Obama kembali mempertegas soal transformasi demokratisasi dimana Amerika sudah sejak lama memberikan kontribusi atas hegemoni aspek sejarah yang sudah lebih dahulu mereka jalankan di Amerika. Negara memberikan kebebasan berpendapat sebagaimana tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Bahwa model toleransi beragama di Indonesia dipahami oleh Barack Obama sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menghormati keberagaman agama sudah tumbuh sejak dahulu. Masyarakat dunia sepertinya, memahami bahasa orasi sang presiden yang pada pembahasan kebebasan beragama di Indonesia, lebih dahulu menyebut rumah ibadah secara runut. Dengan urutan yang apik. Disuarakan oleh Barack Obama melalui masjid, gereja dan candi. Ini bisa dipastikan Barack Obama mengurutkan posisi agama di Indonesia adalah :

Masjid = Islam

Gereja = Kristen/Katolik

Candi = Hindu/Budha

Berikutnya dalam pidatonya Barack Obama juga secara jelas mengutarakan kedatangannya di Indonesia bukan saja untuk bernostalgia dengan masa kecilnya. Obama berucap; “Kemarin, Presiden Yudhoyono dan saya menyetujui Kerja Sama Komprehensif yang baru antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pemerintahan kedua negara mempererat hubungan di berbagai bidang dan, yang juga penting, memperkuat hubungan antar bangsa. Kerja sama ini tentunya berdasar atas rasa saling membutuhkan dan saling menghormati.

Dengan sisa waktu yang saya miliki hari ini, saya ingin berbagi tentang mengapa kisah yang baru saja saya utarakan begitu penting bagi Amerika Serikat dan dunia. Saya ingin menitikberatkan pembahasan pada tiga hal yang saling berkait-erat serta mendasar bagi kemajuan manusia: Pembangunan, demokrasi dan agama.”

Dalam bahasa orasi ini Obama menggambarkan secara jelas hegemoni Amerika di kawasan Asia yang dijalankan, telah mendapat tanggapan dari kepala negara Indonesia. Ini terkandung dalam kalimat; “Kemarin, Presiden Yudhoyono dan saya menyetujui Kerja Sama Komprehensif yang baru antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pemerintahan kedua negara mempererat hubungan di berbagai bidang dan, yang juga penting, memperkuat hubungan antar bangsa. Kerja sama ini tentunya berdasar atas rasa saling membutuhkan dan saling menghormati.” Artinya disamping kerjasama yang sudah ada, ada kerjasama baru yang lebih mengikat. Dalam bahasa Obama disebut mempererat hubungan diberbagai bidang” masyarakat seperti disamakan, berbagai bidang kerjasama apa saja yang telah di sepakati ?

Pertanyaan kritis ini pantas, karena masyarakat mengetahui dominasi Amerika di Indonesia khusus di Papua mengalami babak baru. Dimana eksploitasi sumber daya alam dan mineral terhadap kandungan mineral emas oleh Freeport pada tiga tahun terakhir mengalami masalah mendasar. Begitu juga terhadap hegemoni Amerika di Indonesia di bidang gas dan minyak bumi. Saat ini Gas,minyak bumi Indonesia bukan hanya dikelola oleh Amerika dan Indonesia, muncul juga

Cina melalui beberapa perusahaannya membuka lahan baru di bidang gas dan minyak bumi.

Barack Obama menegaskan atas dasar saling membutuhkan dan saling menghormati. Kalimat ini jelas menggambarkan Amerika memiliki kepentingan besar, di Asia khususnya Asia Tenggara. Hal ini dimaksudkan untuk menghambat peran China di kawasan ini. Secara sangat jelas Amerika menginginkan posisinya. Yang oleh Obama disamakan dengan kalimat kemajuan manusia; pembangunan, demokrasi dan Agama.

Untuk proses demokrasi di Indonesia, Amerika sejak jauh hari sudah berinvestasi melalui beberapa foundingnya di Indonesia. Dalam hal ini bisa disebutkan; USAID dan Ford Foundations. Kedua Founding ini sudah tidak asing lagi berfungsi sebagai lembaga pemberi bantuan bagi NGO lokal atau yang lebih dikenal dengan LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) yang melakukan pendidikan demokrasi di Indonesia. Tiga pilar yang disebutkan oleh Obama ;

Pembangunan

Demokrasi dan

Agama

Dalam masalah agama, masalah keberagaman dan toleransi. Sejatinya Amerika Serikat mengkwatirkan tumbuhnya ekstremis-ekstremis baru. Karena sejak peristiwa 11 September yang mencoreng sejarah Amerika sampai saat ini menjadi sebuah fenomena yang terus menghantui proses hegemoni Amerika. Tidak terkecuali juga pandangan politik dari Barack Obama, yang dia sampaikan di Universitas Indonesia pada November 2010 lalu. Disampaikan oleh Barack

Obama seperti berikut ; “Saya telah menegaskan bahwa Amerika tidak sedang memerangi, dan takkan terlibat perang dengan, Islam. Namun, kita semua harus menghancurkan Al-Qaeda dan antek-anteknya. Siapapun yang ingin membangun tak boleh bekerja sama dengan teroris. Ini bukanlah tugas Amerika sendiri. Indonesia telah berhasil memerangi para teroris dan aliran garis keras.”

Pesan Obama mengenai pernyataan perang terhadap teroris, yang dilanjutkan dengan ajakan untuk secara bersama-sama menghancurkan Al-Qaeda dan antek-anteknya, memberikan ketakutan yang luar biasa dari pemerintahan Amerika Serikat terhadap Al-Qaeda dan jaringannya. Amerika meletakkan Al-Qaeda sebagai musuh nomor satu dan juga menjadi musuh bersama dunia internasional. Peristiwa teror 11 September yang memperlakukan Amerika di warga dunia Internasional diyakini Amerika sebagai proyek jaringan Al-Qaeda.

Indonesia juga dinilai berperan besar dalam peningkatan ekonomi global. Indonesia sebagai negara anggota G20 memiliki tanggung jawab dalam keseimbangan perekonomian dunia. Selain pembangunan, dalam hal demokrasi, Obama takjub dengan perubahan yang terjadi selama dia meninggalkan Indonesia. Dia menceritakan kenangannya di tahun 1967 dimana rakyat Indonesia diliputi ketakutan dalam menyuarakan aspirasinya. "Dalam beberapa tahun ini, Indonesia telah menjadi negara demokratis. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan presiden dan legislatif serta masyarakat sipil yang dinamis. Indonesia dinilai juga merupakan negara dengan toleransi beragama yang tinggi. Obama

mencontohkan masjid dan gereja yang dibangun berdampingan. Sebelum ke Universitas Indonesia, Obama sempat mengunjungi Masjid Istiqlal, sebagai bukti niatnya serius berdialog dengan dunia Muslim.

Bagi Indonesia, Obama pribadi tak bisa dipisahkan dengan kepentingan Amerika Serikat. Kedatangannya di Indonesia sudah pasti membawa misi negaranya. Amerika Serikat memiliki kepentingan yang besar akan Indonesia ini tidak bisa dipungkiri meskipun Obama tidak menyebut Freeport dalam pidatonya. Obama mungkin saja sengaja tidak mengungkit Freeport dalam kuliah pidatonya apalagi jika dikaitkan dengan konsep distorsi dalam politik di mana terdapat empat distorsi bahasa dalam proses komunikasi politik (1) Distorsi bahasa sebagai topeng. Distorsi bahasa sebagai topeng merupakan praktek bahasa yang menempatkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau lain dari keadaan sebenarnya (2) Distorsi bahasa sebagai lupa. Dalam komunikasi politik, lupa dapat diciptakan dan direncanakan. Bukan hanya satu orang melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang. Dengan mengalihkan perhatian seseorang atau ratusan juta orang, kita dapat membuat mereka lupa dan lebih parah lagi lupa ini dapat diperpanjang selama dikehendaki oleh para manipulator lupa. (3) Distorsi bahasa sebagai representasi, terjadi jika kita menggambarkan sesuatu tidak sebagaimana mestinya ini menjadi sangat berbahaya jika yang digambarkan itu kebetulan berada pada posisi yang lemah dan (4). Distorsi bahasa sebagai ideologi, ideologi pada dasarnya sudah bersifat distorsif. Perspektif distorsi ideologi

menekankan bahwa hanya penguasalah yang berhak menentukan mana yang politik dan mana yang bukan.

Dengan konsep distorsi dalam politik ini, pidato Obama yang tidak menyebut Freeport masuk dalam kategori distorsi bahasa sebagai lupa. Dalam komunikasi politik, lupa dapat diciptakan dan direncanakan. Bukan hanya satu orang melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang. Dengan mengalihkan perhatian seseorang atau ratusan juta orang, kita dapat membuat mereka lupa dan lebih parah lagi lupa ini dapat diperpanjang selama dikehendaki oleh para manipulator lupa. Apalagi Freeport sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat dan buntung di pihak Indonesia.

Selain masalah pembangunan, demokrasi, dan keyakinan beragama Obama juga menyebut masalah toleransi dan pluralisme. Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuah hasil tanpa konflik asimilasi. Pluralisme dapat dikatakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat dan perkembangan ekonomi.

Dalam sebuah masyarakat otoriter atau oligarkis, ada konsentrasi kekuasaan politik dan keputusan dibuat oleh hanya sedikit anggota. Sebaliknya, dalam masyarakat pluralistis, kekuasaan dan penentuan keputusan (dan kemilikan kekuasaan) lebih tersebar. Dipercayai bahwa hal ini menghasilkan partisipasi yang lebih tersebar luas dan

menghasilkan partisipasi yang lebih luas dan komitmen dari anggota masyarakat, dan oleh karena itu hasil yang lebih baik.

Pidato Obama di Indonesia dapat juga dipahami sebagai usaha Amerika Serikat untuk menghalangi hegemoni Rusia dan Cina terhadap Asia dan Eropa demi mempertahankan posisi sebagai negara super power atau negara global power. Sejarah mencatat, sampai saat ini Amerika Serikat masih mempertahankan posisi itu. Hegemoni melalui segala aspek kehidupan terus diupayakan oleh Amerika Serikat baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan keamanan. Amerika Serikat berupaya menjadi polisi dunia dengan menanggung beban kepemimpinan dunia.

Apalagi saat ini Amerika Serikat menempatkan Pangkalan Militernya di Darwin ini dapat dimaknai ganda oleh Indonesia. *Pangkalan militer AS di Darwin* yang hanya berjarak 820 km (500 mil) dari Indonesia dan 35 menit jarak tempuh ke Papua, di satu sisi dimaknai akan digunakan untuk memerdekakan Papua. Amerika menganggap banyak terjadi pelanggaran HAM di bumi Papua. Di sisi lain Freeport secara ekonomi sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat sehingga AS sangat berkepentingan untuk itu.

Sejak tahun 1970-an, Darwin Australia merupakan basis intelejen Amerika Serikat untuk wilayah Asia Pasifik. Hal ini, disebabkan karena RRC secara ekonomi dan militer menguat, dan pasukan Amerika makin tidak populer di Jepang dan Korea Selatan. Amerika Serikat kemudian mengambil sikap standar ganda, mengamankan jalur laut China Selatan dan udara Asia Pasifik karena didukung basis militer di Hawaii dengan pasukan lebih dari 42.000. Di sisi lain, memantau

kekuatan RRC di Laut China Selatan sekaligus menjadikan Laut China Selatan sebagai kawasan yang perlu mendapat pengamanan karena negara-negara yang berada di sekitarnya saling memperebutkan batas wilayah ZEE.

Dalam analisis wacana kritis, wacana dipahami tidak semata sebagaistudi bahasa. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkannya dari aspek bahasa semata tetapi juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Selain sebagai praktik kekuasaan, wacana juga digambarkan sebagai praktik sosial yang menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya.

Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi, di mana wacana dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan.

Wacana ideologi dalam bahasa melihat bahasa bukan sekedar sebagai struktur yang digunakan oleh komunikasi dan pertunjukkan, tapi sebagai fenomena sejarah sosial yang melibatkan konflik manusia, yang dari dalamnya jugalah konstelasi ideologi terkendalikan. Demikian pula dalam teks pidato Barack Obama di Indonesia hegemoni ideologi coba diterapkan oleh Obama sehingga isi pidato Obama tersebut menjadi keniscayaan.

Gouldner dalam Thompson, 2003:140 menjelaskan kemunculan model wacana politik yang baru; wacana yang menuntut tindakan tetapi tidak sekedar menuntut melalui penggunaan otoritas atau tradisi, atau melalui retorika emotif belaka. Ia adalah wacana yang didasarkan pada aida yang mendasari tindakan politik dalam teori secular dan rasional... ideologi terpisah dari kesadaran mistis dan agama, ia menjustifikasi tindakan yang diinginkan, melalui logika dan bukti ia menunjukkan perlunya pandangan ideologi dalam dunia sosial, melebihi keimanan, tradisi, wahyu atau otoritas pengguna bahasa.

Ideologi adalah pemahaman lapisan kedua "teks yang ditulis di atas teks. Munculnya ideologi tidak hanya berhubungan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dengan revolusi industri dan munculnya kapitalisme. Ideologi lebih lanjut menurut Gouldner adalah system symbol, varian bahasa, kode yang dielaborasi, semua dapat melaksanakan tugasnya dalam memobilisasi proyek public hanya ketika diekspresikan melalui bahasa, utamanya bahasa tulis, yang kritis, rasional, dan dapat dimengerti secara empirik.

Bahasa tidak sekedar alat komunikasi ataupun pengetahuan, tetapi juga alat kekuasaan. Seseorang berusaha untuk tidak hanya dipahami tapi juga dipercayai, dipatuhi, dihormati, dibedakan. Definisi lengkap kompetensi adalah *hak untuk berbicara*, yaitu hak untuk bahasa yang legitimate, bahasa yang disahkan, bahasa otoritas. Kompetensi menyiratkan kekuasaan untuk memaksakan penerimaan.

Dalam teks pidato Barack Obama terdapat relasi-relasi dominasi, diskriminasi, kuasa, dan kendali yang samar maupun transparan seperti yang terlihat dalam kalimat :

4.2.2. Level Produksi Teks

Produksi teks pidato Barack Obama

Amerika Serikat adalah negara yang menganut paham atau ideologi liberalisme. Liberalisme sendiri diartikan sebagai sebuah ideologi, pandangan, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Dalam liberalisme terdapat pemahaman bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Liberalisme disebut sebagai ideologi dunia modern yang paling berhasil. Liberalisme menyiratkan hal-hal yang akan menyelamatkan dan mempertinggi kebebasan itu, seperti persamaan hak, pemerintahan konstitusional, aturan hukum, dan toleransi. Liberalisme dalam demokrasi saat ini dapat ditandai dengan ciri : memiliki kecenderungan untuk mendukung perubahan, mempunyai kepercayaan terhadap nalar manusiawi, bersedia menggunakan pemerintah untuk meningkatkan kondisi manusiawi, mendukung kebebasan individu, dan bersifat ambivalen terhadap sifat manusia. Kaum liberal percaya bahwa orang harus selalu berusaha meningkatkan kehidupan masyarakat, dan tradisi liberal adalah sangat menekankan pada kebebasan individu.

Amerika Serikat sebagai negara yang termasuk dalam kategori negara *Super power* dan menganut paham liberalism.

Dalam politik Internasional P.A. Reynold mengklasifikasikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam lima kategori. *Super power*, *Great powers*, *Middle powers*, *Small powers*, dan *Micro powers*. Penempatan negara-negara dalam satu dari lima kategori menurut Reynold tergantung pada tingkat kemampuannya mempengaruhi perilaku negara-negara lain untuk suatu jangka waktu tertentu, dan apakah pengaruh itu dilakukannya sendiri atau membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam bentuk aliansi. Turut pula diperhitungkan sejauh mana luas wilayah yang dipengaruhinya.

Reynold mengklasifikasi negara *Super Power* sebagai negara atau kekuatan yang mempunyai pengaruh terhadap wilayah yang sangat luas, untuk jangka waktu yang lama dan relatif dilakukannya sendiri. Intensitas keterlibatan negara *Super Power* sangat tinggi, terus menerus, dan tidak mengenal waktu dan tempat.

Negara yang tergolong *micro power* pada umumnya hanya memiliki kemampuan yang sangat kecil untuk dapat mempengaruhi perilaku negara lain. Kebijakan politik, terutama politik luar negeri suatu negara sedikit banyak dipengaruhi oleh lingkungan internasional (*International enviroment*). Indonesia belum tergolong sebagai kekuatan yang mampu mempengaruhi perilaku negara-negara lain, apalagi untuk jangka waktu yang panjang tetapi Indonesia mampu mempengaruhi satu persoalan khusus dan untuk jangka waktu yang singkat.

4.2.3. Level Konsumsi Teks

Pidato Barack Obama di UI Depok disaksikan jutaan rakyat Indonesia, baik yang menyaksikannya secara langsung ataupun melalui televisi. Menurut Althusser fungsi aparatus negara ideologis utamanya adalah “ideologi” diantaranya melalui gereja, sekolah, partai politik, jaringan komunikasi. Maka Barack Obama memberikan kuliah umum atau pidato di kampus UI Depok sejalan dengan pandangan Althusser bahwa penyebaran ideologi dapat melalui sekolah.

Cara kerja ideologi yang coba dibangun oleh Amerika di Indonesia adalah menggunakan cara kerja dengan landasan kharismatik (menggunakan karakter individu tertentu yang memiliki otoritas). Ini sesuai dengan pandangan Max Weber. Kehadiran Obama yang juga Presiden Amerika Serikat dengan pidato yang memukau yang mengagung-agungkan Indonesia dapat dipahami sebagai usaha Amerika untuk menyebarkan ideologinya.

Pidato Barack Obama yang disampaikan sebagai sebuah pesan yang ditujukan pada khalayak dalam jumlah besar dapat dipastikan mengandung makna yang sangat luas. Dalam pesan itu sendiri menurut Clevenger dan Matthews dalam Fisher 1986: 364 terdapat tiga buah pesan yang potensial. Pesan yang dikirimkan itu membentuk satu pesan, pesan yang diterima merupakan pesan yang kedua. Kedua pesan tersebut merupakan peristiwa yang berbeda karena terjadi pada dua lokasi ruang yang berbeda (dalam sumber dan dalam diri penerima) dan pada dua “tempat” waktu yang berlainan (pesan yang diterima selalu menyusul setelah pesan dikirimkan). Kemudian pesan yang ketiga mungkin terjadi

dalam diri pengamat situasi komunikatif itu. Karena itu pesan dipandang sebagai bentuk dan lokasi pikiran, verbalisasi, dan seterusnya dalam diri individu. Pesan yang terdapat pada saluran di luar sumber atau penerima dalam bentuk energi fisik dan lebih cocok dipandang sebagai isyarat (signal). Pikiran disandi dalam bentuk isyarat, isyarat dialih sandi ke dalam pikiran. Atau dinyatakan dengan cara lain, pesan disandi ke dalam isyarat, isyarat dialih sandi ke dalam pesan.

Dalam setiap pidato politiknya, Obama menguasai lima pola komunikasi massa yaitu kelengkapan (complete), keringkasan dan kepadatan (concise), memahami keinginan rakyat (consideration), memukau (clarity), dan persuasif dalam menumbuhkan respek (courtesy). Pola-pola komunikasi ini selalu masuk dalam rangkainya pidatonya. Hal ini memberi kesan yang sangat kuat atas ketokohnya tidak terkecuali dalam pidatonya saat mengunjungi Indonesia, jutaan pasang mata masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang menyaksikannya melalui televisi seolah tersihir dengan pesona Sang President.

Masyarakat Indonesia yang menyaksikan pidato itu tak menyadari adanya ideologi dan hegemoni yang terdapat dalam pidato Barack Obama dan secara tidak sadar menerima begitu saja setiap patah kata yang diucapkan oleh Presiden Barack Obama. Masyarakat Indonesia tidak menyadari pentingnya pidato itu bagi Amerika Serikat apalagi posisi Indonesia sebagai negara demokrasi apalagi posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat dan 118 dari 193 negara di dunia adalah negara demokrasi.

Makna paling dasar dari kata demokrasi adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Dengan demikian demokrasi berbeda dengan monarki (kekuasaan satu orang), aristokrasi (kekuasaan orang yang terbaik) dan oligarki (kekuasaan ada pada sebagian orang). Samuel P. Huntington dalam *Amerika dan Dunia* hal: 169 mendefinisikan demokrasi sebagai pemilihan umum yang terbuka, bebas, dan jujur merupakan esensi demokrasi, suatu syarat hakiki yang tak dapat diabaikan. Pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan umum mungkin tidak efisien, korup, picik, tidak bertanggungjawab, didominasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, dan tidak mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang dituntut oleh kebaikan publik. Sifat-sifat ini menjadikan pemerintahan seperti itu tidak diinginkan, namun tidak menjadikannya tidak demokratis.

Demokrasi merupakan salah satu, namun bukan satu-satunya, kebajikan publik, dan hubungan demokrasi dengan kebajikan dan kejahatan publik yang lain hanya dapat dipahami jika demokrasi dibedakan dengan jelas dari karakteristik sistem politik yang lain. Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang ditandai dengan pemilu yang bebas dan adil, penegakan Undang-Undang, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan atas kebebasan dasar untuk berbicara, berkumpul memeluk agama, dan hak milik pribadi.

Dalam hal demokrasi Amerika Serikat seringkali menjadi penyokong pemilu dan demokrasi suara rakyat langsung di luar negeri. Apa yang khas menyangkut sistem Amerika bukanlah seberapa demokratis negara itu, yang menempatkan banyak kekangan pada mayoritas elektoral.

Dari tiga cabang dalam pemerintah, satu cabang yang dianggap terpenting, dipimpin oleh sembilan orang yang tidak dipilih dengan jabatan seumur hidup. Senat Amerika adalah majelis tinggi yang paling tidak representatif di dunia. Setiap negara bagian mengirimkan dua senator ke Washington berapapun jumlah penduduknya 30 juta penduduk California punya suara yang sama di Senat dengan negara bagian Arizona yang penduduknya hanya 3,7 juta artinya, para senator yang mewakili sekitar 16 persen jumlah penduduk dapat menghadang undang-undang yang diajukan. Demikian juga di dalam badan legislatif negara bagian di seluruh Amerika Serikat, apa yang menyolok bukanlah kekuasaan mayoritas tetapi justru yang minoritas. Untuk lebih lanjut mengawasi kekuasaan nasional, negara bagian dan pemerintah lokal dibuat dan dengan garang memerangi setiap gangguan federal atas wilayah mereka.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Pemakaian demokrasi sebagai prinsip hidup bernegara sebenarnya telah melahirkan fiksi-yuridis bahwa negara adalah milik masyarakat.

Ideologi berdasarkan pandangan Selinger dalam Thomson: 132 adalah orientasi tindakan yang berisi kepercayaan yang diorganisir dalam satu sistem yang koheren. Sebuah ideologi adalah kumpulan kepercayaan dan ketidakpercayaan (penolakan) yang diekspresikan dalam

kalimat-kalimat yang bernilai. Kalimat-kalimat permohonan dan pernyataan eksplanatoris dibuat untuk memberikan basis permanen yang relatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk membenarkan kepercayaan pada norma moral dan sedikit bukti faktual serta rasionalisasi berbasis kesadaran diri yang bertalian dengan legitimasi implementasi dan preskripsi teknis yang dimaksudkan untuk menjamin tindakan yang ditampilkan demi perlindungan reformasi, destruksi atau rekonstruksi dari tatanan yang ada.

Ideologi merupakan suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Ideologi terdiri dari rangkaian sikap terhadap berbagai lembaga dan proses kemasyarakatan. Ideologi memberi kepercayaan akan suatu gambaran tentang dunia sebagaimana adanya dan juga mengatur kompleksitas dunia sampai pada bentuk yang sederhana dan dapat dipahami. Kadar pengaturan dan kesederhanaan dari gambaran yang dihasilkan sangat bervariasi antara satu ideologi dengan ideologi lain, dan kompleksitas dunia cenderung mengaburkan gambaran itu. Namun demikian, pada saat yang sama gambaran-gambaran dasar yang disediakan oleh setiap ideologi tetap konstan.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar kedua setelah Amerika Serikat ikut berperan dalam tata pergaulan internasional sesuai dengan isi konstitusi yang termatub dalam Pembukaan UUD 1945, *...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan*

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia.

Indonesia menganut ideologi Pancasila. Paradigma yang terkandung dalam ideologi Pancasila tersimpul dalam lima nilai dasar yang menjadi hakikat atau jatidiri kepribadian bangsa Indonesia. Meskipun kelima nilai dasar itu dimiliki pula oleh banyak masyarakat atau bangsa lain dan oleh karena itu bersifat universal, Indonesia telah melangkah maju dengan mengkaitkannya menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga Pancasila dapat diartikan sebagai ideologi yang orisinal bagi bangsa Indonesia.

Empat pilar negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila sebagai sebuah pemikiran yang dinamis menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Filosofi dasar ini menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat di dunia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila saat ini semakin lemah sehingga banyak masyarakat yang terperosok dalam perilaku-perilaku koruptif. Pengaruhnya bahkan sudah menembus benteng trias politica baik itu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif bahkan keluar dari itu.

Ideologi Pancasila,

Lima Sila Pancasila :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-

bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

4.2.4. Level Wacana Sosial Budaya

Secara garis besar tujuan negara dapat disederhanakan dalam dua hal utama yaitu keamanan dan keselamatan (security and safety) dan kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and prosperity). Negara-negara di dunia ini selalu

berusaha mencapai tujuan itu, termasuk negara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Posisi Amerika dan Indonesia di mata dunia memang berbeda, Amerika negara modern dan Indonesia masih dalam kategori negara berkembang atau negara dunia ketiga yang sangat ketergantungan.

Hubungan antara negara mengandung ketergantungan apabila negara yang dominan dapat berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara yang ketergantungan dapat melakukan hal yang sama sebagai refleksi perkembangan negara dominan. Hubungan antara negara dominan dengan negara yang ketergantungan merupakan hubungan yang tidak setara, karena pembangunan di negara dominan terjadi atas biaya yang dibebankan pada negara yang ketergantungan. Melalui bentuk pasar yang monopoli dalam hubungan perdagangan internasional dan hubungan ekspor modal dalam hubungan perdagangan modal, surplus ekonomi yang dihasilkan di negara yang ketergantungan mengalir dan berpindah ke negara dominan.

Demikian pula dengan hubungan Indonesia dan Amerika di mana hubungan Indonesia dan Amerika Serikat telah terjalin lebih dari setengah abad. Hubungan yang diawali dengan kedatangan tiga pejabat Amerika Serikat dengan kapal penjelajah Inggris HMS *Cumberland* masuk pelabuhan Jakarta pada tanggal 15 September 1945 beberapa minggu setelah kemerdekaan Indonesia. Ketiga Pejabat itu adalah anggota detasemen 404 dari *Office of Stategic Services* (OSS) dengan komando detasemennya Mayor Frederick E. Crockett.

OSS ini merupakan organisasi intelijen utama Amerika Serikat pada Perang Dunia II.

Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai cita-cita yang mirip setelah Perang Dunia II berakhir. Namun ketakutan yang menghantui kedua negara sangat berbeda. Indonesia mengalami ketakutan akan pemerintahan yang baru dan sikap solidaritas yang telah diciptakan oleh semangat nasionalisme di antara beragam kelompok etnis, bahasa, dan agama sedang diancam oleh diberlakukannya kembali kolonialisme Belanda. Selain itu Indonesia juga khawatir bahwa sekutu-sekutu Belanda yakni negara-negara Barat yang kuat, akan memberikan bantuan kepadanya.

Di lain pihak, Amerika Serikat mulai khawatir bahwa kesatuan dan kekuatan yang telah digalang di negara-negara demokrasi dalam perjuangan bersama melawan fasisme tidak akan bertahan untuk menghadapi bahaya-bahaya yang muncul yang diperhadapkan oleh komunisme totaliter terutama di Eropa.

Analisis Sjahrir tentang situasi dunia pada akhir Perang Dunia adalah ambruknya ekonomi di sebagian besar dunia dinyatakan dalam kekacauan sosial dan konflik politik yang hebat. Tekanan dari pihak pekerja untuk mengubah landasan masyarakat kapitalis menjadi masyarakat sosialis menjadi semakin mendesak. Di pihak lain, ada pihak-pihak yang biarpun adanya tekanan ini masih tetap berpegang pada orde lama, memandang ke semua arah untuk cara-cara memperkuat kedudukan mereka agar dapat memulihkan sistem kapitalis dan imperialis. Dan dengan demikian kita dihadapkan pada suatu jenis imperialisme baru. Kita sedang

hidup dalam suatu masa yang akan menentukan, sekali dan untuk selamanya, sistem mana yang ditakdirkan untuk menyebar dan pada akhirnya menentukan nasib seluruh umat manusia-neo kapitalisme atau sosialisme.

Serangan teroris yang meluluh-lantakkan World Trade Center dan Pentagon menyadarkan adanya kenyataan bahwa abad baru telah membawa bahaya baru, dan Amerika mendapati diri mereka mau tidak mau terseret dengan politik muslim dewasa ini. Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat secara otomatis mulai mempertimbangkan peran negara-negara dengan penduduk muslim terbesar seperti Indonesia.

Pidato awal Barack Obama di Mesir, dan kejatuhan Presiden Husni Mubarak tak lama setelahnya dapat dipahami sebagai skenario Amerika Serikat, apalagi peran Amerika Serikat sebagai pemimpin global. Amerika Serikat selalu berupaya menjamin stabilitas internasional, kejatuhan rezim-rezim penguasa di Timur Tengah menyiratkan masih kuatnya peran Amerika Serikat di kancah Global.

Sementara hubungan Indonesia dengan Timur Tengah telah terjalin lama. Faktor kedekatan secara emosional yaitu kesamaan agama menjadi jembatan hubungan Indonesia dengan kawasan itu. Kawasan yang kaya akan sumber minyak menjadikan daya tawar Timur Tengah di dunia Internasional. Amerika sangat berkepentingan dengan sumber-sumber minyak ini untuk mempertahankan hegemoni ekonomi.

Seiring dengan perkembangan teknologi, dominan budaya, politik dan ekonomi bisa menguasai dari satuan yang besar hingga satuan yang kecil. Satuan besar yaitu negara,

satuan kecil hingga perorangan. Perlu disadari hegemoni sekarang bisa dipahami sebagai dominansi dari budaya negara maju terhadap negara berkembang. Jadi hegemoni tidak semata-mata dalam bentuk penindasan/penguasaan secara fisik, tetapi bisa penguasaan secara wacana. Hegemoni wacana inilah yang berbahaya, karena manusia tidak sadar bahwa dia telah dihegemoni.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari penelitian tentang analisa wacana kritis pada Pidato Presiden Amerika Serikat Barack Obama dapat dibagi menjadi 3 sub bagian kesimpulan berikut:

1. Komunikasi politik

Secara umum, dalam komunikasi politiknya Barack Obama menguasai lima pola komunikasi massa yaitu kelengkapan (complete), keringkasan dan kepadatan (concise), memahami kenginan rakyat (consideration), memukau (clarity), dan persuasif dalam menumbuhkan respek (courtesy). Pola-pola komunikasi ini selalu masuk dalam rangkaian pidatonya.

2. Hegemoni

Pidato di Indonesia merupakan kelanjutan dari rangkaian pidato Obama di Mesir pada Juni 2009 dan pada tahun 2011 Timur Tengah bergejolak. Pidato di Indonesia yang awalnya dijadwalkan di bulan Juni 2010 namun karena alasan

keamanan ditunda sampai November 2010. Pidato Obama di Indonesia dapat dipahami sebagai usaha Amerika Serikat untuk menghalangi hegemoni Rusia dan Cina terhadap Asia dan Eropa demi mempertahankan posisi sebagai negara super power atau negara global power. Sejarah mencatat, sampai saat ini Amerika Serikat masih mempertahankan posisi itu. Hegemoni melalui segala aspek kehidupan terus diupayakan oleh Amerika Serikat baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan keamanan. Amerika Serikat berupaya menjadi polisi dunia dengan menanggung beban kepemimpinan dunia.

3. Ideologi

Pidato Obama merupakan landasan ideal untuk mengupayakan perdamaian dan mengubah wacana antara Amerika Serikat dengan dunia Muslim serta merupakan langkah awal proses pembaruan hubungan AS dengan dunia Muslim. Ideologi yang diusung oleh Amerika Serikat adalah ideologi liberalisme. Liberalisme disebut sebagai ideologi dunia modern yang paling berhasil. Liberalisme menyiratkan hal-hal yang akan menyelamatkan dan mempertinggi kebebasan itu, seperti persamaan hak, pemerintahan konstitusional, aturan hukum, dan toleransi. Sementara Indonesia menganut ideologi Pancasila, pidato Obama memberi isyarat bahwa ideologi yang dianut Amerika dan Indonesia kurang lebih sama yaitu menyelamatkan dan mempertinggi kebebasan, seperti persamaan hak, pemerintahan konstitusional, aturan hukum, dan toleransi.

5.2. Rekomendasi Penelitian

5.2.1 Rekomendasi Akademis

Penelitian ini berupaya melakukan analisa kritis terhadap teks pidato Barack Obama Presiden Amerika Serikat yang ke-44 ketika berkunjung di Indonesia November 2010 dan mencoba menghubungkannya dengan pidato sebelumnya di Mesir pada Juni 2009 serta kaitannya dengan bergolaknya Timur Tengah pada tahun 2011.

5.1.2. Rekomendasi Praktis

Dari hasil analisis yang dilakukan pada teks pidato Barack Obama tersebut, direkomendasikan agar penelitian tentang analisis wacana kritis makin didalami terutama dalam teks-teks pidato di mana sebuah teks pidato presiden ketika berkunjung ke suatu negara selalu mengandung makna yang membawa misi negara apalagi seperti Amerika Serikat yang berperan sebagai negara yang mendominasi negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Sobur. 2001. *Analisis Teks Media*, Bandung: Rosdakarya.
- Arthur Asa Berger. 1982. *Media Analysis Techniques*, Beverly Hills : Sage Publications.
- Berger, Charles R, dkk. 198. *Handbook of Communication Science*, The Publisher of. Professional Social Science.
- Denzin Norman K dan Yvonna S. Lincoln, 1994. *Handbook of Qualitative Research*, London Sage Publication.
- De Vito, Joseph A. (1997). *Human communication*. Terjemahan Agus Maulana/ Jakarta : Proffesional Books.
- Mulyana, Dedy., Jallaludin Rakhmat. 2006. *Komunikasi antar budaya; Panduan berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Effendy, Onong Uchjana (1993). *Komunikasi dan Modernisasi*, Alumni : Bandung.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS Yogyakarta.
- Fairclough, Norman. 1995. *Media Discourse*. Edward Arnold, London.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*. Granit Jakarta.
- Held, David. 2007. *Introduction to Critical Theory*. Hutchinson & Co, London.

- Hidayat, Dedy N. 2006/2007. *Kumpulan Bahan Kuliah Semester Ganjil-Metode Penelitian Komunikasi-Program Studi Ilmu Komunikasi*. Jakarta
- Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun (Editor). 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Laitin, David D. 1986. *Hegemony and Culture*. The University of Chicago press.
- Zen, Fathurin. 2004. *NU Politik, Analisis Wacana Media*. LKiS Yogyakarta.
- James Paul Gee, 1999 *An Introduction to Discourse Discourse Analysis, Theory and Method*, London and New York : Routledge,
- Titscher, Stefan at.al 2000. *Methods of Text and Discourse Analysis*, Beverly Hills : Sage Publications.
- Fairclough, Norman, 1995. *Media Discourse*, Edward Arnold. London
- Simon, Roger. 1991. *Gramsci's Political Thought: An introduction*, Lawrence and Wishart, London.
- Dan Nimmo, 1993. *Komunikasi Politik - Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Severin, Werner J and James W.Tankard, Jr. (2001). *Communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media*. Addison Wesley Longman,Inc.London.
- Adams, Ian. 2005. *Ideologi Politik Mutakhir*. Penerbit Qalam. Yogyakarta.

- Huntington, Samuel P. dkk. 2005. *Amerika dan Dunia*. Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Freedom Institute. Jakarta.
- Gardner, Paul F. 1999. *Lima Puluh Tahun Hubungan Amerika Serikat – Indonesia, Bersama Dalam Harapan, Sendirian Dalam Kecemasan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Morgenthau, Hans J dan Keneth W. Thompson. 2010. *Politik Antarbangsa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Thompson, Jhon B. 2003. *Analisis Ideologi Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. IRCiSoD. Yogyakarta.
- Thompson, Jhon B. 2004. *Kritik Ideologi Global, Teori Sosial Kritis Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. IRCiSoD. Yogyakarta.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- <http://dudijaya.blogspot.com/2011/02/revolusi-mesir-didalangi-as.html/>
- <http://oseafas.wordpress.com/2010/03/25/krisis-global-hegemoni-dollar/>